

A person in a dark suit and white shirt is holding a small globe of the Earth with both hands. The globe is centered in the frame, showing the Americas and parts of Europe and Africa. The background is dark with some light specks, suggesting a night sky or a digital space. The text is overlaid on the globe.

DINAMIKA PEMBANGUNAN GLOBAL

Dr. Ridwan, SE, M.Si
Editor: Muhammad Farid Ridwan

DINAMIKA PEMBANGUNAN GLOBAL

Penulis

Dr. Ridwan, SE, M.Si

Editor

Farid Ridwan

Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia

ISBN 978-623-427-204-8

DINAMIKA PEMBANGUNAN GLOBAL

Penulis

Dr. Ridwan, SE, M.Si

Editor

Farid Ridwan

ISBN:

978-623-427-204-8

Desain Sampul/Tata Letak:

Purnama

Hak Cipta © 2023, pada penulis
Hak publikasi pada
Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh
isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari
penerbit.

Tahun 2023

Penerbit:

Yayasan Sahabat Alam Rafflesia
Anggota IKAPI No. 002/Anggota Luar Biasa/BENGGKULU/2019
Bengkulu - Yogyakarta
Kontak: +62 852 33833 290
Email: salamrafflesia@gmail.com

Distributor:

PT Salam Literabaca Nusantara
DI Yogyakarta | email: literabaca@gmail.com

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT buku dengan judul *Dinamika Pembangunan Global* bisa kami selesaikan penulisannya tepat waktu. Semoga dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan mahasiswa pada umumnya.

Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang berkontribusi sehingga penulisan buku ini dapat dirampungkan.

Akhirnya penulis berharap kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran apabila dalam penulisan buku ini ada kekeliruan dan kekurangan terimah kasih.

Wassalam
Dr. Ridwan, SE., M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| <i>PRAKATA</i> | v |
| <i>DAFTAR ISI</i> | vi |
| <i>BAB I. PENGERTIAN PEMBANGUNAN</i> | 1 |
| A. Teori Fungsional Struktural..... | 3 |
| B. Teori Ketergantungan | 5 |
| C. Teori Sistem Dunia | 9 |
| D. Teori Liberal | 10 |
| E. Teori Artikulasi | 11 |
| <i>BAB II. GLOBAL GOVERNANCE</i> | 15 |
| A. Perserikatan Bangsa Bangsa..... | 26 |
| B. ASEAN | 27 |
| C. UNI EROPA | 28 |
| D. APEC | 29 |
| E. IMF..... | 30 |
| <i>BAB III. SMART CITY</i> | 33 |
| A. Tujuan | 34 |
| B. Pengertian | 35 |
| C. Karakteristik Smart City | 36 |
| D. Fungsi | 37 |
| E. Indikator dan Cara Menciptakan Smart City | 38 |
| F. Kota yang Menerapkan Smart City di Dunia | 40 |
| G. Pengertian Global | 44 |
| H. Konsep Ketahanan Pangan Dalam Negeri..... | 46 |
| I. Korelasi antara Keberadaan Isu Pangan Global dengan Ketahanan Pangan Indonesia..... | 50 |

| | |
|--|------------|
| <i>BAB IV. PERDAGANGAN BEBAS DAN REGULASI KAWASAN.....</i> | <i>57</i> |
| <i>BAB V. STRATEGI MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</i> | <i>73</i> |
| A. Strategi Meningkatkan Ekonomi Berwawasan Lingkungan | 75 |
| B. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau | 75 |
| C. Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth) dan PDB/PDRB Hijau | 77 |
| D. Strategi Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Lingkungan | 79 |
| E. Strategi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Berbasis Sosial Ekonomi | 80 |
| F. Strategi Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 82 |
| <i>BAB VI. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL.....</i> | <i>83</i> |
| A. Pembangunan Berkelanjutan | 83 |
| B. Konsep Pembangunan Berkelanjutan | 88 |
| C. Lingkup Pembangunan Berkelanjutan..... | 89 |
| D. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... | 91 |
| E. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan | 92 |
| F. Pengertian Pembangunan | 97 |
| G. Adapun Macam Partisipasi Dapat Dibedakan :..... | 104 |
| H. Prinsip-Prinsip dan Hirarki partisipasi | 104 |
| I. Perencanaan Pembangunan | 105 |
| J. Teori dan Konteks Pembangunan Global | 109 |
| K. Global Governance | 117 |
| L. Paradigma Baru Dalam Pembangunan Global..... | 118 |
| <i>BAB VII. KEBIJAKAN GLOBAL DALAM DINAMIKA PASCA PANDEMI COVID-19.....</i> | <i>127</i> |
| A. Pengertian Kebijakan Global..... | 127 |
| B. Dinamika..... | 128 |

| | |
|---|------------|
| C. Kebijakan pembatasan dan larangan perdagangan untuk bahan pangan | 130 |
| E. Ekonomi Kreatif..... | 132 |
| F. Kebijakan pengolahan atau pemusnahan limbah B3..... | 133 |
| G. Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia | 136 |
| <i>BAB VIII. REVOLUSI INDUSTRI.....</i> | <i>143</i> |
| A. Revolusi Industri 1.0..... | 143 |
| B. Revolusi industri 2.0..... | 147 |
| C. Revolusi Industri 3.0..... | 151 |
| D. Revolusi Industri 4.0..... | 154 |
| <i>DAFTAR PUSTAKA.....</i> | <i>167</i> |
| <i>TENTANG PENULIS</i> | <i>169</i> |

BAB I. PENGERTIAN PEMBANGUNAN

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya dan mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Beberapa pakar memberikan definisi pembangunan yang berbeda-beda sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Defenisi Pembangunan menurut beberapa pakar

| Tokoh | Pengertian |
|-----------------------------------|---|
| <i>Easton (1985)</i> | <i>Upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematis paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan.</i> |
| <i>Johan Galtung</i> | <i>Upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial.</i> |
| <i>Bintoro Tjokroamidjojo</i> | <i>Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.</i> |

Deddy T. Tikson menambahkan penjelasan tentang transformasi dalam struktur ekonomi. Peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa mempunyai kontribusi

terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, ia mengkritisi kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Sementara transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

A. Teori Fungsional Struktural

Teori Fungsional-struktural adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan dalam ilmu sosial di abad sekarang yang paling besar pengaruhnya.

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.

Teori fungsional struktural ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan

lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite functionalism, dimana ini menjadi panduan bagi analisa substantif Spencer dan penggerak analisa fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana didalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional-Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.

Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat adalah:

- a. Visi substantif mengenai tindakan sosial
- b. Strateginya dalam menganalisa struktur sosial.

Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan.

Paradigma AGIL adalah salah satu teori Sosiologi yang dikemukakan oleh ahli sosiologi Amerika, Talcott Parsons pada sekitar tahun 1950. Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. Teori AGIL adalah sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Parson mengenai struktur fungsional, diuraikan dalam bukunya *The Social System*, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. Teori Parsons dan Paradigma AGIL sebagai elemen utamanya mendominasi teori sosiologi dari tahun 1950 hingga 1970.

AGIL merupakan akronim dari Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency atau latent patternmaintenance, meskipun demikian tidak terdapat skala prioritas dalam pengurutannya. Prasyarat tersebut adalah A-G-I-L:

- a) Adaptation (adaptasi): bagaimana sebuah sistem beradaptasi dengan lingkungannya. Konsep ini dikaitkan dengan faktor ekonomi.
- b) Goal Attainment (pencapaian tujuan): menentukan tujuan yang kepadanya anggota masyarakat diarahkan. Konsep ini dikaitkan dengan faktor politik.
- c) Integration (integrasi): kebutuhan untuk mempertahankan keterpaduan sosial. Konsep ini dikaitkan dengan faktor sosial.
- d) Laten-Pattern Maintenance (pemeliharaan pola): sosialisasi atau reproduksi masyarakat agar nilai-nilai tetap terpelihara. Konsep ini dikaitkan dengan faktor budaya.

B. Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan adalah sebagai antitesis teori modernisasi yakni menekankan pada aspek keterbelakangan sebagai produk dari pola hubungan ketergantungan. Kedua kubu tersebut mendominasi ‘proyek besar’ pembangunan hingga akhir tahun 1980-an, ketika studi pembangunan mencapai ‘jalan buntu’. Kedua kubu teoritis tersebut dianggap gagal. Di satu sisi, realitas yang ada di negara-negara dunia ketiga sebagai obyek pembangunan tetap ditandai oleh berbagai indikator keterbelakangan, di sisi lain muncul fenomena negara-negara industri baru sebagai kisah sukses.

Awal mula Teori Ketergantungan (Dependency Theory) dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raul Presbich (Direktur Economic Commission for Latin America, ECLA). Dalam hal ini Raul Presbich dan rekannya bimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh pesat, namun tidak serta merta memberikan perkembangan yang sama kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Bahkan dalam kajiannya mereka mendapati aktivitas ekonomi di negara-negara yang lebih kaya sering kali membawa kepada masalah-masalah ekonomi di negara-negara miskin. Hal Ini oleh para teori neo-klasik tidak dapat diprediksi sebelumnya

dan dianggap bertentangan, oleh karena teori neo-klasik mengandaikan pertumbuhan ekonomi akan memberi manfaat kepada semua negara walaupun manfaatnya tidak selalu dibagi secara sama rata.

Kajian Prebisch mengenai fenomena ketergantungan ialah negara-negara miskin mengekspor komoditi ke negaranegara kaya yang kemudian menjadikan barang komiditi tersebut menjadi barang siap (manufactured) dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada negara-negara miskin. Nilai tambah yang ada oleh karena barang tersebut menjadi barang yang siap tentunya menimbulkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan barang yang belum siap. Oleh karena itulah, mengapa negara-negara miskin senantiasa tidak memperoleh pendapatan yang cukup dengan ekspor mereka karena terpaksa membayar lebih besar untuk mengimpor barang yang lebih siap dari negara-negara maju.

Presbich kemudian mengeluarkan suatu solusi terhadap kenyataan yang ada, yaitu negara-negara miskin sepatutnya melakukan program dengan menggantikan atau mencari pengganti barang yang selama ini mereka impor sehingga mereka tidak perlu lagi membeli barang siap dari negara-negara kaya. Negara-negara miskin juga perlu menjual produk-produk utama mereka ke pasaran dunia, akan tetapi cadangan devisa (mata uang asing) yang mereka peroleh dari penjualan produk utama tersebut jangan digunakan untuk membeli barang manufaktur dari luar.

Namun demikian, paling tidak ada tiga hal pokok yang membuat kebijakan seperti tersebut di atas sulit untuk dilakukan yaitu:

- 1) Pasar domestik negara-negara miskin tidak cukup besar guna mendukung skala ekonomi yang digunakan negara-negara kaya untuk terus membuat harga yang lebih rendah.
- 2) Kemauan politik (political will) negara-negara miskin terhadap transformasi (perubahan) dari sekadar menjadi produser komoditi barang primer sesuatu yang mungkin atau diinginkan.
- 3) Sejauh mana negara-negara miskin sebenarnya memiliki kontrol terhadap produk utama mereka, khususnya bagi penjualan barang tersebut di luar negeri.

Pada tahap ini dikatakan bahwa teori ketergantungan dapat dilihat untuk menjelaskan penyebab mengapa negaranegara miskin terus menjadi miskin. Adapun pendekatan tradisional neo-klasik tidak pernah melihat isu kemiskinan ini, sebaliknya mengatakan negaranegara miskin terlalu lambat untuk mengubah perekonomian mereka dengan mempelajari teknik-teknik ekonomi modern yang dapat membuat kemiskinan mereka menjadi berkurang (terhapus). Sedangkan penganut paham teori Marxis melihat kemiskinan yang berlanjut ini sebagai eksploitasi dari kapitalis.

Lebih lanjut dari kedua pemikiran di atas, muncullah satu pemikiran baru yang dikenal dengan Teori Sistem Dunia (World System Theory). Pendekatan ini mencoba menjelaskan bahwa kemiskinan adalah konsekuensi langsung dari evolusi ekonomi politik internasional kedalam pembagian yang kaku soal buruh yang mana menguntungkan pihak yang kaya dan merugikan yang miskin.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada teori tunggal untuk mempelajari teori ketergantungan, oleh karena perdebatan di antara teoritis, seperti Raul Presbich (mewakili pembaharu Liberal), Andre Gunder Frank (mewakili Marxis), dan Immanuel Wallerstein (mewakili Sistem Dunia) sangatlah kuat dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Walaupun tidak ada teori tunggal yang dapat menjelaskan teori ketergantungan, namun terdapat tiga ciri persamaan atas definisi yang disepakati oleh para ahli teori ketergantungan. Pertama, ketergantungan membentuk sistem internasional yang terdiri dari dua negara yang digambarkan sebagai dominan atau tergantung, pusat atau periferi atau metropolitan/satelit. Negara-negara dominan adalah negara maju yang mempunyai kemajuan industri dan tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Sedangkan negara-negara tergantung adalah Amerika Latin, Asia dan Afrika yang memiliki pendapatan per kapita yang rendah serta bergantung sepenuhnya kepada ekspor satu jenis komoditi untuk memperoleh devisa (foreign exchange).

Kedua, memiliki asumsi yang sama bahwa adanya kekuatan (dorongan) dari luar merupakan satu-satunya aktivitas ekonomi yang penting di dalam negara-negara yang bergantung. Kekuatan luar ini

termasuklah Perusahaan Multi National (MNC's) MNC, pasar komoditi internasional, bantuan luar negeri, komunikasi dan berbagai bentuk lainnya yang oleh negara-negara maju digunakan untuk kepentingan ekonomi mereka di luar negeri.

Ketiga, pengertian ketergantungan menunjukkan bahwa hubungan antara negara yang mendominasi dan yang bergantung adalah dinamis, karena interaksi antara dua negara bukan hanya untuk saling menguatkan, tetapi juga untuk meningkatkan pola/corak yang tidak merata dalam pembagian ekonomi.

Sejak tahun 1970-an, teori dependensi klasik telah demikian banyak menerima kritik. Pada dasarnya kritik yang mereka ajukan mendasarkan diri pada ketidakpuasan mereka terhadap metode kajian, konsep, dan sekaligus implikasi kebijaksanaan yang selama ini dimiliki oleh teori dependensi klasik.

1) Metode pengkajian

Teori dependensi menuduh ajaran teori modernisasi tidak hanya sekedar pola pikir yang memberikan pembenaran ilmiah dari ideologi negara-negara barat untuk mengeksploitasi negara dunia ketiga. Dalam menanggapi kritik ini, teori modernisasi membalas dengan tidak kalah garangnya, dengan menunjuk bahwa teori dependensi hanya merupakan alat propaganda politik dari ideologi revolusioner Marxisme. Baginya, teori dependensi bukan merupakan karya ilmiah, melainkan lebih merupakan pamflet politik.

2) Kategori teoritis

Teori dependensi menyatakan, bahwa situasi ketergantungan yang terjadi di Dunia Ketiga lahir sebagai akibat desakan faktor eksternal. Disinilah para penganut pola pikir neoMarxisme mengarahkan kritiknya. Mereka menuduh, bahwa teori dependensi secara berlebihan menekankan pentingnya pengaruh faktor eksternal, dengan hampir melupakan sama sekali dinamika internal, seperti misalnya peranan kelas sosial dan negara.

3) Implikasi kebijaksanaan

Sejak dari awal penjelasannya, teori dependensi telah secara tegas dan detail menguraikan akibat buruk dari kolonialisme

dan pembagian kerja internasional. Teori ini berpendapat, selama hubungan pertukaran yang tidak berimbang ini tetap bertahan sebagai landasan hubungan internasional, maka ketergantungan negara dunia ketiga tetap tak terselesaikan. Oleh karena itu, teori dependensi mengajukan usulan yang radikal untuk mengubah situasi ketimpangan ini, yakni dengan revolusi sosialis.

C. Teori Sistem Dunia

Teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Hal ini dikarenakan bahwa dalam suatu sistem sosial perlu dilihat bagian-bagian secara menyeluruh dan keberadaan negara-negara dalam dunia internasional tidak boleh dikaji secara tersendiri karena ia bukan satu sistem yang tertutup. Teori ini berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia. Wallerstein menyatakan sistem dunia modern adalah sistem ekonomi kapitalis.

Menurut Wallerstein, sistem dunia kapitalis dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Negara Core atau pusat, yakni negara yang mengambil keuntungan paling banyak, karena kelompok ini dapat memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu.
2. Negara semi-periferi atau setengah pinggiran, yakni negara yang mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir.
3. Negara periferi atau pinggiran.

Menurut Wallerstein negara-negara dapat naik atau turun kelas, misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran, dan sebaliknya. Naik dan turun kelasnya negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Pernah suatu saat Inggris, Belanda, dan Perancis adalah negara pusat yang berperan dominan dalam sistem dunia, namun kemudian Amerika Serikat muncul menjadi negara terkuat (pusat) seiring hancurnya negara-negara Eropa dalam Perang Dunia II.

Wallerstein merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu:

- 1) Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Sebagai misal negara pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri oleh karena mahal sedangkan komoditi primer mereka murah sekali, maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor. Dengan ini ada kemungkinan negara dapat naik kelas.
- 2) Kenaikan kelas terjadi melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negaranegara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar dan kemudian lahir apa yang disebut dengan MNC. Akibat dari perkembangan ini, maka muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang diundang oleh oleh perusahaan-perusahaan MNC untuk bekerjasama.
- 3) Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Sebagai misal saat ini dilakukan oleh Peru dan Chile yang dengan berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaanperusahaan asing. Namun demikian, semuanya ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Jika tidak, mungkin dapat saja gagal.

D. Teori Liberal

Teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan, teori liberal tetap berjalan seperti sebelumnya yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kritik terhadap teori liberal pada umumnya berkisar pada ketajaman definisi dari teori ketergantungan. Definisi yang ada dianggap terlalu kabur, sulit dijadikan sesuatu yang operasional. Tanpa kejelasan dan ketajaman konsep-konsep dasarnya, teori ketergantungan lebih merupakan sebuah retorika belaka. Agar konsep

ketergantungan dapat di pakai untuk menyusun teori, maka ada dua kriteria yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Gejala ketergantungan ini harus hanya ada di negara-negara yang ekonominya mengalami ketergantungan dan tidak di negara yang tidak tergantung dengan negara lain.
- b. Gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung.

Dari penelitiannya terhadap aspek ekonomi dan sosiopolitik dari gejala ketergantungan, Teori Liberal melihat bahwa gejala ini juga terdapat di negara-negara yang dianggap tidak tergantung. Misalnya tentang dominasi modal asing. Dalam kal ini, Kanada dan Belgia akan lebih tergantung daripada India atau Pakistan. Tetapi sulit sekali memasukkan Kanada dan Belgia ke dalam kelompok Negara-negara yang tergantung, karena tingkat kemakmurannya yang tinggi. Baik dominasi maupun ketergantungan merupakan gejala yang umum yang ada di Negara-negara pusat maupun pinggiran.

Teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan. Teori Liberal tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori yang dianut oleh para ahli ekonomi ini lebih mengembangkan diri pada keterampilan teknisnya, yakni bagaimana membuat table input-output yang baik, bagaimana mengukur keterkaitan diantara berbagai sector ekonomi dan sebagainya. Tentu saja bukan tidak berguna. Tetapi, yang kurang dipersoalkan adalah bagaimana faktor politik bisa dimasukkan ke dalam model mereka.

E. Teori Artikulasi

Munculnya teori ini dikarenakan ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan karena pada dasarnya pembangunan dan industrialisasi memang terjadi di negara-negara terbelakang. Mula pertama dikembangkan oleh antropolog Perancis, seperti Claude Meillassoux dan Pierre Phillippe Rey. Teori ini melihat persoalan keterbelakangan dalam lingkungan proses produksi, artinya keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme

untuk berfungsi secara murni, sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut.

Teori Artikulasi bertitik tolak dari konsep Formasi Sosial. Dalam marxisme dikenal konsep cara produksi (mode of production), misalnya cara produksi feodal, cara produksi kapitalis, dan cara produksi sosialis, yang ketiganya memiliki perbedaan. Misal dalam kapitalisme terdapat pasar bebas, akumulasi modal yang cepat dan sebagainya. Namun, kenyataan yang sesungguhnya dalam masyarakat tidak hitam putih seperti itu. Adanya cara peralihan seperti dari cara produksi feodal ke kapitalis bukan terjadi pada hitungan hari, tetapi memakan waktu yang lama dan pada waktu peralihan yang lama inilah terjadi percampuran dari dua atau lebih cara produksi. Oleh karena itu, gejala di mana beberapa cara produksi ada bersama disebut dengan formasi sosial.

Jika teori ketergantungan melihat bahwa kapitalisme yang menggejala di negara-negara pinggiran berlainan dengan kapitalisme yang menggejala di negara-negara pusat, maka teori artikulasi berpendapat bahwa kapitalisme di negara-negara pinggiran tidak dapat berkembang karena artikulasinya, atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Dengan kata lain, kegagalan dari kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme yang berbeda, tetapi karena koeksistensi cara produksi kapitalisme dengan cara produksi lainnya (kemungkinan) saling menghambat.

Artikulasi bertitik tolak dari konsep formasi sosial. Dalam Marxisme dikenal konsep cara produksi. Masing-masing cara produksi mempunyai ciri yang berlainan dengan cara produksi lainnya. Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat selalu terdapat lebih dari satu cara produksi secara bersama-sama. Inilah yang disebut formasi sosial, yaitu gejala dimana beberapa cara berproduksi ada bersama.

Dalam Teori Artikulasi kapitalisme di negara-negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikulasinya atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Ada banyak unsur penghambatnya. Bagi Teori Artikulasi kegagalan dari kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme yang

berbeda, tetapi karena koeksistensi cara produksi kapitalisme dengan cara produksi lainnya bersifat saling menghambat.

Teori Artikulasi disebut juga sebagai teori yang memakai pendekatan cara produksi. Pada teori ini, persoalan keterbelakangan dilihat dalam lingkungan proses produksi. Bagi teori artikulasi, keterbelakangan di Negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni. Sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut.

Pembangunan internasional atau pembangunan global adalah konsep luas yang mencakup tingkat pembangunan berskala internasional. Pembangunan internasional merupakan dasar pengelompokan negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Namun demikian, ada banyak aliran dan kesepakatan terkait pembangunan suatu negara.

Pembangunan internasional dari dulu berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Belakangan ini, pembangunan internasional sering dikaitkan secara menyeluruh dan multidisipliner dengan pembangunan manusia serta daya saing, kualitas hidup, atau kesejahteraan subjektif.

Pembangunan internasional berbeda dengan pembangunan pada umumnya. Pembangunan internasional secara khusus terdiri atas lembaga dan kebijakan yang muncul setelah Perang Dunia II. Lembaga-lembaga ini bertujuan memberantas kemiskinan dan memperbaiki standar hidup di negara-negara yang sebelumnya terjajah.

BAB II. GLOBAL GOVERNANCE

Governance without government (1992) yang dikemukakan oleh Rosenau dan Czempiel berhasil menarik perhatian ahli hubungan internasional terhadap konsep tersebut. Terminology global governance semakin sering muncul dalam media komunikasi baik cetak ataupun digital. Terbitnya jurnal dengan nama global governance (Weiss,2001). Akan tetapi global governance bukanlah sebuah konsep yang jelas dan cenderung dianggap sebagai stylish catchword semata di satu sisi konsep ini dipahami dengan cara yang berbeda oleh masing-masing individu.

Global governance, dalam pandangan Rosenau (1995:13), mengarahkan ke lebih dari institusi formal dan organisasi-organisasi di mana manajemen dalam peristiwa internasional terus-menerus berlangsung, membayangkan memasukkan sistem-sistem atas aturan dalam semua tingkatan pada aktivitas manusia dan terus mencari tujuan-tujuan pengawasan sebagai reaksi atau akibat transnasional.

Pemerintahan global adalah membuat/mensetting institusi-institusi global yang bertujuan merubah hasil dari globalisasi. Global governance sebagai interaksi horizontal dan vertikal, yang mengklaim semua orang terlibat, lebih cenderung kearah politis daripada konsep akademis, yang dipandang sebagai good governance in global level mencakup norma yang jelas didalamnya (Muhadi Sugiono, 2007).

Konsep tata kelola global merupakan bentuk konseptual yang masih dalam proses Sebuah ide atau gagasan yang saat ini sedang banyak diperdebatkan di kalangan profesional hubungan Pandangan

Internasional Saat Ini tentang Tata Kelola Global sebagai Ide/Konsep Bukan hanya negara yang memiliki otoritas pusat. Banyak variabel tambahan yang terus berkembang untuk mengakomodasi variabel yang berbeda Masalah global yang muncul. Oleh karena itu, tata kelola global dapat dilihat sebagai Urutan yang terkait dan menjembatani antara satu masalah dengan masalah lainnya masalah lain secara bersamaan.

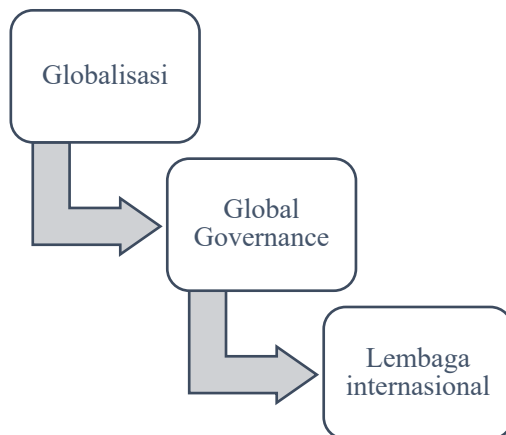
Global governance yang berangkat dari berkembangnya isu-isu ekonomi politik internasional, dapat dijadikan sebuah perangkat ideal dan baik untuk diaplikasikan secara kritis, ataupun sebagai sarana untuk memecahkan masalah ekonomi global yang selalu penuh dinamika dari waktu ke waktu. Jadi global governance merupakan sebuah proyek yang bersifat normatif dengan mengembangkan berbagai gagasan yang ideal untuk direalisasikan dalam menjawab berbagai tantangan globalisasi, dalam hal ini terkait mengenai transformasi yang terjadi dalam bidang ekonomi politik internasional. Globalisasi dari ekonomi politik internasional merupakan satu dampak positif untuk mengembangkan fungsi otoritas di luar negara. Kekuatan dari pasar dan interaksi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya akan membawa sebuah inovasi ataupun bentuk-bentuk baru. Sebagai konsep baru yang keberadaannya masih kontroversial, Dalam hal ini, penulis mencoba membuat analisis baru atau wacana baru. Implementasi konsep tata kelola global berdasarkan mekanisme Perdagangan yang Adil sebagai Isu Ekonomi Politik

Disisi lain upaya untuk merumuskan konsep governance dengan cara mendefinisikannya secara komprehensif, menjadikan konsep tersebut sangat luas dan, oleh karenanya, bersifat all inclusive. Dalam artian ini, global governance mencakup ruang konseptual yang sangat luas yang bisa diisi oleh para ilmuwan maupun praktisi hubungan internasional (rosenanu, 1995; Finkelstein, 1995). Pada saat yang sama, sebagai produk dari upaya untuk memahami dinamika penting yang terjadi dalam politik internasional setelah perang dingin. Terlepas dari ketidakjelasan definisi tentang global governance merupakan sebuah konsep yang masih sangat diperdebatkan.

Thomas Weiis lebih menjelaskan bahwa global governance tidak lain adalah "...efforts tobring more orderly and reliably responses

to social and political issues that go beyond capacities of states to address individually".Ini berarti bahwa isu dalam global governance merupakan isu yang tidak mampu lagi diatasi oleh negara dengan kapasitasnya saat ini.Konsekuensinya adalah bahwa global governance memerlukan interaksi lebih dari satu pihak, sebagaimana dalam pengertian dari Gold Mercury International, yaitu global governance is about the interaction that is required to solve problems that affect more than one state or region when there is no power enforcing compliance".

Dalam hal ini Global Governance mempunyai arti yang lebih luas dari *Government* di mana aktor negara menjadi sekunder dan timbul aktor global untuk menyelesaikan isu-isu *International Goveremet* atau *Non-International Government* . sehingga dapat diartikan bahwa pemerintahan global mengacu pada cara di mana urusan global dikelola. Karena tidak ada pemerintahan global, pemerintahan global melibatkan berbagai aktor termasuk negara, serta organisasi regional dan internasional. Dengan demikian *global governance* membahas mengenai PBB, WTO, IMF, ILO, BIS , G20, konvensi Jenewa dan konvensi-konvensi internasional lainnya, Uni Eropa, dan lain-lain. Negara-negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam konteks global governance.



Globalisasi sangat mempengaruhi global governance mari kita bahas sebelumnya apa itu globalisasi. Kata globalisasi sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi adalah hal yang tidak dapat dipungkiri atau dihindari. Menurut Anggara (2013) “Globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik”.

Globalisasi dicontohkan oleh bukti nyata perubahan terlalu banyak air. Negara yang mengetahui globalisasi akan menerima memanfaatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Selain barang dan banyak pelayanan, harga juga lebih murah, penghasilan pekerja tingkat kesehatan yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih tinggi secara umum. IMF menunjukkan bahwa dalam dua puluh tahun terakhir, sejumlah negara telah terbuka

Tidak dapat dipungkiri, gagasan mengenai global governance muncul sebagai konsekuensi dari dan sangat terkait dengan fenomena globalisasi ekonomi (Prakash dan Hart, 1999). Global Governace dalam artian ini sebenarnya merupakan sebuah proyek normative, yakni sebagai sebuah gagasan yang diidealkan ataupun yang ingin direalisasikan.

Pemangku kepentingan dan akademisi melihat tata kelola global sebagai upaya untuk mengatasi tantangan yang timbul dari globalisasi: pengembangan pusat-pusat kekuasaan, otoritas, dan kompetensi baru dalam kerangka nasional. Salah satu tempat kekuasaan, otoritas, dan kekuasaan terpenting dalam konteks globalisasi adalah pasar. Globalisasi telah meningkatkan kekuatan produktif dan finansial kita dalam berurusan dengan negara-negara teritorial.

Pendukung liberalisme ortodoks memandang globalisasi sebagai proses positif, tetapi skeptis tentang apakah atau sampai sejauh mana hal itu akan mendorong kemunduran negara dan membahayakan liberalisme bawaan masih diperdebatkan (Ruggie, 1982; Hirst dan Thompson, 1996).). Ditandai dengan kekakuan, yang cenderung menyebabkan inefisiensi dalam atribusi nilai (ekonomi). Namun, kecenderungan untuk melihat globalisasi sebagai bentuk pasar

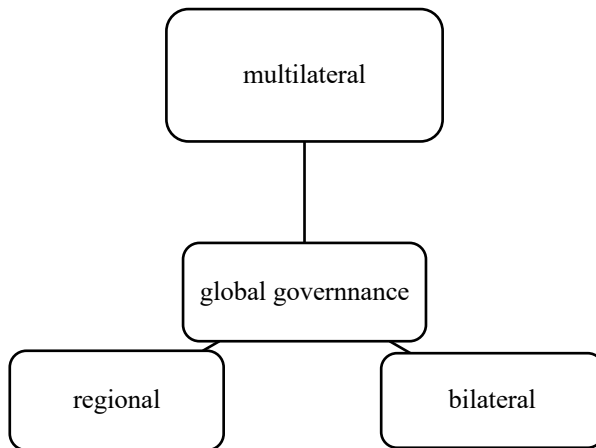
pemenangan bagi negara juga mendukung munculnya refleksi penting, yaitu krisis wilayah negara akibat globalisasi ekonomi akan menghancurkan fondasi masyarakat pasar tanpa regulasi politik.

Dinamika gerakan kelompok ini secara global berkembang beriringan dengan kaum environmentalis, bahwa alam sudah mengalami ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh eksploitasi, guna memenuhi tuntutan kebutuhan konsumsi manusia. Menurut ecological footprint yaitu standar untuk mengukur jumlah atau besaran lahan produktif yang diperlukan untuk menyokong kehidupan manusia, bahwa negaranegara maju, seperti Amerika dan Eropa adalah negara yang paling banyak menggunakan lahan produktif di dunia. Otomatis hal ini akan menimbulkan eksploitasi alam yang kemudian berakibat pada munculnya banyak krisis ekologi. Jadi pertumbuhan manusia meningkat yang diiringi oleh berkembangnya kebutuhan manusia, maka akan mengakibatkan menipisnya sumber daya alam yang tersedia. Fenomena tersebut menjadi dasar kemunculan kelompok konsumen etis yang sadar akan dampak dari perilaku konsumsinya.

Namun gerakan kelompok ini tidak lepas dari berbagai hambatan, yaitu kelompok-kelompok pelaku ekonomi politik intersional yang memandang kemunculan kelompok etis membuka peluang bisnis baru, yaitu munculnya produk-produk berlabel etis, meskipun sesungguhnya produk tersebut tidak mengikuti standar-standar produksi etis, hanya semata-mata mengejar keuntungan. Kendala ini tampaknya muncul sebagai bentuk pertentangan terhadap munculnya fair trade, dimana akan mengancam posisi free trade yang telah lebih dahulu berkembang dalam rezim perdagangan internasional. Maka konsep global governance ditawarkan untuk diaplikasikan dalam mekanisme fair trade sebagai suatu tata kelola yang didasarkan pada sebuah bentuk jaringan (networking) paralel antara berbagai komponen dengan prinsip transparansi guna memberikan kontrol keadilan yang merupakan prinsip dasar dari fair trade. Global Governance Dalam Fair Trade Konsep global governance memfokuskan analisisnya dalam rezim perdagangan internasional pada peranan aktor non-negara dalam menjalankan tatanan global, sesuai dengan otoritas yang melekat pada aktor tersebut.

Dimana tidak meletakkan fungsi otoritatis yang terpusat, namun juga memberikan perhatian pada tingkatan regional, nasional, dan lokal. Struktur itu tidak digambarkan sebagai sesuatu 10 yang hirarkis, namun ditempatkan dalam sebuah jaringan yang paralel dan saling terkait. Berkaitan dengan fenomena tersebut diatas maka global governance sebagai kerangka deskriptif akan menjadi sebuah pangkal dari upaya untuk memahami perkembangan-perkembangan global yang muncul pada saat ini.

Semakin pentingnya tataran politik selain negara-bangsa terutama tataran internasional; kedua, sebagai konsekuensi dari yang pertama, mengemukanya masalah kontrol negara-bangsa; dan ketiga, semakin besarnya peranan aktor-aktor politik yang lain seperti Lembaga lembaga swadaya masyarakat (NGOs) dan perusahaan-perusahaan swasta.⁹ Tentunya perkembangan global yang akan dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan perkembangan fair trade sebagai sebuah alternatif baru dalam perdagangan internasional, dimana komponen-komponennya akan membentuk sebuah jaringan yang saling bersinggungan dengan peranan aktor non-negara sebagai new middle man.



Namun pada saat yang sama, tren globalisasi sebagai bentuk kemenangan pasar atas negeri ini turut menyumbang munculnya opini-opini kritis, yakni krisis negara teritorial melalui globalisasi ekonomi pada akhirnya akan menghancurkan fondasi pasar Kibirali.

masyarakat. . melayani Dengan kata lain, pasar tanpa regulasi politik menghancurkan dirinya sendiri.

Berdasarkan asumsi bahwa globalisasi telah menciptakan krisis politik tradisional, kebutuhan akan mekanisme atau fungsi pemerintahan yang setara sangat meningkat. Konsep pemerintahan global atau "pemerintahan tanpa pemerintah" adalah ide yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tata kelola global adalah tatanan politik yang dikembangkan sebagai respons terhadap globalisasi, lebih tepatnya.

Fungsi global governance sebagai pengganti peran negara atau pemerintah ini terlihat sangat jelas dalam definisi-definisi yang diberikan untuk konsep tersebut. The commission on global governance, misalnya mendefinisikan global governance sebagai "...the sum of the many ways individuals and institutions, public and private manage their common affairs....governance has been viewed primarily as intergovernmental relationships, but it must now be understood as also involving non-governmental organization, citizen movement, multinational corporation, and the global capital market... it is continuing process through which conflicting or diverse interest may be accommodated and cooperative action may be taken(1995: 2)".

Sebagai konsep yang berkembang dari fenomena globalisasi(ekonomi), global governance dapat ditafsirkan sebagai sebuah konsep dengan karakter ekonomistik. Mengikuti pembedaan Analisa yang dilakukan oleh Ashley terhadap mode-mode ekonomisme, global governance hanyalah variable dependen dari sebuah kerangka besar ekonomi pasar. Global governance sebagai sebuah tatanan politik sebenarnya muncul, dibentuk dan dibatasi oleh realitas ekonomi pasar. Perilaku actor dalam tatanan ini sebenarnya semata-mata mencerminkan atau dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi pasar dan oleh karenanya hanya epifenomena dalam rangka struktural ini . pada saat yang sama, konsep global governance juga memiliki karakter institusionalis. Sebagai mekanisme untuk mengatasi kegagalan pasar ataupun untuk mengatasi kegagalan pasar ataupun untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku kolektif di tingkat global, global governance sangat

mencerminkan logika institusionalisme rational-choice. Dengan karakter ekonomistik maupun institusionalis rational choice ini. Konsep global governance sebenarnya sulit untuk diintegrasikan ke dalam ilmu politik atau hubungan internasional, terlepas dari meningkatnya minat ilmuwan politik dan ahli hubungan internasional terhadap konsep ini. Setidaknya, kedua karakter konsep global governance tersebut sulit dipahami melalui logika perilaku politik tradisional. Konsep global governance bukanlah mekanisme bagi alokasi nilai-nilai secara otoritatif, sebagaimana ilmuwa politik konvensional memahami hakekat politik.

Sekalipun pada dasarnya berkembang dari fenomena globalisasi ekonomi dan konsekuensinya, sangat bersifat ekonomistik dan institusional, gagasan mengenai global governance juga telah berkembang meluas melampaui batas-batas penggunaan awalnya. Dalam artian ini, global governance dipahami bukan semata-mata sebagai respon terhadap tuntutan globalisasi ekonomi melainkan sebagai response terhadap masalah-masalah global yang lebih luas seperti misalnya masalah lingkungan dan human security. Adalah dalam artian yang meluas ini, global governance menjadi konsep yang sangat menarik bagi ahli sosial politik dan hubungan internasional.

Global governance menjadi pangkal dari upaya untuk memahami perkembangan global yang muncul saat ini pertama semakin pentingnya tataran dalam politik selain negara bangsa terutama tataran nasional; kedua sebagai konsekuensi dari yang pertama, mengemukakaknya masalah kapasitas atau kontrol negara bangsa; dan ketiga semakin besarnya peran actor politik seperti Lembaga swadya masyarakat dan perusahaan swasta. Berbagai perkembangan tersebut mengubah kondisi-kondisi bagi penerapan kontrol politik di berbagai tingkat yang berbeda dan yang secara keseluruhan kemudian dikenal global governance.

Pemahaman mengenai kedaulatan negara-bangsaselama ini, yakni sebelum meluasnya fenomena globalisasi, misalnya, cenderung dipahami secara berlebihan. Dalam sejarah negara-bangsa, mungkin dengan sedikit pengecualian, sebenarnya tidak ada negara yang memiliki kedaulatan yang absolut. Setidaknya, karena kedaulatan bukanlah sebuah konsep tunggal. Krasner (1999: 9),

misalnya, mengidentifikasi empat makna yang berbeda yang terdapat dalam konsep kedaulatan: kedaulatan legal internasional, kedaulatan Westphalia, kedaulatan interdependensi dan kedaulatan domestik.

Arti kedaulatan yang berbeda ini seringkali dipahami secara luas di bawah konsep kedaulatan yang terpadu. Klaim kedaulatan suatu negara dalam praktik hubungan internasional sama sekali tidak terkait dengan makna tertentu dari konsep kedaulatan, melainkan merupakan konsep holistik yang mencakup keempat makna tersebut. Sarjana hubungan internasional juga cenderung menggunakan konsep kedaulatan dengan cara yang sama seperti praktisi menggunakannya. Jadi kita cenderung menggunakannya sebagai konsep tunggal yang mencakup keempat makna yang berbeda ini. Dengan demikian, pernyataan umum yang sering dibuat oleh para sarjana tentang perubahan kedaulatan nasional tanpa mempertimbangkan empat dimensi yang membentuk konsep kedaulatan tidak dapat diterima.

Meningkatnya peran dan kuantitas NGOs juga mendorong munculnya perdebatan. Pemikiran realis yang sangat dominan dalam teori-teori politik internasional selama ini, yang menggambarkan politik internasional semata-mata atau terutama sebagai hubungan antar pemerintah negara-negara yang berdaulat, dianggap bukan hanya tidak berdasar tetapi juga tidak relevan karena pemikiran tersebut mengabaikan peran NGOs dalam politik internasional. Craig Murphy (1994), misalnya, secara meyakinkan telah berhasil menunjukkan peran dan sumbangan aktor-aktor bukan negara bagi perkembangan global governance sejak tahun 1850. Juga, Kees van der Pijl (1984) menunjukkan bagaimana aliansi transatlantik pasca Perang Dunia II bukan hanya sangat ditentukan tetapi hanya bisa bertahan dengan dukungan peran aktor-aktor privat. Oleh karenanya, konsep global governance, sejauh menggambarkan sebuah tatanan pasca nasional - postnationale Konstelation (Habermas, 1998) - yang ditandai dengan 'the retreat of the state' serta meningkatnya peran aktor-aktor bukan negara, sebenarnya tidak jauh beranjak dari pemikiran tentang complex interdependence yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye melalui *Power and Interdependence* (1977). Setidaknya beberapa asumsi utama yang mendasari konsep global governance adalah asumsi yang juga ditampilkan dalam konsep

complex interdependence. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan budaya bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri.

Diselenggarakan (1999), mempertimbangkan 7 (tujuh) aspek sejarah globalisasi untuk menjelaskan keteraturan globalisasi dunia: politik; meliputi penyebaran negara-bangsa, munculnya (tingkat) pemerintah, respon berkembang dalam organisasi kekerasan; bahkan perang dan produksi senjata, perdagangan dan pasar global, keuangan global, kekuatan perusahaan multinasional, jaringan produksi global, migrasi global, globalisasi budaya. Komite Tata Kelola Global (GloGov) lahir untuk memecahkan masalah ini, kelompok Secara independen dengan 28 pemimpin dunia yang melaporkan masalah disebut Our Global Neighborhood pada tahun 1995. Arti dari globalisasi untuk GloGov. Konsepsi mereka tentang globalisasi mencakup banyak aspek; seperti ekonomi, keamanan, lingkungan dan munculnya masyarakat global (global civil society). masyarakat, pembangunan global, termasuk bantuan pembangunan.

Dalam perdebatan konsep diet, pada dasarnya ada upaya untuk menjauhkan diri dari pola pikir dominan saat itu, yaitu pola pikir praktis. Sementara realis berpikir bahwa kerjasama internasional terjadi hanya jika ada “tujuan” dan kerjasama itu akan berakhir jika kepentingan-kepentingan objektif tersebut berubah (Grieco, 1990), para pendukung teori rezim berpendapat bahwa kesepakatan konvensi dan kesepakatan internasional adalah bagian darinya. Rezim internasional dipahami sebagai bentuk-bentuk perilaku berbasis norma atau aturan yang dilembagakan untuk mengelola konflik dan masalah saling ketergantungan di berbagai bidang hubungan internasional. Seperti tata kelola global, konsep rezim internasional mengacu pada upaya pengaturan atau sarana yang melampaui batas teritorial suatu

negara. Kelemahan utama teori rezim adalah kecenderungannya untuk menempatkan peraturan internasional dalam kerangka yang berpusat pada negara. Dengan kata lain, rezim internasional tidak lebih dari bentuk multilateralisasi antar negara. Dengan asumsi state-centered, teori rezim tetap sangat praktis dan menjadi kurang relevan dalam studi kontemporer tentang hubungan internasional, terutama setelah berkembangnya pemikiran tentang kekuasaan dan interdependensi. Kelemahan kedua teori rezim tersebut berasal dari fokus mereka pada masalah regulasi yang sangat spesifik. Rezim internasional bukanlah tatanan politik global.

Macam-macam lembaga internasional dan pengertian Lembaga internasional Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa

Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Pada hakikatnya organisasi internasional memiliki arti luas dan sempit. Secara luas, organisasi internasional meliputi organisasi publik (Public international organization), organisasi privat (Private international organization), organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi bersifat universal (Organization of universal character). Secara sempit hanya meliputi organisasi internasional publik.

Menurut Clive Archer organisasi internasional adalah struktur formal yang didirikan berdasarkan persetujuan bersama dari setiap anggota pemerintah dan nonpemerintah dari berbagai negara berdaulat, yang memiliki visi mencapai suatu kesepakatan bersama, serta menciptakan perdamaian dan keamanan dunia yang sejahtera. Organisasi internasional untuk meraih visinya perlu menerapkan fungsinya dengan benar dan juga tertata rapi agar tidak bertentangan dari yang telah disepakati bersama.

Peran organisasi internasional membantu mengatur agenda internasional, memediasi tawar-menawar politik, menyediakan tempat

bagi inisiatif politik dan bertindak sebagai katalis untuk pembentukan koalisi. Mereka memfasilitasi kerja sama dan koordinasi di antara negara-negara anggota. Menurut Beth Simmons dan Lisa Martin organisasi internasional yang didirikan atas dasar kerja sama antar-negara anggotanya untuk menjalankan sistem yang berlaku secara internasional.

A. Perserikatan Bangsa Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB (bahasa Inggris: *United Nations*, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa, dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.



Tujuan utama PBB adalah:

1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
4. Menjadi pusat penyaluran segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia
5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

B. ASEAN

ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan Ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, Thailand pada Tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai.



Deklarasi Bangkok

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
- Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional
- Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
- Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada
- Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:

- Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
- Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar

- Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
- Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
- Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
- Kerja sama efektif antara anggota

C. UNI EROPA

Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Namun, banyak aspek dari Uni Eropa timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, yaitu kembali ke tahun 1950-an.



Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organ penting di dalam Uni Eropa adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Di samping itu, terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggotanya.

D. APEC

APEC adalah forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok perdagangan lain di bagian-bagian lain dunia; ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, dan untuk mendirikan pasar baru untuk produk agrikultural dan bahan mentah di luar Eropa. Bermakna di Singapura, APEC diakui sebagai forum tertua dan blok multilateral tingkat tertinggi di kawasan Asia-Pasifik, dan memberikan pengaruh global yang signifikan.



Pertemuan Pemimpin Ekonomi tahunan APEC dihadiri oleh kepala pemerintahan dari seluruh negara anggota APEC kecuali Taiwan (yang diwakili oleh pejabat level menteri yang dinamai Tionghoa Taipei sebagai kepala ekonomi). Lokasi pertemuan ini dirotasi tiap tahun di antara negara anggota, dan sebagai tradisi, yang diikuti oleh hampir semua pertemuan, setiap kepala pemerintahan yang hadir mengenakan pakaian tradisional negara tuan rumah. APEC memiliki tiga pengamat resmi: Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik dan Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik.

E. IMF

Organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi ini bermarkas di Washington, D.C. DMI dibentuk pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods, kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. DMI sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Hingga 2010, dana cadangan DMI mencapai SDR476,8 miliar, sekitar US\$755,7 miliar atau Rp6,73 kuadriliun menurut nilai tukar tahun itu.

Lewat dana ini, dibantu aktivitas lainnya seperti pencatatan statistik dan analisis, pengawasan ekonomi negara anggota dan tuntutan kebijakan tertentu, DMI berupaya memperbaiki ekonomi negara-negara anggotanya. Tujuan organisasi ini tercantum dalam Pasal Persetujuannya, yaitu mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan.



Menurut DMI sendiri, organisasi ini berusaha mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi global dengan mengeluarkan kebijakan, saran, dan dana kepada anggota serta bekerja sama

dengan negara berkembang untuk membantu mereka mencapai kestabilan ekonomi makro dan mengurangi tingkat kemiskinan. Alasannya adalah pasar modal swasta internasional tidak sempurna dan banyak negara yang tidak mampu mengakses pasar keuangan. Ketidaktersempurnaan pasar dan pendanaan neraca pembayaran menjadi alasan pendanaan resmi. Tanpa pendanaan resmi, negara tersebut akan menerapkan kebijakan ekonomi yang buruk demi menutupi ketidakseimbangan neraca pembayarannya. DMI menyediakan berbagai sumber alternatif dalam masalah keuangan.

BAB III. SMART CITY

Istilah Kota pintar alias smart city mendadak seksi. Konsep tata kota dan masyarakat serba canggih ini mulai dicanangkan di banyak kota di dunia seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dengan prinsip membangun kemudahan pelayanan, peningkatan rasa aman, dan transparansi anggaran, smart city menjadi semacam indikator baru yang dapat menentukan sebuah kota layak dikatakan maju atau tidak dalam kacamata masyarakat modern.

Tidak mudah bagi sebuah kota bisa menyandang predikat sebagai smart city. Ada banyak ragam syarat dan prasyarat yang mesti dipenuhi. Sebuah lembaga konsultan global, Price Waterhouse Cooper (PWC) misalnya melalui laman resminya memaparkan ada lima kriteria keterwujudan predikat smart city pada sebuah kota, antara lain: memiliki sistem transportasi terintegrasi yang melayani multi-moda (dari pejalan kaki, mobil pribadi, sampai kendaraan umum seperti bus dan Mass Rapid Transit atau MRT), memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan rasa keamanan warganya, melakukan manajemen lingkungan yang efektif, termasuk menangani limbah dan pengelolaan energi, memiliki sentra inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kolaborasi sektor pemerintah, swasta, dan academia, serta mampu memberikan layanan e-government seperti layanan kartu penduduk dan surat ijin mengemudi secara online.

Lain lagi dengan kriteria yang dimunculkan oleh sebuah perusahaan komputer global asal Amerika Serikat, International

Business Machines Corporation (IBM). Dalam kacamata mereka, sedikitnya ada enam target yang mesti dipenuhi dalam mewujudkan impian sebagai kota pintar, yakni masyarakat penghuni kota, lingkungan, prasarana, ekonomi, mobilitas, serta konsep smart living. Di Indonesia sendiri, kriteria smart city juga pernah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR) Basuki Hadimoeljono. Dia mengatakan paling tidak terdapat delapan acuan utama yang bisa memperkokoh gagasan smart city, yaitu smart development planning, smart green open space, smart transportation, smart waste management, smart water management, smart building, dan smart energy.

Dengan serius mengusahakan tercapainya berbagai macam indikator, kriteria dan fokus sasaran yang ada, beberapa kota di belahan dunia pada akhirnya berhasil mengantarkan mereka sebagai contoh penerapan gagasan kota pintar.

Misalnya pada tahun 2015 lalu, The IESE Business School meluncurkan sebuah index yang disebut Cities in Motion Index (CIMI). CIMI merupakan index peringkat smart city di seluruh dunia berdasarkan kriteria teknologi, ekonomi, manajemen publik dan kemampuan untuk menarik bakat dari seluruh dunia. Dalam membuat index, IESE mengirim peneliti ke sebanyak 135 kota di 55 negara. Dengan menggunakan 50 indikator, terpilih sebanyak 20 kota pintar dengan 10 teratasnya adalah Tokyo, London, New York, Zurich, Paris, Geneva, Basel, Osaka, Seoul dan Oslo.

Sementara IBM memunculkan dua kota andalan smart city dengan dua fokus percontohan berbeda. Yakni Copenhagen, Denmark sebagai kota yang berhasil memfokuskan diri dalam bidang lingkungan. Dan Seoul, Korea Selatan sebagai kota yang memiliki fokus pada pelayanan publik di bidang teknologi informasi.

A. Tujuan

Smart City (kota cerdas) adalah sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi internet untuk segala dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Tujuan dari Smart City adalah untuk

mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

B. Pengertian

Smart city adalah area perkotaan yang memanfaatkan berbagai jenis sensor Internet of Things (IoT) untuk mengumpulkan dan mengelola data. Data tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengelola aset dan kepentingan masyarakat.

Kota Pintar adalah area perkotaan yang memanfaatkan berbagai jenis sensor Internet of Things (IoT) untuk mengumpulkan dan mengelola data. Data tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengelola aset dan kepentingan masyarakat.

Secara sederhananya, konsep kota pintar adalah kota yang yang terintegrasi dengan teknologi dalam tata kelola sehari-harinya. Tujuan dari dibuatnya konsep kota pintar ini ialah untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep kota pintar ini kini digadang-gadangkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Secara konsep dan gambaran, kota pintar ini memang cukup menarik. Namun ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya.

Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya.

Smart city merupakan sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota, yang didukung oleh kombinasi yang pintar (smart) dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart city diharapkan mampu memberikan dampak

positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berikut definisi dan pengertian smart city dari beberapa sumber buku:

- Menurut Caragliu, Del Bo dan Nijkamp (2009), smart city adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
- Menurut Pratama (2014), smart city merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya.
- Menurut Cohen (2014), smart city adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.
- Menurut Muliarto (2015), smart city adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT, yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni.

C. Karakteristik Smart City

Menurut Hao, Lei dan Yan (2012), terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri-ciri smart city, yaitu:

1. Interkoneksi antara bagian perkotaan, smart city menggabungkan antara communication network, internet, sensor dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang, dengan demikian interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud.

2. Integrasi sistem informasi perkotaan, hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen.
3. Manajemen perkotaan dan kerjasama layanan, interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik.
4. Aplikasi ICT (Information and Communication Technology) terbaru, smart city teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan dan orang-orang untuk membuat inovasi, gerakan pembangunan perkotaan.

D. Fungsi

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa konsep kota pintar ini dibuat untuk menciptakan aktivitas sehari-hari yang lebih efektif dan efisien. Hal ini tentunya diperlukan mengingat pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin pesat.

Berikut ada beberapa fungsi dari penerapan kota pintar yang perlu diketahui.

1. Lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan data
Data yang terhimpun dari perangkat IoT memungkinkan pemerintah untuk mengakses sejumlah informasi yang sebelumnya tak tersedia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi bahan pertimbangan serta pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Mengurangi kerusakan lingkungan
Dengan teknologi IoT, pemerintah dapat menerapkan sensor kualitas udara yang mampu menyajikan data dengan lengkap. Seperti pelacakan waktu, cuaca, udara, serta identifikasi polusi, dan analisis data yang berisi simpulan atau upaya atas tindakan yang akan ditempuh.

Dengan demikian, maka kualitas udara di sebuah *smart city* bisa terkontrol dan terjaga kestabilannya. Jadi, kerusakan lingkungan pun dapat turut dicegah.

3. Memberikan rasa aman

Konsep *smart city* diharapkan dapat membuat masyarakat lebih aman karena teknologi yang digunakan sudah cukup canggih. Misalnya, penerapan *Intelligent Video Analytics* (IVA) untuk bantu mengurangi aktivitas kriminal. Teknologi tersebut dapat menangkap data seperti plat motor hingga pengenalan wajah dengan cepat. Ketika *smart city* diterapkan, maka peralatan berbasis teknologi akan sangat membantu dalam mengurangi tindak kriminal.

E. Indikator dan Cara Menciptakan Smart City

Mewujudkan *smart city* tentu tidak mudah, khususnya untuk Indonesia sendiri. Untuk mencapainya, Indonesia harus menerapkan setidaknya enam indikator kota pintar. Berikut enam indikator *smart city* menurut *Beesmart City*, perusahaan penyedia solusi perkiraan asal Jerman.

1. Smart Economy

Penerapan *smart economy* merupakan satu syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan kota pintar. Salah satu contoh dari *smart economy* yakni mendorong perkembangan ekonomi melalui industri kreatif dan digital. Harapan, dengan adanya teknologi digital, banyak peluang usaha baru yang muncul dan dapat menjadi solusi efektif untuk masalah perkotaan. Walau demikian, solusi tersebut tidak hanya berhenti pada industri kreatif saja. Namun juga keseluruhan iklim bisnis lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk menarik daya tarik kota dan investor.

2. Smart Environment

Smart Environment atau lingkungan pintar juga menjadi hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan *smart city*. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya yakni dengan menerapkan *waste management*, *water management*, serta energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, di sinilah

peran pemerintah benar-benar dibutuhkan. Walau tentunya tidak lepas juga dari dukungan dan peran masyarakat. Salah satu hal yang bisa masyarakat umum lakukan untuk mendorong program ini yakni dengan melakukan daur ulang sampah atau mengurangi penggunaan plastik.

3. Smart Government

Guna mewujudkan kota pintar, maka pemerintah harus memfasilitasi segala perubahan dan perkembangan dengan baik. Misalnya, mendorong perkembangan UKM dan industri kreatif. Dengan hal ini, harapannya masyarakat bisa percaya dan pemerintah pun lebih transparan terhadap segala wewenang dan perubahan kebijakannya.

4. Smart Living

Smart living bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Cara mewujudkannya bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti memberikan informasi dan fasilitas kesehatan yang layak serta mengurangi penyebaran berita bohong.

5. Smart Mobility

Sesuai dengan namanya, *smart mobility* berfokus pada peningkatan saran dan kualitas transportasi masyarakat. Sebagai contohnya yakni adanya MRT dan LRT di Jakarta yang dipandang sebagai solusi untuk mengurangi macet. Walau demikian, permasalahan setiap daerah dan kota berbeda-beda. Jadi, solusi atau pengembangan transportasinya pun mesti disesuaikan dengan keadaan.

6. Smart People

Kelima indikator di atas tidak ada terwujud tanpa adanya *smart people*. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dan masyarakat umum dapat bekerjasama untuk mewujudkan kota pintar yang diidam-idamkan. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung Indonesia supaya lebih maju.

F. Kota yang Menerapkan Smart City di Dunia

1. New York, Amerika Serikat



IESE Business School mengeluarkan hasil riset IESE Cities in Motion Index 2017. Dari daftar yang dirilis dua tahun lalu, terungkap bahwa ada beberapa kota di dunia yang unggul dalam beberapa aspek kehidupan dan lingkungan bagi warganya sehingga sukses mendulang titel sebagai kota paling pintar di dunia. Istilah kota pintar menggambarkan kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi dampak lingkungan dan konsumsi energi. New York mendapatkan poin 100 alias sempurna, sebagai salah satu kota pintar di dunia. Apalagi, kota New York memang sudah mempersiapkan diri menjadi kota pintar sejak 2009 dengan kerjasama dengan IBM untuk membuka Business Analytic Solution Center. Melalui pusat analisis ini, warga setempat bisa dengan leluasa mengambil langkah-langkah strategis dalam urusan bisnis. Selain persoalan bisnis, New York juga memberikan jaminan terhadap keamanan dan kenyamanan penduduknya. Masih atas bantuan IBM, warga kota terhubung secara otomatis dengan tim pencegah kebakaran dan kelompok tanggap darurat. Bahkan, dalam urusan yang lebih spesifik, New York juga membantu identifikasi klaim asuransi yang dianggap mencurigakan dan disinyalir akan merugikan warganya.

2. Helsinki, Finlandia



Bukan cuma sebagai kota paling bahagia di dunia, Helsinki juga merupakan destinasi wisata yang paling aman di dunia. Selain itu, Helsinki juga sudah mengembangkan teknologi untuk menyelamatkan lingkungan, membuat wisata kuliner yang sustainable, dan menghadirkan kendaraan self-driving. Selama bertahun-tahun, Helsinki selalu masuk dalam daftar 10 kota paling layak huni di dunia. Saat ini Helsinki tengah mengembangkan strategi kota sampai tahun 2021 untuk mencapai target sebagai “the most functional city in the world”. Pendidikan, digitalisasi, start up, riset, dan inovasi, merupakan fokus Pemerintah Finlandia di kota tersebut. Helsinki tengah berfokus pada pengembangan smart energy system, penanganan sampah, dan smart mobility program yang terdigitalisasi dan terkoneksi.

3. Denmark



Source: hotels.com

Kota Aarhus di Denmark malah menjadi kota yang kini dikenal sebagai ibu kota Eropa di bidang budaya sekaligus smart city. Aarhus merupakan kota yang cocok bagi para pecinta kuliner karena memiliki banyak pasar makanan yang bisa dikunjungi. Selain itu, Aarhus juga dilengkapi dengan perpustakaan futuristik dan aneka hotel bertema kreatif. Rencananya, Aarhus juga akan menetapkan kota mereka sebagai kota bebas emisi karbon di tahun 2030 nanti.

4. Tallinn, Estonia



Ibu kota salah satu negara pecahan Uni Soviet, Estonia ini merupakan salah satu kota di dunia yang memiliki teknologi maju. Di kota ini, akses terhadap internet dianggap sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Contoh penerapan smart city di kota Tallinn, adalah menerapkan pemilu secara online, dan memiliki kecepatan jaringan internet 5G baik untuk warga lokal dan turis. Selain canggih, Tallinn juga punya banyak bangunan futuristik yang berpadu dengan bangunan lawasnya yang makin menarik untuk dikunjungi.

5. Seoul, Korea Selatan

Seoul masih terus berupaya sebagai kota cerdas berbasis pelayanan publik melalui teknologi informasi. Di kota Seoul terdapat infrastruktur kabel optik terpanjang yang menghubungkan antar rumah untuk menopang akses internet tercepat dan termurah di dunia. Setidaknya, untuk koneksi 10 Mbps, warga hanya dikenakan sekitar

US\$20. Fasilitas ini pada akhirnya mendorong Korea Selatan sebagai negara dengan penetrasi internet terbesar di dunia.



Di bidang transportasi publik, smart city di Seoul memiliki prinsip menyajikan kemudahan dan kenyamanan secara total kepada para penggunanya. Di setiap stasiun Subway dipasang fasilitas Digital View. Seperti halnya alat komunikasi sekelas ponsel, perangkat ini memberikan keleluasaan bagi para pengguna untuk melakukan panggilan domestik secara gratis. Melalui paket perangkat Digital View, warga Seoul juga mendapatkan segenap kemudahan dalam bidang pelayanan publik. Dengan bentuk layar lebar dan menggunakan operasi sentuhan jari, perangkat ini menyajikan akses pembayaran umum, pajak, daftar film bioskop, kupon gratis, informasi cuaca dan aneka fitur lainnya.

6. Jakarta

Smart City Lounge yang dipakai di Ibu Kota jadi pusat control dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik dan masalah lain di ibukota.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta bikin akses layanan publik dengan memanfaatkan aplikasi e-Uji Emisi yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup, aplikasi JakEvo milik Dinas PM dan PTSP, atau ada juga aplikasi TijeKu yang disediakan Transjakarta untuk bikin perjalanan kamu lebih mudah.

Ada juga platform Cepat Respon Masyarakat yang terdiri dari kanal pengaduan resmi yang dipakai masyarakat dan aplikasi Citizen

Relations Management yang dipakai oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti laporan. Maka dari itu puluhan ribu permasalahan di Jakarta dapat tertangani dengan efektif dan efisien tiap bulannya.

Kota Jakarta juga memanfaatkan beberapa aplikasi *Internet of Things* (IoT) demi mewujudkan mimpi menjadi sebuah *smart city*. Berikut adalah lima penerapan IoT yang menjadi andalan Jakarta Smart City di tahun 2016.

1. *Jakarta One Card*. Sebuah “kartu pintar” yang bisa berfungsi sebagai e-KTP, alat pembayaran ketika berbelanja, serta kartu BPJS.
2. *City Surveillance System*. Akan ada sekitar 6.000 CCTV yang terpasang di seluruh kota Jakarta untuk memantau lalu lintas dan kerumunan orang.
3. *Dump Truck Tracker*. Memasang sensor GPS di setiap truk pengangkut sampah milik pemerintah, agar posisi mereka bisa dipantau selama 24 jam.
4. *Heavy Equipment Tracker*. Alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan dipasang sensor khusus. Selain untuk mengetahui lokasi mereka, sensor tersebut juga bisa digunakan untuk memantau kapan mereka harus menjalani perawatan rutin dan penggantian suku cadang.
5. *Smart Street Lighting System*. Demi menghemat pemakaian listrik yang tinggi, 90.000 lampu yang ada di DKI Jakarta akan diganti dengan sistem ini agar nantinya bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa memberikan notifikasi apabila sudah harus diganti.

G. Pengertian Global

Kata global berasal dari akar kata “*Globe*” yang berarti bola dunia. Global dapat dimaknai sebagai suatu cakupan menyeluruh yang sifatnya mendunia. Kata global senantiasa menjadi dasar dari adanya globalisasi yang berarti proses mendunia. Globalisasi merujuk pada proses integrasi secara ekonomi, sosial, kebijakan-kebijakan di berbagai negara, dan aksi-aksi politik antarnegara (Pamungkas, 2017). Kata global memiliki empat ruang lingkup, yaitu tidak ada lagi satu

negara yang menonjol dalam setiap model hubungan politik dan kerja sama dalam bidang lain antarnegara, munculnya kekuatan ekonomi dan teknologi informasi dari hasil hubungan antarnegara tersebut yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, terdapat konsekuensi keterbukaan (*openness*), persaingan (*competition*), dan efisiensi dalam segala hal, serta tidak menutup kemungkinan dapat memicu permasalahan transnasional yang hanya dapat dipecahkan melalui hubungan internasional.

Dari kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pangan global adalah kondisi kebutuhan makanan dan minuman (pangan) yang cakupannya menyeluruh (seluruh dunia) dan/atau melibatkan kapabilitas setiap negara. Isu pangan global adalah segala bentuk problematika fenomena atau kebijakan berkaitan dengan kondisi pangan internasional. Apabila terdapat masalah ketersediaan pangan di suatu negara yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat negara bersangkutan hingga memengaruhi negara lain, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai permasalahan pangan global.

Saat ini hampir di setiap negara pernah mengalami krisis pada bidang tertentu, baik bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Krisis tersebut memberikan implikasi terhadap ketahanan pangan dalam negeri negara bersangkutan. Sebagai contoh, krisis moneter di Indonesia pada akhir masa Orde Baru tahun 1998 memberikan merupakan pengaruh dari krisis global yang juga terjadi di negara lain, seperti Malaysia dan Thailand. Permasalahan ini kemudian dikeluhkan masyarakat karena ternyata memberikan implikasi besar terhadap keberlangsungan arus pangan di seluruh daerah di Indonesia. Harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak tinggi, berbagai macam usaha yang dijalankan masyarakat terpaksa gulung tikar, pembangunan tersendat dengan utang luar negeri yang terlampau tinggi, sektor perbankan menjadi *collapse* karena masyarakat hanya berpikiran bagaimana agar hari esok masih bisa makan, hingga arus peredaran uang di masyarakat rendah menjadi problematika rutinitas saat itu. Contoh lainnya yaitu munculnya istilah *supermarket* global. Revolusi *supermarket* global yang merambah tidak saja di kota Jakarta, tetapi kota-kota lain di luar Jawa (Sawit,

2014). Istilah supermarket global mengindikasikan bahwa produk-produk yang dipasarkan tidak hanya produk dalam negeri, tetapi juga produk hasil ekspansi negara lain. Hal membuat tren supermarket global ini menjadi isu pangan global yaitu apabila keberadaannya dapat membunuh industri lokal.

Dengan demikian, isu-isu pangan global hendaknya ditangani secara global pula mengingat permasalahan terkait menyangkut hajat hidup masyarakat dunia. Kondisi ini kemudian menuntut para pemangku kepentingan di setiap negara agar tidak bertindak sepihak untuk keuntungan negaranya sendiri, tetapi tetap berorientasi pada keadilan dengan tujuan utama penyelesaian masalah. Untuk dapat bertahan dari berbagai macam permasalahan pangan global, dibutuhkan konsep ketahanan pangan bagi setiap negara. Berikut dijelaskan mengenai ketahanan pangan dalam negeri.

H. Konsep Ketahanan Pangan Dalam Negeri

Sejak terselenggaranya *Conference of Food and Agriculture* tahun 1943 yang mencanangkan konsep “*secure, adequate and suitable supply of food for everyone*”, paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan (Hestina, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kata “dalam negeri” memberikan pengertian bahwa pemerintah bersama masyarakat berupaya untuk mempertahankan kedaulatan pangan negaranya melalui potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah.

Memperkuat ketahanan pangan merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar dengan berlandaskan asas kebermanfaatannya, adil, merata, dan berkelanjutan. Sebagai wujud implementasinya sampai pada tingkat perseorangan, pemerintah memiliki kebebasan untuk melakukan kontruksi atas kebijakan pangan secara mandiri dengan memperhatikan indikator-indikator tertentu. Di

sisi lain, para pelaku usaha di bidang pangan diberikan kebebasan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan kecapabilitas dan ketersediaan sumber dayanya. Dalam pelaksanaannya, upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat seyogianya mengutamakan produksi dalam negeri dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai jati diri bangsa. Selain itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa produksi dalam negeri merupakan ujung tombak kekuatan ekonomi bangsa.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri perlu memerhatikan tiga hal berikut.

- 1) Ketersediaan pangan atas dasar optimalisasi eksploitasi sumber daya lokal. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tropis yang dilewati garis Khatulistiwa dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari sumber daya alam terbarukan hingga sumber daya alam tidak terbarukan sebenarnya menjadi keunggulan bagi bangsa ini untuk dapat membuktikan kemampuan ekspansinya pada perdagangan internasional (*global trade*) dan menunjukkan eksistensinya di hadapan negara-negara maju. Namun, penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia Indonesia yang masih kalah dengan negara-negara Utara membuat negara ini sulit melaksanakan revolusi pembangunan. Terkadang ada pula kasus sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten mampu menghasilkan suatu karya baru tetapi tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga yang bersangkutan kemudian mempresentasikan penemuannya kepada bangsa lain dan akhirnya mendapatkan pengakuan serta penghargaan dari pemerintah negara lain. Jadi, untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dikolaborasikan dengan keberadaan sumber daya lokal yang beragam untuk menghasilkan aneka produk pangan berkualitas yang tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar internasional. Ketersediaan pangan dapat direalisasikan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri.

- 2) Keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan pangan yang melimpah tetapi tidak diimbangi dengan prinsip keterjangkauan adalah “setali tiga uang”. Prinsip keterjangkauan ini dapat berupa keterjangkauan fisik (berupa kemudahan akses menuju lokasi pangan) dan keterjangkauan ekonomi (tingkat harga dan inflasi yang memengaruhi daya beli). Aksesibilitas yang baik dan stabilitas ekonomi sangat diperlukan dalam kaitannya dengan pemenuhan pangan kepada masyarakat. Keterjangkauan juga dapat diupayakan melalui stabilisasi pasokan pangan dan harga pangan yang termasuk kebutuhan pokok.
- 3) Pemanfaatan pangan dan/atau konsumsi pangan secara terarah. Terarah maksudnya adalah konsumsi pangan dilakukan atas dasar satu tujuan utama, yaitu pemenuhan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Eksploitasi sumber daya untuk konsumsi pangan yang tidak terencana dapat mengindikasikan adanya pemborosan pangan. Pemborosan ini kemudian secara langsung akan mengarah pada kelangkaan pangan (*scarcity*) yang berkorelasi dengan peningkatan harga pangan di pasaran. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan pangan sehingga konsumsi pangan dapat lebih terarah dan optimal. Pemanfaatan konsumsi pangan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemenuhan asupan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan bangsa. Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan, dan budaya masyarakat (Nainggolan, 2011).

Indonesia telah mencanangkan sistem ketahanan pangan yang komprehensif. Sistem ini terdiri dari empat sub-sistem, yaitu: (i) seluruh penduduk terpenuhi kebutuhannya dalam hal jumlah dan kualitas, (ii) penyebaran jatah pangan secara merata ke seluruh daerah, (iii) kecukupan konsumsi pangan

oleh masyarakat dengan asupan gizi yang seimbang, serta (iv) status gizi masyarakat menjadi indikator utama. Dengan demikian, aplikasi sistem dan prinsip ketahanan pangan terhadap masyarakat tidak hanya menyangkut kegiatan-kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) di lingkungan makro (nasional dan regional) tetapi juga bertanggung jawab atas aspek mikro (ketahanan pangan rumah tangga) terutama bagi anak dan ibu hamil dalam rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual ketahanan pangan mencakup keseluruhan aspek, tetap pada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan inefisiensi terutama pada aspek mikro. Oleh karena itu, Agar aspek mikro tidak terkesan dianaktirikan, maka istilah gizi penting untuk dilekatkan dalam ketahanan pangan.

Konsep ketahanan pangan dalam arti sempit meninjau sistem ketahanan pangan dari aspek *input* yaitu bagaimana pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat melakukan produksi dan penyediaan pangan. Ketersediaan pangan yang melimpah tidak selalu mencirikan suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara dengan masyarakat makmur dan sejahtera. Konsep ketahanan pangan dalam arti luas meninjau output (hasil akhir) yaitu menciptakan masyarakat yang merdeka, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, sasaran pertama *Millenium Development Goals* (MGDs) bukanlah tercapainya produksi atau penyediaan pangan, tetapi menurunkan kemiskinan dan kelaparan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. MDGs menggunakan pendekatan dampak bukan masukan (Hestina, 2011).

Apa perbedaan ketahanan pangan dengan swasembada pangan? Ketahanan pangan mengutamakan kapabilitas sistem pangan dalam pemenuhan pangan bergizi untuk sehat dan produktif untuk akses individu, sedangkan swasembada pangan lebih mengarah pada upaya peningkatan ketersediaan pangan di seluruh wilayah. Ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan dan mengeksport komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barang-barang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional. (Hestina, 2011).

Namun, sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, seharusnya kedua hal tersebut sudah dapat dicapai.

Ketahanan pangan di suatu negara menjadi tantangan tersendiri bagi, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketersediaan pangan sangat ditentukan oleh potensi sumber daya di wilayah terkait. Potensi ini kemudian ditentukan oleh kondusivitas iklim. Hal-hal penghambat seperti bencana alam menjadi musuh utama dalam upaya mempertahankan kelangsungan sistem pangan.

I. Korelasi antara Keberadaan Isu Pangan Global dengan Ketahanan Pangan Indonesia

Persoalan global yang sedang hadapi saat ini adalah bonus demografi yang kemudian memicu rawan pangan dan gizi dari 854 juta menjadi 1,2 milyar menurut perkiraan terakhir Badan Pangan dan Pertanian (FAO), dan sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang, terutama di region Asia-Pasifik. Kemajuan sangat sulit direalisasikan dalam hal penurunan jumlah maupun prevalensi kemiskinan dan rawan pangan global seperti yang ditargetkan tahun 2015 pada KTT Pangan Roma maupun pada *Mellenial Development Goals* (MDGs) (Nainggolan, 2011). Meningkatnya jumlah penduduk rawan pangan dan gizi adalah akibat peningkatan harga bahan bakar fosil memicu harga pangan membumbung tinggi yang menyulitkan akses ekonomi kaum miskin terhadap pangan. Tingginya harga energi berdampak langsung pada kegiatan produksi pangan melalui kenaikan biaya *input* semisal pupuk dan transportasi serta biaya output berupa distribusi pangan untuk menunjang keterjangkauan ke seluruh daerah.

Isu pangan global yang saat ini masih menjadi persoalan serius bagi setiap negara adalah sebagai berikut.

- 1) Prediksi jumlah penduduk dunia pada tahun 2050 adalah sebesar 9,5 milyar. Guna membebaskan 9 milyar manusia dari kelaparan, produksi pangan harus dilpatgandakan. Pertumbuhan penduduk saat ini didominasi oleh negara-negara belahan Selatan dan terjadi di perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan produktivitas pedesaan untuk eksploitasi sumber daya alam yang optimal dan tidak dapat dipungkiri bahwa upaya ini memerlukan investasi yang tidak sedikit;

- 2) Populasi petani yang semakin menipis membuat setiap upaya untuk ekspansi produksi, pembukaan areal pertanian baru merupakan keniscayaan dengan tetapi memerhatikan kelangsungan ekosistem;
- 3) Perubahan iklim global menjadi tantangan besar. Masalah ini merupakan salah satu pemegang kelangsungan ketahanan pangan dunia.
- 4) Kenaikan harga BBM menambah tantangan penyediaan pangan global. Kenaikan harga BBM berarti pertanian semakin penting untuk menghasilkan bioenergi. Saat ini harga BBM telah kembali di atas US \$ 100/barrel yang berpotensi mengakibatkan krisis pangan seperti tahun 2008. Potensi pasar bioenergi sangat besar, sehingga bisa mengubah sistem pasar pertanian ke depan (Nainggolan, 2011).

Masyarakat pedesaan pada umumnya akan lebih menderita. Jumlah mereka dua kali lebih besar dari masyarakat miskin perkotaan. Lebih dari 2 milyar manusia berpendapatan di bawah US\$ 2/hari (Nainggolan, 2011). Saat ini 1,2 milyar umat manusia menderita rawan pangan. Kelaparan dan kurang gizi merupakan penyebab kematian lebih 3,5 juta anak per tahun. Diperkirakan biaya pangan yang tinggi akan memperlambat penurunan kemiskinan global selama 7 tahun. Berarti target pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015 menurunkan prevalensi kelaparan dan kemiskinan global tidak akan tercapai.

Ini merupakan persoalan global yang memerlukan solusi efektif efisien mengingat situasi genting ini selalu menjadi momok bagi masyarakat dunia, terutama bagi penduduk miskin di negara-negara berkembang. Solusi yang mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial menjadi upaya yang harus dicari bentuk realisasinya. Sangat diperlukan mobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi di daerah-daerah pedesaan dimana mayoritas orang miskin dan rawan pangan bermukim. Sudah menjadi kenyataan bahwa hambatan utama peningkatan produktivitas pertanian adalah kurangnya investasi di bidang pertanian. Padahal investasi di pertanian dan

pedesaan inilah yang menjadi mesin penggerak pembangunan masa depan.

Kondisi di atas merupakan bagian dari isu-isu pangan global yang saat ini masih dirasakan masyarakat dunia. Lalu, bagaimana dengan kondisi ketahanan pangan dalam negeri Indonesia sebagai salah satu bagian dari sistem pangan dunia? Pembangunan ketahanan pangan dalam negeri menuju kemandirian pangan diarahkan untuk menopang kekuatan ekonomi domestik sehingga mampu menyediakan pangan yang cukup secara berkelanjutan bagi seluruh penduduk, utamanya dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau dari waktu ke waktu (Nainggolan, 2011). Dengan jumlah penduduk yang mencapai 275 juta jiwa pada pertengahan tahun 2022 (Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, BPS) menjadi kode bahwa kebutuhan pangan dalam jumlah yang tidak sedikit menjadi pekerjaan rumah nasional. Berbagai permasalahan yang memengaruhi ketercapaian ketahanan pangan dalam negeri terbagi menjadi 3 (tiga) subsistem, antara lain:

1) Ketersediaan Pangan

Laju peningkatan kebutuhan pangan, untuk beberapa komoditas, lebih cepat dari laju peningkatan produksi. Di samping produktivitas tanaman di tingkat petani pada berbagai komoditas pangan relatif stagnan, juga disebabkan terbatasnya kapasitas produksi. Stagnasi produktivitas antara lain disebabkan oleh lambatnya penemuan dan pemasyarakatan teknologi inovasi, serta rendahnya insentif finansial untuk menerapkan teknologi secara optimal.

2) Distribusi Pangan

Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dan dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antarwilayah dan antarmusim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh wilayah konsumen sepanjang waktu. Pada banyak daerah kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran

distribusi masih terbatas, sehingga sering terjadi ketidakstabilan pasokan dan harga pangan, yang berdampak pada gangguan ketahanan pangan di wilayah bersangkutan. Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar, banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi, tingginya biaya angkutan dibandingkan negara lain, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan. Hingga saat ini prasarana distribusi darat dan antar pulau untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen di tanah air belum memadai, sehingga terdapat wilayah-wilayah terpencil yang masih mengalami keterbatasan pasokan pangan pada waktu-waktu tertentu. Bukan hanya itu, biaya pemasaran (marketing cost) juga akan meningkat. Tantangan yang harus diantisipasi adalah, mengembangkan prasarana dan sarana distribusi pangan dan hasil pertanian ke seluruh wilayah agar tidak terjadi kelangkaan pasokan. Selain infrastruktur jalan, permasalahan lain adalah kelembagaan pemasaran hasilhasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen, sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Di samping itu, masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai kelompok-kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil di antara para pelakunya.

3) Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat. Permasalahan dan tantangan yang perlu

diantisipasi dan diatasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang adalah: (i) besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah; (ii) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi; dan (iii) masih dominannya konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras.

Apabila diamati secara menyeluruh, berbagai bentuk isu pangan global yang saat ini menjadi momok bagi masyarakat dunia terutama penduduk miskin di negara-negara berkembang memiliki korelasi dengan permasalahan ketahanan pangan dalam negeri yang menyangkut ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Pertama, jumlah penduduk dunia yang diperkirakan mencapai 9,5 milyar pada tahun 2050 mengindikasikan kebutuhan pangan masa depan akan meningkat. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana upaya pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk dapat melakukan optimalisasi terhadap ketersediaan pangan dalam negeri agar kebutuhan pangan dalam negeri dapat terpenuhi seiring dengan bonus demografi yang terjadi.

Kedua, dalam hal produksi pangan, penggunaan teknologi informasi saat ini telah berupaya menggantikan peran petani untuk dapat melakukan produksi pangan seperti *indoor farming technology* (pertanian di dalam gedung) yang sudah diterapkan oleh Jepang. Kasus ini menyangkut pada kualitas produk yang dihasilkan lebih baik daripada pertanian model manual. Namun, pada kenyataannya kapabilitas sumber daya manusia Indonesia dan negara-negara berkembang lain belum seperti sumber daya manusia Jepang sehingga berujung pada ketimpangan ekonomi dan sosial.

Ketiga, perubahan iklim global secara drastis kemudian memengaruhi aspek ketersediaan pangan. Sebagai contoh, memasuki iklim pancaroba di Indonesia sangat sulit bagi petani untuk menentukan waktu produksi yang tepat. Alhasil, potensi kegagalan produksi semakin besar karena kesalahan prediksi (*forecasting*) atas waktu tanam. Hal ini kemudian memengaruhi pasokan pangan dalam negeri.

Keempat, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpengaruh terhadap distribusi dan konsumsi pangan dalam negeri. Dewasa ini pemerintah meluncurkan kebijakan kenaikan harga BBM untuk menekan subsidi yang nantinya dialokasikan menjadi bantuan sosial masyarakat sebagai dampak dari merebaknya Pandemi Covid-19 walaupun harga minyak dunia sedang turun di bawah 100\$/barel. Ternyata, kebijakan tersebut banyak direspon negatif oleh masyarakat awam karena mereka lebih memikirkan dampak langsung atas distribusi dan konsumsi pangan. Kenaikan harga BBM ini secara langsung menyebabkan kenaikan biaya distribusi bahan pangan dari satu daerah ke daerah lain yang kemudian berimplikasi pada kenaikan harga pada jenis pangan bersangkutan.

BAB IV. PERDAGANGAN BEBAS DAN REGULASI KAWASAN

Persoalan pengaturan perdagangan menjadi perhatian publik pada awal Januari 2010, karena pada bulan tersebut perjanjian perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN mulai berlaku. Pemberlakuan perjanjian ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat. Kalangan masyarakat industri mengkritik pelaksanaan ACFTA tersebut, karena telah memberikan tekanan besar terhadap perkembangan industri dalam negeri. Hal tersebut tampak dari kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI yang membidangi perdagangan dengan Asosiasi Industri. Setidaknya disebutkan dari RDPU tersebut bahwa sektor industri elektronik, tekstil, produk tekstil (TPT) serta furniture terkena dampak ACFTA. Tekanan terhadap industri dalam negeri tersebut tampak dari tingkat penjualan produk industri dalam negeri yang terus menurun dibanding produk industri Cina.

Fenomena tersebut, mendorong kalangan industri untuk meminta kepada DPR dan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan perdagangan yang mampu mengatasi persoalan turunnya penjualan produk industri dalam negeri untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Secara jangka pendek kalangan industri menginginkan adanya kebijakan yang dapat mengatasi tekanan terhadap produk dalam negeri dan jangka panjang kebijakan yang bisa mengembangkan industri dalam negeri agar mampu tumbuh dan bersaing sesuai dengan perniagaan World Trade Organization (WTO). Tuntutan

tersebut didukung oleh kondisi tahun 2009, dimana terjadi penurunan ekspor 15% dan impor 25% dibanding kinerja perdagangan tahun 2008. Dinamika pasar dari perdagangan bebas memberikan tantangan terhadap: eksistensi negara dalam hal ini peran pemerintah. Tantangan tersebut terutama pada kebijakan perdagangan yang merespon perkembangan tersebut, baik terhadap perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini kebijakan perdagangan masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang usianya cukup lama seperti UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perdagangan. Selain itu, aktivitas perdagangan juga mengandalkan UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Persaingan Usaha. Instrumen perundang-undangan tersebut tentunya tidak memadai untuk menghadapi aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini dalam merespon perjanjian internasional yang melandasi lahirnya WTO dan AFTA.

Di sisi lainnya, ada dua Undang-Undang (UU) yang terkait dengan aktivitas perdagangan telah lahir lebih dahulu dibanding UU perdagangan sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan instrumen hukum yang mengatur subjek perdagangan yaitu konsumen dan produsen. Dalam UU perlindungan konsumen hubungan antara produsen dan konsumen diatur dalam konteks melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan perdagangan, sedangkan Ahli Monopoli mengatur hubungan diantara produsen dalam penguasaan pasar, persoalannya aspek-aspek yang diatur dalam kedua UU tersebut hanya bagian kecil dari aspek perdagangan. Persoalan perizinan, pencatatan, pengawasan, distribusi hingga zonasi pasar tidak memiliki aturan yang cukup bagi membangun kegiatan perdagangan yang terlindungi secara hukum. Sehingga dimata Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), regulasi yang ada belum cukup memberikan kepastian berusaha dalam menghadapi persaingan.

Kekhawatiran tersebut secara khusus berkorelasi dengan peran pemerintah dalam mengelola perdagangan. Peran pemerintah sendiri dalam konteks perdagangan antar negara merupakan pihak yang mewakili negara dalam pengikatan perjanjian internasional mengenai perdagangan bebas. Artinya secara sadar pemerintah telah melihat pengintegrasian pasar dalam negeri dalam sistem perdagangan bebas memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan pasar dan perkembangan industri dalam negeri. Persoalannya apakah pemerintah masih memiliki kewenangan yang besar dalam sistem perdagangan bebas tersebut. Bagaimana pemerintah menjawab kekhawatiran yang tumbuh di kalangan pelaku usaha terhadap akibat-akibat yang muncul dari perdagangan bebas. Apabila masih ada peran apakah yang perlu dijalankan oleh pemerintah untuk menata perdagangan agar tercipta iklim usaha yang sehat dan aktivitas perdagangan dapat menjadi sumber kesejahteraan rakyatnya? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu aspek penting dari pengaturan peran pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan yang sedang disiapkan oleh pemerintah.

Regulasi Kawasan memiliki makna dan nilai yang strategis baik secara lokal maupun secara nasional. Berdasarkan kebijakan yang ada, prinsip utama pembetukan suatu kawasan adalah mengutamakan kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud bisa berdasarkan sudut kepentingan politik dan pertahanan keamanan, ekonomi, budaya; dan lingkungan hidup. Seiring dengan pembentukan kawasan khusus, maka beberapa persoalan sering mengemuka, pertama mekanisme pembentukan kawasan khusus, kedua peran pemerintah dan pemerintah daerah di kawasan khusus. Peran keduanya menjadi penting karena bagaimanapun juga, otonomi yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tentang pemerintahan daerah berbasis desentralisasi teritorial dan bukan desentralisasi fungsional.

Perekonomian dunia saat ini tidak bisa terlepas dari globalisasi. Secara sederhana, fenomena ini disebut "revolusi ekonomi" yang menghasilkan dunia tanpa batas (borderless) sehingga sebagian kecil dari dampaknya adalah dengan adanya pasar bebas. Pasar bebas adalah perdagangan antara individu-individu atau

perusahaan- perusahaan di negara yang berbeda tanpa adanya hambatan. Tulisan ini, menganalisis tentang pemasaran global di era globalisasi dalam perspektif ekonomi syariah. Yang mana pemasaran global bermula dari adanya suatu kebijakan perdagangan secara teoritis rasionalisasi akan menguntungkan negara berkembang sepanjang waktu, namun banyaknya perbedaan mengenai pemasaran global tidak membuat para ahli ekonomi berganti pikiran mengenai pemasaran global yang bisa membuat perekonomian yang makmur. Juga bagaimana IMF (International Monetary Fund), BTO (Build, Transfer, Operate) dan Bank Dunia menanggapi semua ini dalam neo-liberalismenya, dan yang lebih penting lagi mengenai pandangan Islam terhadap pemasaran global ini.

Pemasaran global bermula di Inggris dan lebih luas lagi di Eropa yang telah memicu adanya pemasaran global yang lebih besar di tingkat global hingga tahun ini. Jangkauan pemasaran global telah meluas, negara maju dan berkembang tak terkecuali sama-sama merasakan dampak pemasaran global tersebut. Berita tentang penerimaan dan penolakan adanya pemasaran global telah diberitakan. Banyaknya pembicaraan mengenai pemasaran global yang sekarang diterapkan di seluruh dunia dan pembahasannya dalam negara maju ataupun berkembang serta dampak positif dan negatifnya, maka dari itu semua kami tertarik untuk membahas tentang pasar bebas (free trade) yang berkaitan dengan pandangan Islam.

Banyaknya pembicaraan mengenai pemasaran global yang sekarang diterapkan di seluruh dunia dan pembahasannya dalam negara maju ataupun berkembang serta dampak positif dan negatifnya, maka dari itu semua kami tertarik untuk membahas tentang pasar bebas (free trade) yang berkaitan dengan pandangan Islam. Perdagangan bebas yang mensyaratkan adanya kebebasan arus barang, jasa maupun investasi antar negara anggota yang ditandai dengan pengurangan bahkan penghapusan hambatan tarif maupun non tarif menimbulkan pertanyaan apakah era perdagangan bebas tersebut akan paralel dengan kepentingan lingkungan terutama di negara-negara berkembang yang mengalami gap ekonomi yang tajam terhadap negara-negara maju.

Aspek lingkungan sebagai pembatas perdagangan

internasional muncul dengan berkembangnya standarisasi perdagangan yang memuat aspek penilaian tentang manajemen lingkungan. Standar-standar internasional dengan maksud seperti ini antara lain Ecolabelling dan ISO 14000. Sertifikasi Ecolabelling difokuskan pada produk-produk kayu yang berasal dari sumber daya hutan, sedangkan sertifikasi ISO 14000 akan mencakup semua produk yang diperdagangkan secara internasional. Tampaknya dalam perkembangannya upaya negara maju untuk mensosialisasikan syarat-syarat lingkungan dalam kancah perdagangan internasional terhadap negara berkembang tidak hanya pada produk-produk kehutanan saja tetapi pada semua produk.

Komitmen terhadap lingkungan dilakukan oleh Indonesia dengan meratifikasi dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan KTT Bumi ke dalam perundangundangan nasionalnya. Dalam hal ini Indonesia memiliki alat maupun hukum seperti UU Lingkungan Hidup, peraturan AMDAL bagi proyek yang akan didirikan, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pengolahan Lingkungan), memiliki kementerian lingkungan hidup, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi gencarnya tuntutan negara-negara maju mengenai standarisasi baik standar manajemen mutu maupun yang berkaitan dengan lingkungan, Indonesia telah mengadopsi sejumlah standar-standar Internasional. Misalnya Dewan standar Nasional (DSN), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan untuk mensiasati ketentuan ekolabel, Indonesia telah mendirikan Lembaga Ekolabel Indonesia.

Sebagai warga dunia yang telah meratifikasi KTT Bumi dan sekaligus menjadi anggota WTO, kekuatiran negara berkembang akan diberlakukannya standarisasi lingkungan juga menjadi kekhawatiran Indonesia. Misalnya ketentuan tentang ecolabelling/wood certification programme, yaitu suatu kebijakan yang mensyaratkan agar negara-negara tropis memberi tanda atas komoditi kayu mereka yang menjamin bahwa produk tersebut dihasilkan tanpa J merusak lingkungan. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara eksportir kayu tropis terbesar hal ini menjadi ancaman. Bagi pengusaha-pengusaha kayu Indonesia ketentuan ini memmanifestasikan ketakutan negara-negara maju yang khawatir

tersaingi dalam arena perdagangan internasional khususnya dalam komoditi kayu.

Mengglobalisasinya isu lingkungan telah menempatkan negara berkembang pada posisi dilematis antara mendahulukan kepentingan ekonominya atau kepentingan lingkungannya. Disatu sisi komitmen mereka terhadap lingkungan tampak dengan meratifikasi dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan Konferensi Stockholm maupun hasil KTT Bumi ke dalam perundang-undangan nasionalnya. Disisi lain negara maju dengan dalih consumer's driven membuat suatu kondisi yang mengharuskan negara pengekspor mengikuti aturan main yang telah dibuatnya, dalam hal ini adalah menciptakan standardisasi lingkungan.

Negara-negara maju mengumumkan bahwa ia semakin meningkatkan kesadaran lingkungannya. Segala komoditas perdagangan ditetapkan dengan persyaratan ketat sehingga menjadi Environmental Friendly Product.¹ Sejumlah negara-negara berkembang tampaknya mulai kewalahan karena pada umumnya tidak menguasai inovasi teknologi dan manajemen lingkungan. Dibelakang isu lingkungan sebenarnya negara-negara maju telah menyiapkan inovasi teknologi dan manajemen lingkungan. Ini berarti negara-negara berkembang harus membeli teknologi dan sistem dari negara maju untuk memenuhi persyaratan teknis agar komoditasnya dapat masuk dalam perdagangan dunia.

Fenomena Green Consumerism serta kebutuhan akan Cleaner Production menghadirkan kompetisi para produsen dalam menarik simpati dari konsumen dengan jargon "moralitas", dengan kata lain tetap berpostur kapitalis tapi bagaimana tetap menggiring dalam nuansa "hijau" atau disebut sebagai green capitalism. Standar-standar lingkungan internasional sengaja diterapkan untuk membatasi arus perdagangan internasional, khususnya untuk membatasi perdagangan dari negara-negara berkembang yang berbasis pada sumberdaya alam. Dalam kasus ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana perspektif postmodernisme (meminjam analisis Foucault) menjelaskan penerapan standardisasi lingkungan sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan kapitalis. Munculnya kesadaran akan pentingnya kualitas lingkungan hidup secara global mendorong

pendekatan untuk menginternalisasikan biaya lingkungan kedalam perhitungan ekonomi.

Pendekatan ini mensyaratkan dimasukkannya biaya kerusakan lingkungan dalam biaya sebuah proses produksi. Pada hakekatnya pihak yang menyebabkan degradasi lingkungan bertanggungjawab atas biaya sosial dan biaya ekonomi yang timbul. Prinsip ini dikenal dengan *polluter pays principle*. Munculnya kepedulian yang menonjol di negara-negara maju untuk menegatkan standarisasi lingkungan telah menimbulkan *cost* tambahan dalam proses produksi, terutama untuk jenis industri yang berbasis pada SDA maupun yang berpotensi untuk mengeluarkan polusi (seperti industri zat kimia, industri logam). Untuk mengurangi beban biaya tambahan tersebut beberapa industri ‘terbang’ ke negara-negara berkembang yang memiliki standar lingkungan yang lebih longgar, sehingga industri-industri tersebut tidak terlalu repot memikirkan teknologi pengolah limbah misalnya yang relatif lebih mahal.

Kecenderungan di atas mendapat momentum ketika pada tahun 1980-an sejumlah industri pestisida negara maju mengalir ke negara berkembang. Padahal zat-zat pestisida yang dimaksud sudah lama dilarang pemakaiannya di negara-negara maju karena berbahaya bagi kesehatan. Industri tersebut mendapat sambutan hangat di negara berkembang, waktu itu negara berkembang sedang gencar-gencarnya dengan revolusi hijau.

Perdagangan bebas Indonesia berada pada wilayah Indonesia bagian barat yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura yaitu kota Batam. Batam merupakan sebuah provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan yang pesat. Perdagangan bebas di Batam diberlakukan sejak tahun 2007, Batam ditetapkan sebagai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang diberlakukan dalam jangka waktu 70 tahun. Peraturan perdagangan bebas Batam di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kawasan yang menerapkan perdagangan bebas menjadikan barang-barang luar negeri mendapatkan kebebasan masuk dan tidak dikenakan tarif pajak impor maupun ekspor dan menjadikan barang-barang tersebut mempunyai harga yang lebih ringan atau murah.

Diberlakukannya penerapan perdagangan bebas tersebut menjadikan batam sebagai kota bisnis yang sangat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha tertentu dimana Batam ini merupakan Kawasan Pabean. Dalam Undang-Undang Nomor 46 tahun 2007 menjelaskan bahwa, Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Banyak barang-barang yang berasal dari luar negeri. Seperti televisi, handphone, sepeda motor, mobil, pakaian, mesin dan lain-lain karena negara kita belum cukup mempunyai SDM dan teknologi yang canggih, sehingga harus saling menukar barang produksi dengan cara bekerjasama dengan bangsa asing. Realisasinya yaitu dengan cara menerapkan perekonomian terbuka agar terjalin perdagangan internasional yang saling menguntungkan dan melengkapi kekurangan dalam negeri. Dengan diterapkannya perekonomian terbuka di Indonesia memunculkan liberalisme perdagangan. Hal ini disebabkan karena adanya penghapusan kebijakan perdagangan yang pada umumnya akan meningkatkan jumlah perdagangan internasional.

Bagi bangsa Indonesia hal tersebut menyumbang pengaruh yang besar dan cukup signifikan, karena dengan keputusan tersebut keterkaitan pasar domestik dengan pasar dunia semakin sulit untuk dihindarkan. Selain itu, permasalahan semakin rumit karena Indonesia dihadapkan kepada dua pilihan antara memilih merespon situasi pasar dunia atau tetap mempertahankan kestabilan perekonomian negara dengan mematikan arus perdagangan bebas internasional. Apabila terjadi pola perubahan kebijakan perdagangan dimana terjadi campur tangan pemerintah sudah ditiadakan. Hal ini akan menyebabkan maraknya penyeludupan barang dengan tanpa mematuhi aturan pemerintah.

Perdagangan bebas lahir sejak era awal lahirnya kapitalis sebagai pola yang ada terhadap negara-negara maju. Negara berkembang diposisikan pada posisi yang terampas kemakmurannya. Beberapa fakta menunjukkan sebagai berikut: perdagangan bebas akan menjamin harga pangan murah dan mencegah kelaparan. Kenyataannya harga pangan semakin meningkat. Perdagangan

internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia antara lain karena tidak mempunyai peralatan produksi atau kondisi ekonomis, baik secara kualitas maupun kuantitas dan akibat dari ketidaksamaan kondisi ekonomis tersebut, maka terjadilah perbedaan biaya produksi suatu barang. Dengan adanya perdagangan ini, maka dapat memperoleh sejumlah barang dengan harga yang lebih murah daripada menghasilkan sendiri barang tersebut di dalam negeri.

Betapa pentingnya perlindungan atas kepentingan nasional dengan kerangka melindungi pelaku usaha nasional, seperti perlindungan pembangunan ekonomi dan bagaimana menentukan arah pembangunan ekonomi nasional melalui perangkat hukum nasional yang responsif baik secara internal maupun eksternal. Perdebatan mengenai konsep perdagangan bebas, tidak sedikit mendapat penolakan dan kecaman yang tentunya didasari oleh argumentasi yang meyakinkan. Bagaimana sikap negara maju yang memperjuangkan keunggulan-keunggulan sistem perdagangan bebas. Sesungguhnya negara maju telah melakukan praktik yang tidak adil, yaitu menekan adanya perdagangan bebas baik barang maupun jasa serta modal, namun di sisi lain mereka melakukan perlindungan. Negara maju mendoktrinasikan konsep perdagangan bebas dengan segala konsekuensi positif walaupun sering merugikan negara berkembang. Dalam upaya mensukseskan agenda tersebut, negara maju melalui pertemuan Doha, telah diajukan tiga isu utama yaitu investasi internasional, persaingan internasional dan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara internasional.

Globalisasi yang mewarnai sistem internasional saat ini telah menciptakan interaksi yang intensif antara Indonesia dan masyarakat internasional bukan hanya antar pemerintah tetapi juga antar individu. Globalisasi di bidang perdagangan serta lahirnya pasar bebas telah melahirkan pula pola hubungan yang lintas batas yang mengharuskan adanya pemahaman terhadap hukum perjanjian internasional.¹⁶ Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wilayah Batam serta pulau-pulau kecil di sekitarnya telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam Kawasan untuk menetapkan kawasan dimaksud menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Batam telah menjadi Free Trade Zone (FTZ) dan berada di wilayah depan perbatasan negara yang bersaing secara head-to-head dengan FTZ di negara lain. Jadi FTZ Batam harus memiliki fleksibilitas dan kecepatan proses produksi yang tinggi. Hal ini hanya bisa dilakukan jika FTZ Batam mempunyai kemandirian dalam mengatur dirinya dengan tetap mengakomodir kepentingan domestik seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya.

Dalam sistem pemerintahan daerah yang kita anut, terdapat pengaturan tentang 'wilayah'. Hal tersebut tertian dalam pengertian tentang daerah, wilayah dan kawasan. Daerah pun dibagi menjadi daerah otonom dan daerah administrative. Otonomi yang dilakukan oleh daerah otonom diklasifikasi dalam wujud wujud otonomi 'umum' dan otonomi khusus. Dalam pelaksanaan daerah otonomi tersebut terselip satu 'wilayah' yang dibentuk oleh pemerintah (pusat) yang lembaga dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri.

Dalam konteks pembentukan kawasan khusus di Indonesia, Maksun (2007) mengatakan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri memberikan sinyal kuat bahwa jenis pemerintahan yang dibungkus nomenklatur kawasan khusus didasari oleh konsep 'delegasi' yang bermaksud menciptakan lembaga parastatal. Gagasan otonomi khusus sesudah reformasi diakomodasikan juga dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 18 b ayat (1) mengamanatkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Jadi setelah diamandemen, pengakuan Negara tidak hanya terbatas pada "daerah-daerah yang bersifat istimewa", tetapi juga bagi daerah yang bersifat khusus.

Sejumlah aspek yang terkandung UUD 1945 memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Pasal 18 yang berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, harus dijabarkan dalam berbagai undang-undang.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut undang-undang tersebut di atas, Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/ atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya pada pasal 360 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/ kota. sementara di ayat (2) dinyatakan bahwa kawasan khusus meliputi Kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, Kawasan hutan lindung, Kawasan hutan konservasi, Kawasan taman laut, Kawasan buru, Kawasan ekonomi khusus, Kawasan berikat, Kawasan angkatan perang, Kawasan industry, Kawasan purbakala, Kawasan cagar alam, Kawasan cagar budaya, dan Kawasan otorita.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan pula bahwa Kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. (penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 kawasan khusus termasuk bandara, pelabuhan dan kawasan sepanjang rel kereta api). Untuk membentuk kawasan khusus, pemerintah pusat mengikut sertakan daerah yang bersangkutan. Dalam kawasan khusus, setiap daerah mempunyai kewenangan daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah, kecuali kewenangan daerah tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Daerah dapat mengusulkan

pembentukan kawasan khusus kepada pemerintah. Model kelembagaan yang diajukan oleh Dawud (2003) pun hingga saat ini belum diterapkan karena belum memadainya peraturan perundangan yang ada untuk mendukung kelancaran penerapan model kelembagaan tersebut. Untuk itu, dapat dipahami bahwa baik aspek fisik maupun aspek kelembagaan merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dengan matang dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu melalui pembentukan kawasan khusus.

Sebagai contoh kota Batam, yang di dalamnya merupakan lokus kawasan ekonomi dan pada saat yang sama merupakan daerah otonom. Dalam keadaan seperti itu terdapat dualisme pemerintahan dalam pengelolaan kotanya. Dualisme pemerintahan ini telah dimulai pada tahun 1983 ketika Batam ditetapkan sebagai kota administratif dan kemudian sepenuhnya menjadi kota otonom pada tahun 1999.

Meski pengelolaan Kawasan Batam sejak Tahun 1983 telah melibatkan Pemerintah Kota Administratif, namun Badan Otorita Batam tetap memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengelola Pulau Batam dalam konteks menarik investor ke Pulau Batam.

Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan sebagian fungsi pemerintahan, (a) pelayanan masyarakat, pertanahan, pemberian izin dan sebagainya; (b) fungsi pembangunan, dimana Badan Pengelola Batam mengelola sarana dan prasarana seperti bandara, pelabuhan laut, listrik, air minum, rumah sakit dan lain- lain.

Pembagian urusan dalam kebijakan desentralisasi lebih dominan bersifat kewilayahan (territorial). Urusan tersebut telah dibagi habis pada setiap level pemerintahan, mulai dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. desentralisasi fungsional yang diwujudkan melalui kawasan khusus dilaksanakan secara bersamaan dengan desentralisasi territorial. Namun tidak jelasnya pengaturan desentralisasi fungsional di konstitusi menjadi kendala tersendiri dalam implementasinya. Pada saat yang sama setiap kekhususan desentralisasi diatur pada level Undang- Undang hingga Peraturan Presiden yang seringkali bertentangan dengan pengaturan yang terdapat pada Undang- Undang tentang pemerintah daerah.

Penyelenggaraan ataupun pengelolaan demikian pula kewenangan pemerintah daerah terhadap kawasan khusus berbagai

hambatan dan kendala. Adanya aturan yang cenderung tidak sejalan antara aturan Perundang-Undangan tentang pemerintahan daerah dengan aturan Perundang-Undangan sektor. Ditambah lagi belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur kewenangan pemerintah daerah terhadap kawasan khusus. Padasisi lain, pengaturan hubungan, kewenangan antarapemerintahdaerahdenganpengelola ataupun administrator kawasan khusus sangat penting, karena bagaimanapun juga posisi kawasan khusus berada di dalam kawasan otonom yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Memperhatikan realitas yang ada, pengelolaan dan administrasi kawasan khusus perlu memperoleh perhatian yang besar dari pemerintah pada setiap level pemerintahan. Hal ini disebabkan pada kawasan-kawasan khusus tersebut terdapat potensi pengembangan ekonomi, sosial budaya yang bermanfaat bukan saja bagian kawasan tersebut namun juga bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Pengaturan tentang kewenangan pengelola dan administrator perlu diperjelas, demikian pula kewenangan pemerintah daerah terhadap kawasan khusus perlu pula diatur secara tegas. Hal lainnya ialah partisipasi masyarakat perlu pula dinormakan di dalam peraturan pemerintah ini.

Untuk mencegah terjadinya konflik, baik konflik kewenangan maupun konflik lainnya, maka perlu pembagian kewenangan yang tegas serta rinci antara pihak Pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/ kota dan pengelola kawasan khusus di dalam penetapan jenis sarana dan prasarana umum yang menjadi kewajiban masing- masing; (4) konflik dalam Pengendalian lingkungan hidup; (5) Konflik dalam Pelayanan pertanahan; dan (6) Konflik dalam Pelayanan administrasi penanaman modal.

Daya saing internasional dipengaruhi oleh tingkat standar lingkungan yang dianut. Untuk memungkinkan suatu persaingan yang fair maka negara-negara yang bersaing mengadopsi standar yang tinggi atau sama-sama mengadopsi standar yang rendah. Padahal perbedaan standar adalah sesuatu yang alamiah. Pemaksaan nilai tadi ke negara lain yang dilakukan atas dasar kekuasaan 'state power' yang dimiliki. Cara-cara yang lazim adalah dengan menerapkan bentuk-bentuk sanksi

perdagangan. Dalam istilah lain fenomena seperti ini disebut sebagai 'ecoimperialism' yakni bentuk penjajahan yang ditempuh melalui cara-cara yang terkait dengan lingkungan. Dalam era perdagangan bebas, lingkungan menjadi salah satu faktor untuk membatasi lalu lintas perdagangan antarnegara. Secara normatif pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup global dari efek-efek negatif yang muncul dari derasnya arus perdagangan dunia. Pengkaitan lingkungan dengan strategi perdagangan terutama digunakan oleh negara-negara maju. Dari sudut pandang negara-negara berkembang kebijakan seperti itu dipandang lebih sebagai politik dagang negara-negara maju untuk dengan sengaja membatasi akses perdagangan internasional dari negara-negara berkembang terutama jenis komoditi yang berbasis SDA dan padat karya. Pada jenis komoditi ini sebenarnya negara-negara berkembang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara maju. Sehingga muncul istilah *disguised non tarifftrade barrier*, dimana lingkungan dilihat sebagai hambatan non tarif yang tersamar dalam perdagangan

Mau tidak mau negara berkembang mengadopsi standar-standar tersebut, walaupun terkadang tidak cukup memadai untuk diterapkan dalam berbagai produknya, keadaan ini semacam 'dipaksakan oleh negara maju untuk tetap melanggengkan kekuasaannya dengan pengetahuan yaitu teknologi dan sistem manajemen lingkungan yang mereka miliki. Disatu sisi negara maju tetap bisa melanggengkan kapitalnya, disisi lain masalah lingkungan juga bisa diatasi dengan 'berlindung' dibalik standardisasi lingkungan internasional.

Pada prinsipnya adanya kolaborasi maka akan menguntungkan semua pihak dalam hal sumber daya, karena memunculkan potensi untuk saling berbagi dan memanfaatkan sumberdaya terbatas yang dimiliki, inilah yang disebut *capacity for Joinaction* sebagai salah satu dari elemen *collaborative dynamics*.

Jika dilihat dalam konteks regulasi sudah terjadi dinamika dalam pelaksanaannya. Undang-Undang secara tegas telah membedakan antara pembangunan yang menempatkan sebagai subyek pembangunan dan pembangunan perdesaan yang menjadi domain

pemerintah. Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan khusus tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Hal ini berkaca pada dinamika regulasi sebelumnya yang tidak mengatur secara tegas dan terperinci pembangunan desa maupun pembangunan kawasan perdesaan, sehingga membuat pelaksanaannya disamakan padahal dua konteks pembangunan ini memiliki substansi yang berbeda.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, UU menggunakan dua pendekatan, yaitu “Membangun” “Membangun” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Sebagai konsekwensinya, menyusun perencanaan pembangunan yang mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Kondisi empiris yang terjadi saat ini, membuka peluang pembangunan di desa lebih terbuka dan partisipatif yang saling menguntungkan. Dalam konteks Collaborative Governance peluang ini tentunya menjadi sejalan dengan terbukanya kesempatan pihak lain kedalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pembangunan desa, yang meliputi: tahapan perencanaan serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa melibatkan berbagai pihak yang berkompeten; Kedua, pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi: pengertian dan lingkup pembangunan kawasan perdesaan, serta peran dan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat; Ketiga sistem pembangunan kawasan perdesaan, yang meliputi: hak desa, kewajiban pemerintah dalam mengembangkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Desa) dan pengelolaan SIPD. Keempat, kerjasama desa, yang meliputi kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam pandangan pemerintah disebutkan bahwa pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, ditujukan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi kebijakan program-program pembangunan desa yang

terpusat dan bersifat seragam dengan pola “bantuan“ cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan mematkan konteks sosial yang beragam. Kekurangjelasan pengaturan kewenangan dan kedudukan keuangan antara Kabupaten/Kota dan Desa mengakibatkan desa belum ditempatkan sebagai entitas yang mengelola sendiri perencanaan pembangunannya. Perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan menjadi sebuah instrumen untuk merespon secara cepat, efisien dan efektif atas masalah dan kebutuhan yang berskala lokal.

Sedangkan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa melalui metode dan pendekatan pembangunan partisipatif. Ke depan diharapkan UU Desa dapat menjadikan desa sebagai subyek pembangunan yang mendasarkan pada perencanaan pembangunan yang berbasis potensi dan kearifan lokal.

Isu yang terkait dengan tata ruang, investasi, dan ekonomi politik juga harus diperhatikan dalam pembangunan kawasan perdesaan. Karena cakupan dan orientasi pembangunan perdesaan juga kecil dan sempit yakni mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa melalui metode dan pendekatan pembangunan partisipatif. Di sisi lain UU desa hanya berbicara tentang tata kelola dan relasi antara pemerintah, desa dan masyarakat, tetapi tidak berbicara tentang investasi masuk desa. Dinamika yang berkembang selama ini jelas mempengaruhi pembangunan kawasan perdesaan, oleh sebab itu melalui dimensi ini pemerintah diharapkan kembali mampu mengidentifikasi dan melakukan maping pembangunan kawasan pedesaan dengan membangun sebuah konsensus yang melibatkan unsur-unsur terkait dalam sebuah sistem kolaborasi.

BAB V. STRATEGI MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer setelah dikumandangkan oleh Komisi Brundtland di bawah pimpinan Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland yang bekerja sejak Oktober 1984 sampai dengan Maret 1987 dan melahirkan buku “Our Common Future” yang diterbitkan oleh World Commission on Environment and Development (WECD) pada tahun 1987 (Ismid Hadad, 2010). Selama abad 20 terjadi 2 (dua) revolusi terkait dengan peranan lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Revolusi pertama (1) antara 1960’s -1970’s saat munculnya paradigma bahwa terdapat konflik antara konsep pertumbuhan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan di mana setiap terjadi pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selalu dibarengi dengan eksploitasi sumberdaya alam dan terjadinya kerusakan lingkungan (Meadows, Donella dan Meadows, Nancy, 1972). Meadows dan Meadows yang tergabung dalam Kelompok Roma menulis buku mengenai “Batas-Batas Pertumbuhan”. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa kalau tidak ada pengurangan tingkat konsumsi dalam masyarakat kala itu, maka dalam waktu 100 tahun lagi dunia akan collaps, karena sumberdaya alam akan habis dan lingkungan mengalami pencemaran yang tinggi dan kerusakan yang sangat parah.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dimaknai sebagai pembangunan untuk masa kini dan yang tidak memerlukan kompromi

generasi yang akan datang muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland pada tahun 1987. Di saat itulah seolah-olah terjadi revolusi ke 2 (dua) di bidang pembangunan nasional yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu sama lain, sehingga suatu kesejahteraan yang sebenarnya dan diidam-idamkan akan sungguh dapat tercapai. Pembangunan ekonomi akan menciptakan kenaikan penghasilan nasional yang memberikan kemampuan suatu negara untuk memelihara lingkungannya agar tidak mengalami kerusakan; sebaliknya kondisi lingkungan yang baik akan tidak menyerap dana pembangunan tetapi justru mendukung atau menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.(Pearce and Warford, 1993).

Strategi untuk menyukseskan pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang, jika tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan. Hasil pembangunan konvensional antara lain pemerataan hasil-hasil pembangunan menjadi sangat timpang dengan 20 persen penduduk dunia di negara maju menguasai 80 persen pendapatan dunia dan 80 persen penduduk dunia (negara sedang berkembang) hanya menguasai 20 persen pendapatan dunia. Akibatnya pembangunan konvensional menjadi terhambat atau terkendala oleh kondisi sosial (kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan) dan menyusutnya cadangan sumberdaya alam (energi BBM fosil dan batubara yang tak terbarukan) serta memburuknya kualitas lingkungan akibat pencemaran udara, air, sungai dan danau, serta kekurangan air di musim kemarau dan banjir di musim hujan di banyak tempat di Indonesia maupun di negara-negara sedang berkembang lainnya dan juga di negara maju.

A. Strategi Meningkatkan Ekonomi Berwawasan Lingkungan

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ada landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yaitu yang tertuang pada Paragraf 8, pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikutip seperti di bawah ini. Paragraf 8 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mencakup antara lain Pasal 42, yang berisi ayat (1) yang berbunyi: “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.” Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: “Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya adalah “perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi” . Kemudian Pasal 43 menyatakan bahwa Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:

- a. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

B. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau

Sumberdaya alam merupakan sumber atau pusat dari bahan bahan penunjang kehidupan yang berasal dari alam. Berbagai sumberdaya alam yang ditemukan di suatu daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) atau di suatu negara (Nasional) dalam suatu waktu tertentu (biasanya satu tahun) yang menunjukkan cadangan fisik maupun dalam nilai moneter mulai dari cadangan awal, penambahan cadangan, pengurangan cadangan, dan cadangan akhir. Untuk negara-negara yang kaya akan sumberdaya alam dan lingkungan yang

indah permai seperti Indonesia, neraca sumberdaya alam ini sangatlah penting sebagai dasar bagi penyusunan rencana pembangunan. Pembangunan ekonomi Indonesia selama ini berbasis pada eksploitasi sumberdaya alam. Karena itu perencanaan pembangunan perlu memahami bagaimana kondisi cadangan sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah (Kabupaten, Kota, Provinsi). Sumberdaya alam dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (seperti minyak bumi, batu bara, sumberdaya mineral) dan sumberdaya alam yang dapat diperbarui (seperti air, hutan atau tumbuh-tumbuhan, ikan, hewan dan jasa-jasa lingkungan). Contoh jasa lingkungan adalah kemampuan hutan mengkonservasi tanah dan air, mencegah banjir, merosot karbon, tempat rekreasi dan sebagainya).

Pemerintah baik di pusat maupun di daerah perlu memiliki catatan dan pemetaan mengenai cadangan sumberdaya alam yang dimilikinya dan perubahan-perubahannya. Kemudian untuk perencanaan diperlukan analisis mengenai perkembangan cadangan sumberdaya alam dan perannya dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan pemetaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan dapat diketahui di mana suatu daerah sekarang berada apakah masih cukup memiliki cadangan sumberdaya alam atau sudah menipis, atau masih dapat dimanfaatkan sampai berapa lama lagi. Dengan demikian rencana pembangunan akan dapat tertata dengan rapi termasuk segala konsekuensinya.

Strategi pengelolaan sumberdaya alam dapat dimulai dengan mengidentifikasi ekosistem apa saja yang ditemukan di suatu daerah; kemudian dari masing-masing ekosistem diidentifikasi macam sumberdaya alam apa saja yang dapat dimanfaatkan dari setiap ekosistem tersebut. Selanjutnya dari masing-masing jenis sumberdaya alam dan fungsi lingkungan dikuantifikasi untuk mengetahui jumlah atau volume dari masing-masing sumberdaya alam yang bersangkutan, baik yang merupakan cadangan awal dan yang hilang karena dieksploitasi atau karena bencana alam. Setelah itu baru dievaluasi dengan nilai rupiah. Pemetaan sumberdaya alam dapat dilakukan untuk suatu tahun tertentu bagi suatu wilayah atau pada sebuah pulau yang belum diketahui keadaan dan jumlah sumberdaya

alam yang ada di dalamnya. Tetapi dapat pula neraca sumberdaya alam mencatat keberadaan sumberdaya alam sebagai akibat dari suatu kegiatan pembangunan.

Dengan mengetahui dampak suatu kegiatan dapat diketahui nilai biaya dan manfaat dari kegiatan tersebut, sehingga sangat berguna sebagai studi kelayakan. Sebenarnya studi kelayakan suatu kegiatan atau suatu proyek di suatu daerah atau di suatu negara dapat dipermudah setelah ada pemetaan sumberdaya alam dan lingkungan di daerah atau di negara yang bersangkutan. Disamping itu untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan, disyaratkan pula perlunya modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal, serta diperlukan pula sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi intinya jangan sampai sumberdaya alam habis dan lingkungan rusak tanpa peningkatan baik jumlah dan kualitas sumberdaya manusia maupun modal buatan manusia.

C. Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth) dan PDB/PDRB Hijau

Dengan semakin tingginya semangat untuk mempertahankan kualitas lingkungan yang baik, maka bermunculanlah berbagai istilah yang mengandung makna telah memasukkan dimensi lingkungan ke dalam usaha atau kegiatan tertentu seperti istilah green building, green financing, green banking, green growth dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa pertimbangan lingkungan hidup sudah dimasukkan dalam berbagai tindakan dan kebijakan. Pertumbuhan ekonomi hijau (green growth) juga diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan atau pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon (CO₂), karena CO₂ termasuk salah satu dari gas rumah kaca yang menyelimuti bumi yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Kalau kita semua menghendaki pertumbuhan ekonomi hijau atau dengan kata lain pertumbuhan

ekonomi berkelanjutan, maka alat ukur kinerja pembangunan yang tepat bukan PDB dan PDRB Konvensional atau Coklat, tetapi PDB dan PDRB Hijau seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; yaitu bahwa PDB dan PDRB yang sudah memperhitungkan dimensi lingkungan yang berupa deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan atau yang disebut PDB dan PDRB Hijau harus dikembangkan oleh setiap Pemerintahan baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat*. Jadi PDB Hijau = PDB Konvensional – Deplesi Sumberdaya Alam – Degradasi Lingkungan. Namun demikian sampai detik makalah ini ditulis praktik penyusunan PDB dan PDRB Hijau belum dilaksanakan secara formal berdasarkan Peraturan Pemerintah, walaupun beberapa Provinsi (Bali dan Jawa Barat) dan Kabupaten/Kota (Kabupaten Asmat, Kota Bekasi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi), telah mencoba menyusun PDRB Hijau dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing. Perlu diketahui bahwa tidak semua negara menyusun PDB Hijau, dan bahkan Bank Dunia menggunakan ukuran kemajuan ekonomi setiap neegara juga masih menggunakan Produk Nasional Bruto [(Gross National Product (GNP)], karena akan terdapat kesulitan dalam membandingkan tingkat kemajuan suatu negara dengan negara yang lain.

Oleh sebab itu pada saat PDB dan PDRB Hijau disusun, PDB dan PDRB Konvensional atau PDB dan PDB Coklat tidak dihilangkan atau diganti oleh PDB dan PDRB Hijau. PDB dan PDRB Hijau disusun sebagai pendamping dari PDB dan PDRB Konvensional, karena memang tidak semua daerah, khususnya kota, memiliki sumberdaya alam yang memadai. Walaupun demikian perlu diketahui juga bahwa kebanyakan kota di Indonesia tidak banyak memiliki sumberdaya alam, tetapi semua memiliki kondisi lingkungan yang dapat divalusi atau diberi nilai ekonomi, sehingga PDRB Hijau tetap dapat disusun untuk kota-kota di Indonesia. Kalau suatu kota memiliki banyak pabrik dan juga kegiatan perdagangan dan transportasi, akan tetap mengalami deplesi dan degradasi

sumberdaya air serta degradasi kualitas udara karena adanya pencemaran gas CO₂ dan gas CO₄ yang dapat datang dari kegiatan pertanian, tempat penimbunan sampah (TPA), maupun dari peternakan.

D. Strategi Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Lingkungan

Strategi mewujudkan masyarakat berwawasan lingkungan adalah pola kerja sama antar masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan sehingga mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat didalam pola tersebut. Pengelolaan lingkungan dengan melibatkan masyarakat dan memberi imbalan jasa pada masyarakat diterjemahkan dari kalimat “payment for environmental services” yang mencerminkan pola kerjasama antara masyarakat dan daerah. Misalnya masyarakat di daerah tengah dan hilir berkepentingan untuk mendapatkan manfaat dari lingkungan antara lain untuk kebutuhan mereka akan air. Pada umumnya air tersedia di daerah hulu dan mengalir ke daerah tengah dan hilir, sehingga ada dua kemungkinan bahwa daerah hulu menyediakan air bersih dan daerah tengah dan hilir mejadi daerah pemakai atau konsumen air yang berasal dari daerah hulu. Ada kemungkinan lain bahwa saat air hujan berlimpah di daerah hulu (saat hujan lebat) dan kalau tidak cukup ada vegetasi di daerah hulu, air hujan langsung mengalir ke sungai dan terus ke laut. Kalau daya tampung sungai atau parit di daerah hilir tidak memadai, maka akan terjadi

banjir dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit jumlahnya. Karena itu sebenarnya ada 2 (dua) hal penting mengenai hubungan hulu dan hilir. Kalau manajemen sumber daya air tidak dilaksanakan dengan baik di daerah hulu, maka pada musim penghujan dapat terjadi banjir di daerah hilir karena air selalu mengalir dari daerah hulu ke daerah hilir; dan sebaliknya pada musim kemarau dapat terjadi kekeringan di daerah hilir karena cadangan air di daerah hulu habis sebab tidak ada pasokan air dari curah hujan di musim kemarau dan air tidak disimpan karena kurangnya hutan atau pepohonan di daerah hulu pada waktu musim hujan.

Guna menghindari dua hal utama terkait dengan sumberdaya air tadi, maka mereka yang tinggal di daerah hulu sungai perlu dibantu oleh masyarakat yang tinggal di daerah hilir agar supaya mereka yang di daerah wsudi memelihara sumber air dan daerah penampungan air. Kalau masyarakat hulu, yang umumnya adalah petani yang penghasilannya pas-pasan, cenderung untuk menebang pohon yang dimiliki mereka pada saat ada kebutuhan finansial untuk membiayai keperluan sekolah anak-anak mereka atau saat diperlukan dana untuk menikahkan anak-anak mereka atau untuk keperluan sunat atau khitanan bagi anak-anak mereka.

Biaya kebutuhan dana untuk keperluan imbal jasa lingkungan berkisar antara maksimum sebesar nilai kerugian masyarakat hilir jika terkena bencana banjir atau terkena musibah kekurangan air bersih, atau kekurangan air untuk mengairi sawah petani di daerah hilir, dan nilai terendah adalah nilai kebutuhan msasyarakat hulu yang harus memelihara keberadaan hutan dan pepohonan serta memelihara sumber daya air agar tetap tersedia dan bersih adanya.

E. Strategi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Berbasis Sosial Ekonomi

Strategi meningkatkan kualitas lingkungan berbasis sosial ekonomi bisa dengan menerapkan “3P” (Polluters Pay Principle); yaitu konsep siapa saja yang mencemari lingkungan diwajibkan membayar ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan yang diciptakannya. Pencemaran dapat terjadi pada sumberdaya air baik di daerah tangkapan air, di sungai, di danau, maupun terhadap air tanah baik air permukaan ataupun tanah dalam. Sebenarnya masalah internalisasi biaya lingkungan sudah tercermin dalam perhitungan PDB dan PDRB Hijau yang memasukkan atau menginternalkan nilai deplesi dan nilai degradasi lingkungan yaitu dikurangkannya nilai deplesi dan degradasi lingkungan dari nilai PDB dan PDRB Coklat (Konvensional).

Cara menginternalkan nilai deplesi sumberdaya alam dan nilai degradasi lingkungan antara lain dengan mewajibkan para pemrakarsa kegiatan (seperti para produsen dan konsumen barang dan jasa) memikul beban pajak yang penerimaan dari pajak tersebut harus

digunakan untuk pemeliharaan atau pemulihan kualitas lingkungan (Pigouvian tax). Memang dengan pajak lingkungan tadi, produsen cenderung menggeserkan beban pajaknya kepada konsumen produk yang terkena pajak. Kemudian antara produsen dan konsumen akan terjadi pembagian beban pajak tergantung pada rasio elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran masing-masing.

Penggeseran beban pajak dari produsen kepada konsumen akan menaikkan harga produk, sehingga konsumen yang menggunakan produk tersebut akan turut memikul beban pajak. Karena yang mencemari lingkungan bukan hanya produsen yang memproduksi dengan menciptakan limbah padat dan limbah cair serta pencemaran udara karena CO₂ yang dilepaskan dalam proses produksi, tetapi konsumen yang menggunakan produk hasil produksi perusahaan tersebut juga turut membuang limbah ke lingkungan. Contoh paling mudah adalah produsen deterjen (sabun cuci bubuk) dan konsumen deterjen seperti perhotelan dan rumah tangga, mereka bersama-sama mencemari lingkungan. Kalau tidak dikenakan pajak lingkungan atau kewajiban memasang instalasi pengolahan limbah, seluruh masyarakat baik yang memanfaatkan deterjen maupun yang tidak memanfaatkannya turut memikul dampak produksi deterjen karena tanah, udara, dan air tercemari oleh produsen maupun konsumen deterjen. Sedangkan jika diwajibkan pada produsen agar mereka memasang instalasi pengolahan limbah (padat, cair dan udara), maka yang memikul beban pencemaran hanya mereka yang terlibat dalam produksi dan konsumsi deterjen, sedangkan mereka yang tidak mengkonsumsi deterjen akan menikmati tanah yang bebas pencemaran, air yang tetap bersih dan udara yang bersih tidak wajib membayar harga deterjen yang meningkat akibat penggeseran beban pajak lingkungan yang dikenakan kepada produsen.

Dengan memasukkan biaya produksi tidak langsung seperti nilai depleksi sumberdaya alam dan nilai degradasi lingkungan, maka perekonomian akan tetap berkembang dengan sejahtera walaupun seolah-olah tidak terdapat keuntungan atau manfaat dari semua kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi dalam perekonomian. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat atau perekonomian memperoleh “laba atau manfaat normal” (normal profit atau

normal benefit” karena harga yang terbentuk akibat penggeseran beban pajak sudah mencakup “biaya eksplisit” maupun” biaya implisit”, di mana biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh para produsen (BUMS, BUMN, maupun BUMD) dan biaya implisit adalah biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost seperti nilai deplesi sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan yang tidak pernah dilaporkan dalam Laporan PDB dan PDRB Konvensional.

F. Strategi Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran terbaik terhadap tingkat kesejahteraan hidup suatu negara. IPM merupakan komposit indeks yang terdiri dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks kesejahteraan. Indeks kesehatan diukur dengan harapan hidup penduduk waktu lahir, indeks pengetahuan diukur dengan kondisi melek huruf dan lama waktu menuntut ilmu secara formal, dan indeks kesejahteraan diukur dengan tingkat pendapatan hijau perkapita. Dengan demikian IPM sudah menginternalkan biaya eksternal yang memperhitungkan nilai deplesi atau kehilangan sumberdaya alam dan degradasi fungsi lingkungan. Dengan menggunakan IPM tercatat bahwa Ibukota Negara DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi (79,60), dan yang terendah dimiliki oleh Provinsi Papua (58,05), sedangkan Provinsi Jawa Tengah IPM nya setinggi 69,98

BAB VI. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Wikipedia, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas.

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun, istilah keberlanjutan (*sustainability*) baru muncul beberapa dekade lalu. Walau demikian, perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus (1798) mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi di masa kini maupun masa mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunan, yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi, dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria. Yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Senada dengan konsep di atas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya, *pertama*, pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam *irreplaceable*. *Kedua*, *safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan tetap baik bagi generasi mendatang. *Ketiga*, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antargenerasi. *Keempat*, mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*). *Kelima*, mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari

antargenerasi. *Keenam*, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi Fauzi (2004), setidaknya ada tiga alasan utama (faktor) mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu :

- (1) *Faktor pertama* menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memerhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, serta dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan serupa.
- (2) *Faktor kedua*, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.
- (3) *Faktor ketiga*, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).

Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi mendatang.

Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan wajar secara sosial dan kultural, menyebarkan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum.

Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi di tempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhannya dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang.

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana, tapi kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multiinterpretasi. Menurut Heal, (Fauzi, 2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi. *Pertama*, dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa mendatang. *Kedua*, dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Dari berbagai konsep yang ada terdapat rumusan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen perlu diperhatikan, yaitu pemerataan, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang.

1. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi dicapai dengan

keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep, relatif dan tidak secara langsung dapat diukur.

Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang, tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

3. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

4. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang

berbedadengan asumsi normal dalam prosedur *discounting*. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

B. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer setelah dikumandangkan oleh Komisi Brundtland di bawah pimpinan Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland yang bekerja sejak Oktober 1984 sampai dengan Maret 1987 dan melahirkan buku “Our Common Future” yang diterbitkan oleh World Commission on Environment and Development (WECD) pada tahun 1987 (Ismid Hadad, 2010).

Selama abad 20 terjadi 2 (dua) revolusi terkait dengan peranan lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Revolusi pertama (1) antara 1960's -1970's saat munculnya paradigma bahwa terdapat konflik antara konsep pertumbuhan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan di mana setiap terjadi pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selalu dibarengi dengan eksploitasi sumberdaya alam dan terjadinya kerusakan lingkungan (Meadows, Donella dan Meadows, Nancy, 1972). Meadows dan Meadows yang tergabung dalam Kelompok Roma menulis buku mengenai “Batas-Batas Pertumbuhan”. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa kalau tidak ada pengurangan tingkat konsumsi dalam masyarakat kala itu, maka dalam waktu 100 tahun lagi dunia akan collaps, karena sumberdaya alam akan habis dan lingkungan mengalami pencemaran yang tinggi dan kerusakan yang sangat parah.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dimaknai sebagai pembangunan untuk masa kini dan yang tidak memerlukan kompromi generasi yang akan datang muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland pada tahun 1987. Di saat itulah seolah-olah terjadi revolusi ke 2 (dua) di bidang pembangunan nasional yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat

bersinergi satu sama lain, sehingga suatu kesejahteraan yang sebenarnya dan diidam-idamkan akan sungguh dapat tercapai. Pembangunan ekonomi akan menciptakan kenaikan penghasilan nasional yang memberikan kemampuan suatu negara untuk memelihara lingkungannya agar tidak mengalami kerusakan; sebaliknya kondisi lingkungan yang baik akan tidak menyerap dana pembangunan tetapi justru mendukung atau menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.(Pearce and Warford, 1993).

C. Lingkup Pembangunan Berkelanjutan

Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan. Hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan. Pandangan ini sekarang diajarkan pada beberapa sekolah bisnis yang salah satunya dilakukan di *Center for Sustainable Global Enterprise at Cornell University*.

Divisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan mendaftar beberapa lingkup berikut ini sebagai bagian dari Pembangunan Berkelanjutan :

- Pertanian
- Atmosfer
- Keanekaragaman Hayati
- Bioteknologi
- Pengembangan Kapasitas
- Perubahan Iklim
- Pola Konsumsi dan Produksi
- Demografi
- Pengurusan dan Kekeringan
- Pengurangan dan Manajemen Bencana
- Pendidikan dan Kesadaran
- Energi
- Keuangan
- Hutan
- Air Minum

- Kesehatan
- Pemukiman
- Indikator
- Industri
- Informasi bagi Pembuatan keputusan dan Partisipasi
- Pembuatan Keputusan yang terintegrasi
- Hukum Internasional
- Kerja sama Internasional memberdayakan lingkungan
- Pengaturan Institusional
- Pemanfaatan lahan
- Kelompok Besar
- Gunung
- Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional
- Samudra dan Laut
- Kemiskinan
- Sanitasi
- Pengetahuan Alam
- Pulau kecil
- Wisata Berkelanjutan
- Teknologi
- Bahan Kimia Beracun
- Perdagangan dan Lingkungan
- Transport
- Limbah (Beracun)
- Limbah(Radio aktif)
- Limbah (Padat)
- Air

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, di mana pandangan yang luas berada di bawah naungannya. Konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekologi mendalam. Konsep yang berbeda juga menunjukkan tarik ulur yang kuat antara eko(lingkungan)sentrisme dan antropo(manusia)sentrisme. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya.

Selama sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa

yang mereka pahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan apa yang disebut dengan matrik dan indikator keberlanjutan.

D. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. **Economically viable:** pembangunan ekonomi yang dinamis. Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi. Dalam prosesnya, dilakukan pelestarian aset berupa pembangunan sumber daya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan secara tepat guna. Pembangunan berkelanjutan tetap memperhitungkan keadilan bagi masyarakat pada masa sekarang dan masa depan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Setiap keputusan dalam pembangunan harus mempertimbangkan aktivitas manusia yang dipandang sebagai penyebab perubahan lingkungan
2. **Socially-politically acceptable and culturally sensitive:** pembangunan yang secara sosial politik dapat diterima serta peka terhadap aspek-aspek budaya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan memberdayakan masyarakat sebagai organisasi sosial. Manusia dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan melalui perkembangan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan. Tujuan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan adalah memberikan motivasi terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di dalam masyarakat diciptakan rasa sadar akan peningkatan kemampuan sumber daya manusia sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi meningkat. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga bertujuan meningkatkan

penghargaan terhadap bentuk kelembagaan dan organisasi sosial masyarakat. Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu sistem pengendali terhadap proses pembangunan, pengembangan nilai-nilai masyarakat tradisional yang berlandaskan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat dengan cara berorganisasi.

3. *Environmental friendly*: ramah lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Kondisi lingkungan yang lestari dapat mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Pada masyarakat yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang tidak pasti, pembangunan akan sulit terlaksana. Selain itu, degradasi alam akan terjadi pada pembangunan ekonomi yang tidak membatasi penggunaan sumber daya alam secara wajar. Pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap lingkungan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari setiap kegiatan pembangunan.

E. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan juga berpegang teguh kepada beberapa prinsip tertentu. Berikut adalah lima prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan.

1. *Equity* (Pemerataan)

Pemerataan atau *equity* merupakan target utama dari pembangunan berkelanjutan karena diharapkan dapat mengecilkan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Selain itu, dengan berpegang pada prinsip pemerataan, semua anggota masyarakat mendapatkan kesempatan yang seimbang.

2. Ekonomi

Prinsip pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi memberikan fokus lebih pada peningkatan keterampilan pekerja yang meningkatkan daya saing. Meningkatnya daya saing dalam mendapatkan pekerjaan layak dan pendapatan yang lebih baik menimbulkan peningkatan kinerja infrastruktur dasar (properti, sistem air, dan sejenisnya) serta pada infrastruktur informasi.

3. Energi

Pemakaian energi harus dilakukan secara hemat untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menghemat energi, yaitu:

- Menggunakan energi yang dapat diperbaharui secara optimal
- Menghemat penggunaan sumber-sumber energi yang tersedia.
- Memprioritaskan pembangunan transportasi massal.

4. Ekologi

Ekologi atau lingkungan harus dilestarikan selama melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Agar pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan maksimal, maka kita dapat melakukan hal-hal seperti menggunakan lahan campuran, memastikan tetap ada ruang terbuka hijau, dan membuat sistem yang dapat membuat transportasi dan bangunan terintegrasi dengan baik.

5. *Engagement* (Peran Serta)

Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan partisipasi masyarakat luas dan pemerintah harus memfasilitasi hal ini. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat untuk

berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan menampung aspirasi publik.

Masyarakat harus berperan serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga turut berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat yang mampu menampung aspirasi dari masyarakat.

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian terpenting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan

Dalam teori pertumbuhan ekonomi dikenal faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau suatu negara antara lain jumlah penduduk dan tenaga kerja, modal atau kapital, sumber daya alam dan lingkungan, teknologi dan faktor sosial. Fokus kita dalam tulisan ini adalah peran sumber daya alam dan lingkungan dalam pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Kalau diamati secara teliti sumber daya alam dan lingkungan bukan merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan suatu negara. Kemajuan suatu negara biasa diukur dengan melihat tinggi rendahnya pendapatan per kapita penduduk di negara bersangkutan dan terbukti banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, tetapi justru merupakan negara yang maju dengan pendapatan perkapita yang tinggi, seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Korea;

sedangkan banyak negara yang sumber daya alamnya berlimpah masih merupakan negara yang terbelakang dengan pendapatan perkapita yang relatif rendah seperti Indonesia, India, Philipina, Vietnam, dan negara-negara Amerika Latin. Bahkan sudah ada artikel yang ditulis mengenai kutukan sumber daya alam (*natural resource curse*) atau dikenal juga dengan “the paradox of plenty” yang ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang yang kaya dengan sumber daya alam. Kondisi paradoks (*paradoxical situation*) menunjuk pada negara-negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya yang *non-renewable* justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan bahkan mengalami kemunduran. (Jeffrey A. Frankel, 2010)

Ada dua definisi tentang pembangunan berkelanjutan; yaitu pembangunan berkelanjutan dalam arti kuat (*strong definition*) dan berkelanjutan dalam arti lunak (*weak definition*). Berkelanjutan dalam arti kuat atau keras menghendaki agar nilai semua modal pembangunan; yaitu nilai modal manusia (*human capital*) ditambah nilai ekosistem sebagai modal alami (*natural capital*) ditambah lagi dengan modal buatan manusia (*human made capital*) tetap atau tidak mengalami penurunan. Sedangkan dalam arti lunak pembangunan berkelanjutan memungkinkan adanya substitusi di antara ketiga jenis modal pembangunan; utamanya nilai modal alami kalau berkurang dapat diimbangi dengan peningkatan nilai modal manusia dan modal buatan manusia. Sebagai contoh seandainya terjadi penurunan jumlah modal alami seperti minyak bumi dan batu bara yang selalu dieksploitasi atau diambil dari bumi kita, maka dikehendaki agar nilai modal manusia dan/atau nilai modal buatan manusia meningkat yang dibiayai dengan memanfaatkan modal alami yang diambil dari alam di daerah yang bersangkutan. Para ekonom lebih dapat menerima definisi pembangunan berkelanjutan dalam arti lunak atau lemah.

Di samping itu untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan, disyaratkan pula perlunya modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal, serta diperlukan pula sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan

lingkungan (Baca Ismid Hadad, 2010). Jadi intinya jangan sampai sumber daya alam habis dan lingkungan rusak tanpa peningkatan baik jumlah dan kualitas sumber daya manusia maupun modal buatan manusia. menurut Santoso Sastropoetra berpendapat bahwa: “Partisipasi adalah sebagai ketersediaan untuk membantu keberhasilannya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.” (Santoso Sastropoetra 1986 : 3)

Pengertian partisipasi dan partisipatif:

- Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
- Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu
- Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-pembangunan.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a) Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b) Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk

memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

- c) Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.
- e) Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian. Menurut Keith Davis (*lihat tahun berapa*), partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam pencapaian tujuan & ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Jenis-Jenis Dan Bentuk-Bentuk Partisipasi Antara Lain:

1. Partisipasi dengan pemikiran (*Psychological Partisipation*)
2. Partisipasi dengan tenaga (*Physical Partisipation*)
3. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (*aktif Partisipation*)
4. Partisipasi dengan keahlian (*With Skill Partisipation*)
5. Bentuk konsultasi
6. Bentuk sumbangan spontan berupa barang/jasa
7. Bentuk sumbangan dari luar dalam bentuk Proyek yang bersifat berdikari
8. Bentuk proyek yang dibiayai oleh komite setelah ada *konsensus* dalam rapat komunitas

F. Pengertian Pembangunan

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” Dengan

demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna :

- bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir;
 - pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus;
 - pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan;
 - pembangunan mengarah kepada modernitas;
 - modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.”²² Hal senada disampaikan oleh Tjokrominoto yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai “citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut :
1. pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
 2. pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
 3. pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (value free).
 4. pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai meta-diciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, the ideologi of developmentalism. (5) pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (value loaded) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
 5. pembangunan menjadi culture specific, situation specific, dan time specific.”

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang

menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro,2000). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, selanjutnya untuk memberikan ini S.P. Siagian (1994) memberikan definisi sebagai berikut : Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut :

1. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
 2. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan.
 3. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang di artikan sebagai cara hidup yang
 4. baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.
- Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan Perubahan

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Adapun Ginanjar Kartasmita (1997;9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi multi

interpretable namun disamping itu pembangunan harus dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Todaro melihat pembangunan sebagai: “proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat”. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah:

- a. Live sustainance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman,
- b. self esteem, kemampuan untuk menjadi diri sendiri,
- c. freedom for survituede, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.

Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun menurut Esman (Jtokrowinoto 1999:91) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang di pandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan. Pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (1999:35) dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya:

- (1) azas pembangunan integral,
- (2) azas kekuatan sendiri,
- (3) azas pemufakatan bersama.

Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus berdasarkan kekuatan sendiri, azas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan at as prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa Pengertian pembangunan seperti yang telah di uraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang di milik. Semua itu di maksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi

kesejahteraan Rohani maupun Jasmani. Pembangunan sebagai upaya memperbaiki keadaan, dalam arti yang lebih buruk menjadi baik bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar berencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi program-program pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain dilihat sebagai upaya memperbaiki keadaan, pembangunan juga dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk mengetahui segala potensi kreatif yang dimiliki oleh masyarakat dimana pembangunan berusaha menggerakkan dan menguakkan potensi kreatif yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi kreatif itu maka pembangunan mempertimbangkan sistem nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. Potensi yang dimiliki masyarakat seringkali terpendam dan untuk membangkitkan kembali harus melalui pembangunan. Potensi yang telah muncul melalui pembangunan tersebut sekaligus merupakan salah satu factor yang dapat memperlancar jalannya roda pembangunan. Potensi-potensi yang dimaksudkan berupa budaya, ekonomi, nilai dan sebagainya.

Partisipasi masyarakat bukanlah hal baru di dalam program pembangunan, baik di dunia maupun Indonesia. Popularitas partisipasi dalam pembangunan meningkat dan menyebar di banyak negara sejak adanya Konsensus Washington yang melibatkan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan International Monetary Fund (lihat Williamson, 2004). Keterlibatan masyarakat dianggap mampu mendorong keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan, salah satunya adalah mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dan partisipasi sering disebutkan bersama di dalam literatur. Misalnya dalam Eyben and Napier-Moore (2008) disebutkan bahwa pemberdayaan merupakan proses untuk mendorong kaum miskin dan termarginalkan untuk berpartisipasi dalam mengontrol institusi yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi merupakan cara untuk memberi kaum miskin, yang menjadi target program pembangunan, kesempatan untuk bersuara (Hickey, 2005). Karena itu, partisipasi dan pemberdayaan dianggap saling

Konsep partisipasi menjadi semakin populer dalam bidang pembangunan sejak tahun 1990-an dan menjadi bagian dari konsep pembangunan ‘ortodoks’ sejak saat itu (Cooke and Kothari, 2001; Cornwall and Brock, 2005; Gaventa and Cornwall, 2006). Yang dimaksud pembangunan ortodoks adalah konsep atau desain pembangunan yang bersifat umum dan diterima secara luas, misalnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti PBB dan World Bank, untuk kemudian diadopsi oleh banyak negara di dunia. Contohnya adalah program Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Penerapan partisipasi dalam pembangunan mainstream tidak mendapatkan banyak kendala, salah satu sebabnya adalah adanya pandangan bahwa partisipasi adalah sesuatu yang baik (Cleaver, 1999) terutama untuk partisipan program pembangunan. Partisipasi dianggap sebagai alat untuk memberikan orang miskin dan termarjinalkan ruang untuk bersuara, sekaligus sebagai respons terhadap desain pembangunan mainstream yang bersifat *top-down* (Hickey, 2005). Partisipasi pun digunakan sebagai sebuah pendekatan terhadap pembangunan, lebih dikenal sebagai pendekatan partisipatif (*participatory approach*).

Menurut Mansuri and Rao (2012), keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan sumber daya dan kualitas infrastruktur pembangunan. Meskipun partisipasi dianggap sebagai hal baik, pendekatan partisipatif dalam pembangunan juga mendapat kritik tajam dari akademisi karena inefisiensinya (lihat Cornwall and Brock, 2005; Hickey and Mohan, 2005). Partisipasi yang dilakukan dalam pembangunan ortodoks seringkali terbatas pada pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan yang bersifat teknokratis. Keterlibatan masyarakat

Perencanaan parsipatif kini menjadi salah satu pendekatan yang populer dikalangan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir banyak berbagai campaign, research, dan berbagai proyek pemerintah mengklaim dirinya menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif dalam proses pembuatannya. Namun sebenarnya apakah yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif? Apakah yang selama ini

kita ‘‘klaim’’ sebagai perencanaan partisipatif merupakan perencanaan partisipatif yang sesungguhnya? Pentingkah perencanaan partisipatif diterapkan dalam pembangunan?

Definisi Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna (Quasi-Perfect Information) dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi.

Berdasarkan definisi diatas dapat dilihat seberapa penting peran masyarakat dalam mengambil keputusan terutama dalam konteks keputusan-keputusan untuk kepentingan publik. Kini bahkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pembuatan kebijakan sudah dijamin dalam konstitusi negara maupun dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu implementasi perencanaan partisipatif di Indonesia dalam pembangunan adalah dengan diadakannya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Konsep Pembangunan Partisipatif (KPP) merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. KPP ini bisa disampaikan ke publik dengan komunikasi yang tepat dan jelas. Oleh karena itu, maka konsep pembangunan partisipatif mengandung tiga unsur penting, yaitu :

1. Peningkatan peran komunitas ataupun publik dalam planning, implementasi konsep, pengkajian hasil pembangunan dan evaluasi dari hasil proses,
2. Edukasi pemahaman masyarakat akan pembangunan , dan
3. Peran pemerintah sebagai penyampai pesan utama.

Kegiatan dan konsep pembangunan yang tepat sasaran serta terlihat dengan nyata adalah dengan menggunakan komunikasi dan medianya

sebagai wadah untuk mengkampanyekan konsep pembangunan yang mudah diterima oleh masyarakat.

G. Adapun Macam Partisipasi Dapat Dibedakan :

- a. Partisipasi Aktif : keterlibatan secara aktif didalam proses belajar mengajar/pelatihan.
- b. Partisipasi Pasif: keterlibatan mendukung pelatihan tetapi tidak ikut berperan secara langsung (hanya sebagai pendengar)

Berdasarkan cara keterlibatannya, menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010 : 38) dapat dibedakan:

- a) Partisipasi langsung : partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b) Partisipasi tidak langsung : partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

H. Prinsip-Prinsip dan Hirarki partisipasi

Prinsip-Prinsip Partisipasi: Sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipasi yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004:106-107) adalah :

- Cakupan : meliputi semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses.
- Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*) : pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dan terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- Transparansi : semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

- Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*) : berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- Kesetaraan tanggung jawab (*Sharing Responsibility*) : berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pelatihan.
- Pemberdayaan (*Empowerment*) : keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- Kerjasama : diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

I. Perencanaan Pembangunan

Tony Killick (dalam Kunarjo, 2002:15) mengidentifikasi 6 (enam) sifat dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

- Perencanaan pembangunan menyajikan tujuan kebijakan pemerintah, terutama dengan penekanan pada pembangunan ekonomi;
- Strategi untuk pencapaian tujuan itu harus dikenali, dan hal ini berbeda antar daerah satu dengan yang lainnya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- Suatu rencana harus dilaksanakan secara konsisten menurut pedoman yang terarah;
- Perencanaan mencoba untuk memahami dan mempengaruhi seluruh kehidupan perekonomian;
- Suatu rencana menggunakan suatu model ekonomi makro untuk memprediksi suatu kinerja perekonomian yang diinginkan;

- Perencanaan seyogianya dibagi menurut jangka waktu tertentu, misalnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Syarat-syarat perencanaan pembangunan yang baik menurut Kunarjo (2002:24) adalah perencanaan pembangunan dengan beberapa persyaratan yaitu perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan, perencanaan harus konsisten dan realistis, harus dibarengi dengan pengawasan yang kontinu, mencakup aspek fisik dan pembiayaan, para perencana harus memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi, dan perencanaan harus mempunyai koordinasi.

Hanif Nurcholis (2009) mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodogan (kontroversi), ikut memantau implementasi dan ikut aktif melakukan evaluasi.

Partisipasi Perencanaan Pembangunan Kebijakan dengan model bottom up telah dipilih menjadi model yang dilaksanakan. Model tersebut banyak diakui sebagai model yang paling ideal dalam rangka pemberian wewenang kepada masyarakat dalam penentuan kebijakan daerah. Menurut Dunn (2003) penentuan kebijakan dengan pemberian wewenang yang lebih besar kepada masyarakat mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya: Komunitas memiliki komitmen lebih besar terhadap anggotanya dari pada birokrasi; Komunitas lebih memahami masalahnya sendiri daripada birokrasi; Biaya komunitas lebih murah daripada birokrasi; Standar perilaku komunitas lebih efektif daripada birokrasi; Komunitas lebih fleksibel dan kreatif daripada birokrasi. Komunitas memfokuskan pada kapasitas.

Setidaknya ada empat bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Berikut penjelasan beserta contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Untuk pembangunan daerah, masyarakat juga memegang peran penting dalam pengambilan keputusan. Sehingga hal

ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah setempat, melainkan juga turut melibatkan masyarakat. Contohnya mengadakan diskusi tentang pembangunan jalan, menyampaikan pendapat terkait pembangunan, dan lain sebagainya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Contohnya turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana atau memberi sumbangan uang tunai, dan lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan serta evaluasi Artinya masyarakat juga turut memantau dan melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan. Tujuannya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya korupsi, suap, atau lainnya. Contoh partisipasinya ialah memberi kritik saran, turut andil dalam mengawasi proses pembangunan agar berjalan sebagaimana mestinya, dan lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan Setelah pembangunan selesai dilakukan, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pemanfaatan hasilnya. Supaya tidak sia-sia dan memang digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Contoh partisipasinya ialah memanfaatkan serta menggunakan jembatan, merawat fasilitas umum, dan lainnya.

Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga bisa dilakukan dengan selalu membayar pajak tepat waktu, tidak merusak fasilitas umum, ikut terjun dalam kegiatan pembangunan, kompak dan rela bekerja sama tanpa memperhatikan perbedaan yang ada, dan lain sebagainya. Bentuk pendekatan partisipatif melalui kerjasama di bidang internasional. Kerja Sama Bilateral Kerja sama bilateral adalah kerja sama antara dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam menjalin hubungan bilateral, Indonesia mengutamakan nilai nilai saling menghormati, tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain, menolak menggunakan kekerasan, dan mengutamakan konsensus. Contoh Kerja sama bilateral Indonesia dengan negara lain:

- Kemitraan strategis khusus atau special strategic partnership Indonesia-Korea dengan fokus terhadap pertahanan dan perdagangan.
- Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership atau IK-CEPA)
- Kerja sama Indonesia-Amerika Serikat dalam penanggulangan Covid-19 dan Peningkatan Neraca Perdagangan Kerja sama Indonesia-Brazil dalam peningkatan mutu genetik protein hewani dan pengembangan peternakan nasional.
- Ekspor kopi, teh, tembakau, dan minyak sawit Indonesia ke Jerman. Jerman mengekspor barang elektronik yang tidak bisa dibuat di Indonesia.
- Kerja sama Indonesia-Jerman dalam penanaman modal usaha seperti Krakatau Steel dan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Kerja Sama Multilateral Kerja sama Multilateral adalah kerja sama antara beberapa negara. Kerja sama multilateral tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kerja sama multilateral memiliki dua jenis anggota yaitu anggota utama dan anggota aktif. Peran anggota utama lebih besar, sedangkan peran anggota aktif lebih terbatas. Contoh Kerja Sama Multilateral Indonesia:

Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Dana moneter internasional (Internasional Monetary Fund atau IMF).

- Organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization atau WTO).
- Organisasi buruh internasional (Internasional Labour Organization atau ILO).
- Organisasi pangan dan pertanian (Food and Agricultural Organization atau FAO).
- Perdagangan bebas kawasan ASEAN (ASEAN Free Trade Area atau AFTA).
- Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council atau ECOSOC)

Kerja Sama Regional Kerja sama regional adalah kerja sama beberapa negara dalam satu kawasan. Biasanya dilatarbelakangi adanya kepentingan bersama antarnegara.

Contoh Kerja Sama Regional Indonesia:

- Asosiasi negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations atau ASEAN).
- Kerja sama ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC).
- Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum atau ARF)
- Konfederasi nonpolitik Malaysia, Philipina, dan Indonesia (MAPIHILINDO)

J. Teori dan Konteks Pembangunan Global

a. pembangunan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Secara umum kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan sangat berkaitan dengan nilai, dan acap kali bersifat transendental, suatu gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah ideologi the ideology of developmentalisme.

Oleh karenanya, para perumus kebijakan, perencana pembangunan, serta para pakar selalu dihadapkan nilai (value choice), mulai pada pilihan epistimologis-ontologi sebagai kerangka filosofisnya, sampai pada derivasinya pada tingkat strategi, program atau proyek. Mengukur pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator utama, yakni kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, indeks pembangunan manusia (human development index), dan kerusakan lingkungan.

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang

dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.

b. pembangunan global

Pembangunan internasional atau pembangunan global adalah konsep luas yang mencakup tingkat pembangunan berskala internasional. Pembangunan internasional merupakan dasar pengelompokan negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang.

Pembangunan internasional dari dulu berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Belakangan ini, pembangunan internasional sering dikaitkan secara menyeluruh dan multidisipliner dengan pembangunan manusia serta daya saing, kualitas hidup, atau kesejahteraan subjektif.

Yang menjadi titik penting atas keterbelakangan negara berkembang dalam hubungan tersebut adalah adanya pengawasan yang ketat, monopoli modal asing, serta penggunaan teknologi maju pada tingkat nasional dan internasional yang menekan kondisi internal sebuah negara untuk tidak mampu meningkatkan daya saingnya. Sehingga, Dos Santos melihat bahwa faktor eksternallah yang menjadi sumber awal keterbelakangan negara berkembang khususnya negara-negara di Amerika Latin.

Pembangunan internasional berbeda dengan pembangunan pada umumnya. Pembangunan internasional secara khusus terdiri atas lembaga dan kebijakan yang muncul setelah Perang Dunia II. Lembaga-lembaga ini bertujuan memberantas kemiskinan dan memperbaiki standar hidup di negara-negara yang sebelumnya terjajah.

Pada tahapan lanjut pertentangan kelas, Lenin mengembangkan teori imperialisme sebagai puncak kapitalisme. Teori Imperialisme Lenin ini membawa perjuangan kelas pada tingkatan internasional. Lenin dianggap sebagai peletak dasar pemikiran Marxis dalam hubungannya dengan hubungan internasional. Ia merupakan tokoh sentral dalam penggulingan Tsar, menginspirasi gerakan Komunis Internasional, dimana program tersebut bertujuan untuk menyatukan proletar global untuk melawan borjuis di negaranya masing-masing. Berbicara mengenai Hubungan Internasional, tulisan Lenin yang berjudul “Imperialisme, The Highest Stage of Capitalism” menjadi titik tolak pemikiran Marxis dalam hubungan Internasional. Didalam tulisannya tersebut Lenin beranggapan bahwa imperialisme merupakan capaian tertinggi dari sistem kapitalisme. Hal ini tidak lepas dari pemikiran Lenin yang melihat bahwa aspek dasar dari kapitalisme yaitu persaingan bebas yang terjadi antara perusahaan-perusahaan kapitalis di dunia, berkembang menjadi kekuatan memonopoli pasar bebas secara global. Dalam memonopoli pasar bebas terdapat kecenderungan untuk menggunakan kekuasaan.

Di dalam teori pembagian kerja secara internasional, setiap negara dituntut memiliki komoditas spesifik yang diproduksi sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Sebagai gambaran, negara tropis yang memiliki lahan yang cenderung lebih subur, lebih baik mengembangkan komoditas produksi dibidang pertanian. Sebaliknya, negara lain di utara yang tidak didukung oleh iklim yang memadai, akan mengembangkan komoditas produksinya di bidang industri.

Namun demikian, dengan adanya teori pembagian kerja secara internasional ini, menimbulkan pengelompokan negara penghasil komoditas yang tidak seimbang. Proses pertukaran komoditas di dalam kegiatan perdagangan bebas menunjukkan neraca yang tidak seimbang diantara keduanya. Tingkat lanjut dari proses perdagangan internasional ini menciptakan dua kelompok negara yaitu negara miskin yang biasanya negara dengan basis produksi komoditas pertanian dan negara kaya yang memiliki basis produksi teknologi.

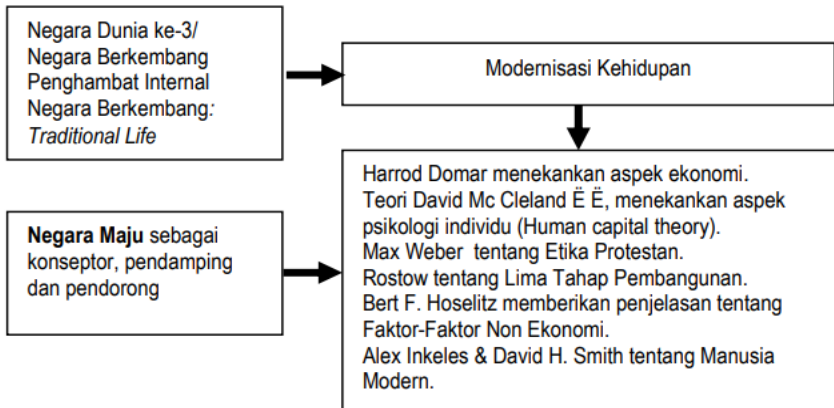
c. teori dan konteks pembangunan global

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar: 1) modernisasi dan 2) ketergantungan (Lewellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Adapun Tikson (2005) membaginya ke dalam tiga klasifikasi teori pembangunan: 1) modernisasi; 2) keterbelakangan; dan 3) ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

1) Teori Modernisasi

Teori Modernisasi berkembang pasca perang dunia kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Amerika melibatkan diri membantu negara-negara Eropa yang porak-poranda se usai perang. Perlahan Eropa mulai bangkit dari keterpurukannya. Keterlibatan ini ternyata bukan saja mampu ‘menolong’ negara-negara Eropa, tetapi ternyata justru memberikan banyak keuntungan yang lebih bagi Amerika.

Keberhasilan pembangunan yang diterapkan pada negara-negara di Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara Dunia Ketiga sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunannya. Kenyataannya, keberhasilan yang pernah diterapkan di Eropa ternyata banyak mengalami kegagalan di negara-negara Dunia Ketiga. Penjelasan tentang kegagalan ini memberikan inspirasi terhadap sarjanasarjana sosial Amerika, yang kemudian dikelompokkan dalam satu teori besar, dan dikenal sebagai teori Modernisasi (Budiman, dalam Frank, 1984: ix).



Berikut ini, asumsi dasar dari teori modernisasi.

1. Berangkat dari dua kutub dikotomis, antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern diidentikkan dengan masyarakat negara-negara maju dan masyarakat tradisional diidentikkan dengan masyarakat negara-negara berkembang;
2. Berangkat dari modernisasi tersebut maka negara-negara maju memberikan peran sangat dominan dan dianggap positif, menularkan nilai-nilai modern di samping memberikan bantuan modal dan teknologi. Teori modernisasi menekankan bahwa tekanan kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal melainkan internal (traditional life);
3. Resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan, dan di mana saja. Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Teori Modernisasi dalam Pembangunan teori modernisasi merupakan teori yang berkembang karena merespon teori yang sebelumnya ada, yaitu mengenai pembagian kerja secara internasional. Di dalam teori pembagian kerja secara internasional, setiap negara dituntut memiliki komoditas spesifik yang diproduksi sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Sebagai gambaran, negara tropis yang memiliki lahan yang cenderung lebih subur, lebih baik mengembangkan komoditas produksi dibidang pertanian. Sebaliknya, negara lain di utara yang tidak didukung oleh iklim yang memadai, akan mengembangkan komoditas produksinya di bidang industri.

Disatu sisi, modernisasi secara sosial akan berbicara mengenai perubahan-perubahan dalam bidang politik dan psikologis dimana perbedaan tersebut hanya berada dalam tatanan analitis bukan secara realita empiris. Perubahan yang terjadi dalam proses modernisasi sosial meliputi perubahan dalam pola-pola kelembagaan, perubahan status-status sosial yang merupakan struktur sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, Abraham melihat secara sosial unsur-unsur pokok perubahan di dalam proses modernisasi sosial mencakup perubahan sosial.

2) Teori Dependensi

Teori Dependensi atau Teori Ketergantungan lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili “suara negara-negara pinggiran” untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi.

Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuwan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru, yang tentu saja mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. Kritikan terhadap modernisasi yang dianggap sebagai “musang

berbulu domba” dan cenderung sebagai bentuk kolonialisme baru semakin mencuat dengan gagalnya negara-negara Amerika Latin menjalankan modernisasinya. Frank sebagai pelopor kemunculan teori dependensi, pada awalnya menyerang pendapat Rostow. Frank menganggap Rostow telah mengabaikan sejarah. Sejarah mencatat bagaimana perkembangan dunia ketiga yang tatanan ekonominya telah dihancurkan oleh negara dunia pertama selama masa kolonial. Pemikiran Frank terus bergulir dan disambut oleh pemikir sosial lainnya, seperti Santos, Roxborough, Cardoso, dan Galtung.

Asumsi dasar dari teori Dependensi mencakup: (1) keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga; (2) ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh ‘faktor luar’; (3) permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia Ketiga ke negara maju; (4) situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global; dan (5) keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan (Suwarsono-So, 1991: 111).

Teori Dependensi ini bukannya tanpa kekurangan, bahkan kritik yang dilontarkan mungkin lebih banyak dari sanggahan terhadap teori Modernisasi (Suwarsono-So, 1991: 137). Salah satu persoalan yang luput dari perhatian teori dependensi adalah kurangnya pembahasan tentang kolonialisme yang pernah tumbuh subur di kebanyakan negara-negara berkembang. Menurut perspektif dependensi, pemerintahan kolonial didirikan dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan jajahan, dan pemerintahan ini tidak akan pernah dibentuk dengan tujuan untuk membangun negara pinggiran (Suwarsono-So, 1991: 121).

Teori ketergantungan ini lahir dari dua induk. Induk yang pertama adalah seorang ahli ekonomi liberal: Raul Prebisch. Induk yang kedua adalah teoriteori Marxis tentang imperialism dan kolonialisme, serta seorang pemikir Marxis yang merevisi pandangan Marxis tentang cara produksi Asia, yakni Paul Baran. Kedua induk ini adalah para pemikir pendahulu dari Teori Ketergantungan.

3) *Teori Sistem Dunia: Immanuel Wellerstein*

Munculnya Wellerstein dengan Teori Sistem Dunianya juga merupakan reaksi terhadap Teori Ketergantungan. Seperti juga teori Bill Warren dan Teori Artikulasi, reaksi ini muncul karena Teori Ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di Dunia Ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Teori Sistem Dunia Wellerstein sebenarnya sangat sederhana. Dia beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau pemerintahan lainnya. Pada waktu itu belum ada sistem dunia. Masing-masing sistem mini tidak saling berhubungan. Dunia terdiri dari banyak sistem mini yang saling terpisah.

Kemudian terjadi penggabungan-penggabungan, baik melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela. Sebuah kerajaan besar kemudian muncul. Meskipun tidak sampai menguasai seluruh dunia, tetapi karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya, kerajaan ini disebut dengan kerajaan dunia, atau world empire. Kerajaan dunia ini mengendalikan kawasannya melalui sistem politik yang dipusatkan.

Meskipun kerajaan dunia ini sangat besar, kawasannya terbatas sampai sejauh mana kerajaan ini bisa menguasai secara politis daerahnya. Penguasaan juga tidak dalam bentuk pengendalian yang ketat, tetapi cukup dengan sistem upeti sebagai tanda takluk. Semakin jauh dari pusat kekuasaan, semakin bebas daerah tersebut.

Munculnya Wellerstein dengan teori sistem dunianya juga merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Seperti juga teori Bill Warren dan teori artikulasi, reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan.

Secara umum, banyak pendapat mengungkapkan bahwa perkembangan teori fungsionalisme struktural didasari dari pemikiran-pemikiran Emile Durkheim dan Mark Weber. Dalam hal ini, Durkheim pernah mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan totalitas organis dengan realitanya masing-masing, memiliki sejumlah kebutuhan dan fungsi yang harus dipenuhi sehingga masyarakat tetap sustainable

(Rasyid, 2015 : 274). Selanjutnya, teori ini dikembangkan oleh Talcot Person dan Robert King Merton yang menjadi dua tokoh utama fungsionalisme struktural. Dalam pandangan Talcott Person, masyarakat diibaratkan seperti organisme hidup dimana setiap bagian-bagian dari organisme itu saling berkaitan dengan perannya masing-masing (Ritzer, 2009 : 25). Tiap-tiap bagian dalam struktur masyarakat yang diibaratkan dengan organisme.

Para penganut teori ini pada dasarnya mencoba menjawab mengenai bagaimana masyarakat tersebut bisa bersatu, lalu bagaimana landasan keteraturan yang terdapat didalam suatu struktur masyarakat itu bisa dipertahankan, lalu tindakantindakan individu apa saja dan bagaimana tindakan tersebut memberikan sumbangsih terhadap suatu sistem sosial didalam sebuah masyarakat baik yang disadari maupun yang tidak disadari, diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis ini, juga diharapkan muncul jawaban mengenai persyarikat apa saja yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat agar sustainable dan bagaimana fungsi-fungsi didalam suatu sistem sosial tersebut dipenuhi. Dalam hal ini, berbagai fenomena yang berada didalam masyarakat dianalisa dengan kerangka-kerangka fungsional yaitu konsekuensi-konsekuensi sosial umumnya di dalam masyarakat. Dalam hal ini, konsekuensi tersebut dinilai apakah memberikan sumbangsih terhadap kesejahteraan masyarakat atau tidak bahkan kecenderungan terhadap kestabilan struktur sosial yang ada didalam masyarakat. Tujuan untuk melihat konsekuensi-konsekuensi sosial dari perilaku tindakan individu merupakan hal yang mendasar dari perspektif fungsional Merton.

K. Global Governance

Salah satu pengertian yang banyak dirujuk dalam memahami global governance antara lain dari Rosenau dan Czempiel (1992) yang menerjemahkan global governance sebagai pemerintahan tanpa pemerintah (governance without government). Hal ini juga sejalan dengan pengertian dari Finkelstein (1995) yang menjelaskan bahwa “Global governance is governing, without sovereign authority, relationship that transcend national frontiers. Global governance is doing internationally what governments do at home”.

Kedua pengertian ini sebenarnya menjelaskan kondisi minimnya peran pemerintah (negara) dalam global governance. Sedangkan pengertian lain dari Thomas Weiis lebih menjelaskan bahwa global governance tidak lain adalah "...efforts to bring more orderly and reliably responses to social and political issues that go beyond capacities of states to address individually".

Ini artinya bahwa isu dalam global governance merupakan isu yang tidak mampu lagi diatasi oleh negara dengan kapasitasnya saat ini. Konsekuensinya ialah bahwa global governance memerlukan interaksi lebih dari satu pihak, sebagaimana dalam pengertian dari Gold Mercury International, yaitu "Global Governance is about the interaction that is required to solve problems that affect more than one state or region when there is no power enforcing compliance". Pengertian yang paling menarik justru ditampilkan oleh Commission on Global Governance (CGG), yang menjelaskan "... the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. ... governance has been viewed primarily as intergovernmental relationships, but it must now be understood as also involving non-governemntal organizations, citizens' movements, multinational corporations, and the global capital market".

Dalam pengertian itu ada kata kunci yaitu "common affairs", yang menjadi alasan bagi institusi negara maupun non negara untuk bersama-sama menggarap sebuah isu bersama. Hal ini karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan terhadap isu tersebut.

L. Paradigma Baru Dalam Pembangunan Global

a. Paradigma

Menurut Denzin dan Lincoln (eds.) (1994: 99) paradigma ialah "a basic set of beliefs that guide action. Paradigms deal with first principles, or ultimates". Sedangkan Given (ed. 1990: 591) mengartikan paradigma sebagai "a set of assumptions and perceptual orientations shared by members of a research community". Sedangkan Guba (dalam Cresweel, 2007: 19) mengartikan paradigma sebagai 'a basic set of beliefs that guide action'. Banyak definisi tentang paradigma. Masing-masing dengan konsepnya sendiri-sendiri. Tetapi dari semua itu dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa adalah

suatu cara pandang tentang sesuatu yang di dalamnya mengandung sejumlah asumsi, teori, model dan solusi tertentu mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian.

Pendapat lain menyebutkan pengertian paradigma adalah seperangkat keyakinan, asumsi, ide, teori, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas pada suatu komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin ilmu. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa istilah paradigma umumnya merujuk pada pola berpikir atau cara penyelesaian masalah yang dilakukan manusia.

Istilah “paradigma” diadaptasi bahasa Inggris “paradigm” yang merupakan serapan dari bahasa Latin “paradigma” yang artinya suatu model atau pola. Dan dalam bahasa Yunani disebut “paradeigma” (para+deiknunai) yang artinya membandingkan, bersebelahan (para), dan memperlihatkan (deik).

Fungsi dari paradigma adalah untuk menjadi dasar bagi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan tujuan paradigma sendiri, yaitu membentuk kerangka pemikiran dalam mendekati dan terlibat dengan berbagai hal atau dengan orang lain. Di sisi lain dapat diartikan pula bahwa paradigma adalah bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu, yang memengaruhinya dalam berpikir. Pada penelitian, teori paradigma dapat membantu para ilmuwan untuk dapat bekerja dalam suatu kerangka teoretis yang luas.

b. Definisi Paradigma Menurut Para Ahli

Para ahli memiliki kesimpulan masing-masing terhadap arti dari paradigma, antara lain:

- Steven Coey
Menurut Steven Coey, paradigma adalah cara kita memandang sesuatu: pandangan, kerangka acuan atau keyakinan kita. Paradigma adalah seperti kaca mata. Steven Covey merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya: paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain dan paradigma tentang kehidupan.

- Harmon
Menurut Harmon, bahwa paradigma adalah cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas.
- Baker
Menurut Baker, paradigma adalah kumpulan dari perangkat aturan yang menetapkan atau mendefinisikan batas-batas. Paradigma juga menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu untuk berhasil.
- Thomas Kuhn
Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar, atau landasan berpikir yang digunakan/dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya.
- Robert Friedrichs
Menurut Robert Friedrichs, bahwa paradigma adalah dasar pandangan disiplin pada apa materi pelajaran yang harus dipelajari.
- George Ritzer
Menurut George Ritzer bahwa paradigma adalah pandangan mendasar ilmuwan tentang apa materi pelajaran harus dipelajari oleh cabang atau disiplin, dan apa aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi yang akan dikumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam menanggapi isu-isu ini.

c. Contoh Paradigma

Mengacu pada definisinya, berikut ini adalah beberapa contoh paradigma:

1. Paradigma Rekonstruksi Teori
Pada paradigma ini, suatu teori atau metode yang telah ada digunakan kembali dalam penelitian baru namun metode lama tersebut harus relevan agar terjadi kesinambungan yang jelas.

2. Paradigma Piramida
Pada paradigma ini, suatu konsep atau metode dilakukan secara bertahap seperti halnya berbagai macam piramida, mulai dari piramida terbalik, ganda, hingga berlapis.
4. Paradigma Kualitatif
Paradigma ini sering digunakan dalam studi para mahasiswa, baik dalam tugas maupun skripsi dengan metode kualitatif. Paradigma ini dipakai untuk menemukan gambaran teori sosial melalui teori induktif.
5. Paradigma Siklus Empiris
Paradigma ini merupakan suatu metode atau konsep yang dapat menjelaskan fenomena ilmiah dimana wujudnya adalah sebuah siklus.
6. Paradigma Deduksi-Induksi
Pada paradigma ini berfokus pada metode kualitatif untuk deduksi, sementara metode kuantitatif untuk induksi, dimana tahapannya melalui pengumpulan data hingga pembuatan kesimpulan.

d. Macam-Macam Paradigma

- Paradigma Politik
yaitu pandangan mendasar dan umum yang menuntun seseorang dalam berpikir dan bertindak di bidang politik.
- Paradigma Ekonomi
yaitu pandangan mendasar masyarakat tentang ekonomi dan hal-hal yang berkaitan dengannya yang dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak.
- Paradigma Sosial dan Budaya
yaitu pandangan dasar yang bersifat filosofi yang mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.
- Paradigma Hukum
yaitu pandangan dasar masyarakat terhadap hukum yang berlaku sehingga mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak sesuai hukum.

- Paradigma Bidang Kehidupan Antar Agama yaitu pandangan dasar dan umum yang mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya dan saling menghargai antar agama lain.

e. Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan adalah cara berpikir, pola berpikir, atau kerangka berpikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi kerangka dari aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan, aspek infrastruktur, aspek pendidikan, aspek teknologi, aspek budaya dan lain sebagainya.

Dalam berbangsa dan bertanah air Indonesia, paradigma pembangunan harus berdasarkan Pancasila. Dimana wujud dari paradigma pembangunan yang berdasarkan Pancasila adalah pembangunan tidak dilakukan dengan pragmatis, cara berpikir pembangunan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, pembangunan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara adil.

Topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatan, link and match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial.

f. Paradigma Baru Dalam Pembangunan Global

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic needs) pembangunan mandiri (self-reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (ecodevelopment), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (ethnodevelopment) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni Economic Growth, Basic Needs dan People Centered.

- a. Economic growth (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan)

Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:

1. akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM;
 2. peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas;
 3. kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.
- b. Basic needs (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan)

Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain.

- c. People centered (model pembangunan yang berpusat pada manusia)

Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini, adalah empowering/pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

Bert F. Hoselitz tentang faktor-faktor non-ekonomi membahas faktor-faktor non-ekonomi yang ditinggalkan Rostow yang disebut sebagai faktor kondisi lingkungan yang dapat dicari dalam masyarakat x. Keterampilan tertentu menekankan adanya lembaga-lembaga sosial

dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas. Satu hal yang menonjol dari teori modernisasi ini, adalah modernisasi seolah-olah tidak memberikan celah terhadap unsur luar yang dianggap modern sebagai sumber kegagalan, namun lebih menekankan sebagai akibat dari dalam masyarakat itu sendiri. Asumsi ini ternyata banyak menimbulkan komentar dari berbagai pihak, terutama dari kelompok pendukung teori Dependensi sehingga timbul paradigma baru yang dikenal sebagai teori Modernisasi Baru (Suwarsono-So, 1991: 58-61)

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar: 1) modernisasi dan 2) ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994).

Teori ketergantungan membantah tesis Marx yang menyatakan bahwa kapitalisme akan menjadi cara produksi tunggal, dan menciptakan proses maupun struktur masyarakat yang sama di semua negara yang ada di dunia ini. Seperti yang diuraikan mula-mula oleh Prebisch, kemudian oleh Baran, kapitalisme yang berkembang di negara-negara yang menjadi korban imperialisme, tidak sama dengan perkembangan kapitalisme dari negara-negara imperialisme yang menyentuhnya. Munculnya Wellerstein dengan teori sistem dunianya juga merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan.

Seperti juga teori Bill Warren dan teori artikulasi, reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Dengan dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam menciptakan iklim Indonesia yang lebih kondusif, damai, dan sejahtera. Proses merehabilitasi dan merekonstruksi yang di amanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam

melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda.

Pada tahun 1947 perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”. Perencanaan pembangunan 1947 ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu (meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali masalahmasalah nonekonomi khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana, dan lain-lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk “mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” tidak akan dengan sendirinya dapat terwujud. Apalagi jika tidak diperkuat oleh undang-undang yang baku pada masa itu.

Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era ini, kondisi persaingan antarpelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro, 2004). Dalam konteks inilah diperlukan ”strategi berperang” modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal (D’Aveni, 1995), pertama, visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespons setiap perubahan. Ketiga, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.

BAB VII. KEBIJAKAN GLOBAL DALAM DINAMIKA PASCA PANDEMI COVID-19

A. Pengertian Kebijakan Global

Hogwood dan Gunn, seperti dikutip Parsons (2005:15) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik.

Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu: a. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; b. taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; c. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Widodo 2007:13). Aminullah dalam Muhammadi (2001 : 371-372) bahwa kebijakan merupakan upaya/tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Dari

beberapa pandangan tentang kebijakan, dapat ditarik benang merah bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (means) dan tujuan (ends), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Global adalah umum yang merujuk kepada beberapa pengertian, antara lain; secara umum dan keseluruhan secara bulat (hitungan, kesepakatan, keputusan), secara garis besar, bersangkutan paut mengenai atau meliputi seluruh dunia. Jika global dijadikan parameter, maka sesuatu yang mengglobal berarti menyeluruh atau meliputi (berlaku) seluruh dunia.

B. Dinamika

Kata dinamika berasal dari bahasa Yunani dynamics yang berarti kekuatan (force). Seiring waktu, kata dinamika digunakan sebagai pergerakan yang terjadi dalam kehidupan. Menurut Slamet Santoso (2004), dinamika adalah tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Dinamika berarti interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok. Dijelaskan dalam buku Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep) Jilid 1 karya Rahmi Widyanti, dinamika adalah sesuatu yang berarti energi. Kata ini juga merujuk pada kondisi selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Pada awal tahun 2020 di seluruh dunia ini dikejutkan dengan adanya virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan Cina pada bulan Desember tahun 2019. Dunia digemparkan dengan adanya virus corona jenis baru (SARS-CoV-2). Negara yang sudah dipastikan terjangkit Covid-19 sampai saat ini ada 65 negara. (Data WHO, 1 Maret 2020) (Yuliana, 2020). Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization), menetapkan wabah penyakit Covid-19 atau virus corona (SARS CoV-2) menjadi pandemi global.

Peningkatan status tersebut diumumkan secara langsung oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus di Jenewa, Swiss. Adanya penetapan status pandemi ini karena penyebarannya begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat pertama kali ada wabah. Dengan adanya status pandemi ini, WHO meminta seluruh negara untuk meningkatkan respon darurat terhadap Covid19 (Kompas Dunia, 2020). World Health Organization (WHO) memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Corona Virus disease 2019 (COVID-19). Pada awalnya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apa bisa melalui antara manusia-manusia.

Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis yang terinfeksi dari salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus “Super spreader”.(Channel NewAsia, 2020). Menurut data WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita ada 90.308 terinfeksi Covid-19. Di Indonesia awalnya yang terinfeksi ada 2 orang. Angka kematian mencapai 3.087 atau 2.3% dengan angka kesembuhan 45.726 orang. Terbukti dari pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita setelah berkontak secara langsung dengan warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengalami demam, batuk dan sesak napas (WHO, 2020).

Kejadian adanya Coronavirus bukanlah kejadian yang pertama kali. Pada tahun 2002 severe acute respiratory syndrome (SARS) disebabkan oleh SARS-coronavirus (SARSCoV) dan penyakit Middle East respiratory syndrome (MERS) tahun 2012 disebabkan oleh MERS-Coronavirus (MERS-CoV) dengan total akumulatif kasusnya sekitar 10.000 (1000-an kasus MERS dan 800-an kasus SARS). Mortalitas akibat SARS sekitar 10% sedangkan MERS lebih tinggi yaitu 40%. (Yuliana, 2020). Virus Covid-19 membawa bencana di seluruh dunia. Pemerintah daerah telah banyak melakukan strategi komunikasi kepada masyarakat wilayahnya masing-masing melalui beberapa teknik yaitu koersif, informatif, canalizing, edukatif, persuasif dan redundancy dalam upaya memberi instruksi atau himbauan pada masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 di

wilayahnya masing-masing. Namun masih belum melakukan teknik koersif sampai pada tahap memberikan sanksi untuk efek jera bagi pelanggarnya. Pemerintah pusat masih belum maksimal dalam peran menggunakan strategi komunikasi secara komperhensif bagi seluruh Pemerintah daerah. Hal ini terjadi akibat belum adanya komando Nasional dari Pemerintah pusat yang dikenal lambat dalam mencegah penularan Covid-19 yang sudah menjadi bencana global (Ibrahim, Kamaluddin, Mintasrihardi, AM Junaidi, Gani Abd Arsyad, 2020).

Akibat banyaknya masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan, Pemerintah pada akhirnya membuat kebijakan mengenai sanksi atau denda bagi masyarakat yang melanggar. Adanya dampak yang sangat luar biasa baik diseluruh dunia bahkan desa-desa yang ada di Indonesia. Desa-desa terpengaruh terutama dalam bidng ekonomi dan pembangunan yang selama ini banyak mengandalkan bantuan dari pusat. Datangnya wabah Covid-19 menjadikan beberapa pembangunan ekonomi dan desa kelihatanya tidak berjalan secara maksimal. Perlu adanya demokrasi untuk mempengaruhi penanggulangan Covid-19 yang merupakan ujian nyata hasil demokrasi desa dalam mewujudkan perekonomian dan pembangunan yang harus dilaksanakan sebagaimana visi dan misinya yang harus sejalan dengan pancasila. (Sarip, Syarifudin Aip, Muaz Abdul, 2020).

C. Kebijakan pembatasan dan larangan perdagangan untuk bahan pangan

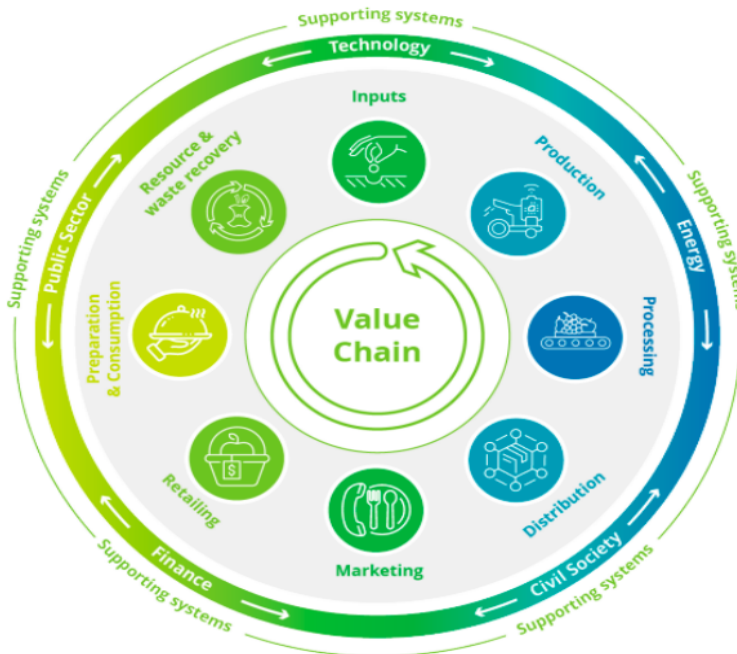
Dari sekian banyaknya regulasi yang telah diberlakukan, pembatasan dan larangan perdagangan untuk bahan pangan menjadi salah satu kebijakan yang paling krusial dan sensitif, oleh karena 3 (tiga) hal :

1. Pertama, industri pangan terdiri atas banyak aktor dengan jaringan proses yang kompleks, sehingga memerlukan pemetaan yang terarah bagi dampaknya terhadap masing-masing pihak. [Lihat Figur 1].
2. Kedua, sistem pangan global juga memiliki nilai sebesar US\$ 8 triliun atau yang setara dengan sekitar 10% dari PDB global, sehingga aturan terkait perdagangan bahan pangan akan sangat memengaruhi dinamika perekonomian global kedepannya.

3. Terakhir, lebih dari 3 (tiga) miliar orang di dunia sangatlah bergantung pada perdagangan internasional untuk menyokong ketahanan pangan domestik, sehingga kesejahteraan masyarakat pun menjadi variabel yang sangatlah krusial.

Figur 1. Aktor dalam Sistem Pangan Global

Sumber: Deloitte 2020



Kebijakan ini biasanya dilakukan oleh suatu negara untuk memitigasi terjadinya kurangnya persediaan suatu barang dalam skala domestik. Pada dasarnya, menurut General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) 1994 yang diatur oleh World Trade Organization (WTO) Artikel XI:1, negara anggota dilarang untuk memperkenalkan atau mempertahankan segala bentuk larangan atau pembatasan ekspor selain bea cukai, pajak, atau biaya lainnya.

kebijakan pembatasan dan larangan ekspor akan merusak dinamika perekonomian kawasan Afrika dan global, jika tetap diberlakukan sampai akhir pandemi COVID-19. Sebagai alternatif,

pemerintah negara harus segera mencari kebijakan dagang yang terbuka. kebijakan pembatasan dan larangan ekspor bahan pangan didasari oleh kepentingan nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.

Di tengah situasi global yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19, negara-negara memilih untuk kembali menerapkan proteksionisme perdagangan agar dapat menjaga kesejahteraan negaranya masing-masing. Dalam situasi ini, negara-negara pengeksport lebih diuntungkan dari kondisi sumber daya alam yang strategis. Bagi negara-negara pengeksport, risiko terjadinya resesi ekonomi global menjadi pertimbangan sekunder, sedangkan memenuhi kepentingan pribadi menjadi prioritas utama. Di sisi lain, negara-negara yang sangat bergantung pada impor bahan makanan harus merasakan imbas negatif dari kebijakan larangan ekspor. Salah satu contoh kontinen yang paling dirugikan oleh kebijakan ini adalah Benua Afrika.

Selaku salah satu kontinen importir bahan makanan terbesar, larangan ekspor akan memberi dampak terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Afrika apabila terus diberlakukan. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa pembatasan perdagangan tidak dapat digunakan sebagai solusi jangka panjang terhadap isu kekurangan pasokan karena dapat menimbulkan efek domino yang pada akhirnya dapat merugikan negara pengeksport maupun pengimpor. Tindakan kebijakan perdagangan yang tidak kooperatif berisiko memperbesar gangguan di pasar pangan global, sehingga dapat menyebabkan lonjakan harga pangan dunia yang lebih besar. Pada akhirnya, larangan ekspor hanya dapat dilakukan dengan sementara dan sebatas memenuhi kebutuhan pangan internal. Dalam jangka panjang, diperlukan kebijakan yang mampu memberikan efek positif terhadap perekonomian global. Hal ini dapat dimulai dengan pengadopsian kebijakan perdagangan yang lebih terbuka untuk semakin memperbaiki ketahanan pangan dunia.

E. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif (Ekraf) adalah paradigma ekonomi baru yang mengandalkan gagasan, ide, atau kreativitas dari Sumber Daya

Manusia (SDM) sebagai factor produksi utama dalam kegiatan ekonominya (Opus Creative Economy Outlook 2019). Menurut Howkins (2001), ekonomi kreatif kreatif berhubungan dengan ide dan uang. Ekonomi kreatif adalah jenis ekonomi pertama di mana imajinasi dan kreativitas menentukan apa yang orang ingin lakukan dan hasilkan. Dalam RUU Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif diartikan sebagai perwujudan nilai tambah dari suatu hak kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya, dan teknologi.

Sumber daya utama dalam ekonomi kreatif adalah kreativitas, yakni kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, solusi dari suatu masalah, atau sesuatu yang berbeda dari pakem. Namun, selain kreativitas, unsur lain yang dianggap penting untuk menunjang ekonomi kreatif adalah nilai tambah. Nilai tambah ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas produk dari segi nilai dan ekonomi. Kegiatan seperti hobi yang dilakukan secara Cuma-Cuma belum bisa digolongkan ke dalam ekonomi kreatif. Fondasi ekonomi kreatif adalah industry kreatif yang digerakkan oleh SDM yang menjadi elemen dalam penciptaan produk dan jasa kreatif yang bernilai ekonomis.

Ekonomi kreatif menjadi sector signifikan bagi iklim ekonomi politik Indonesia, karena memiliki dampak positif sebagai berikut : (1) Kontribusi ekonomi, yaitu PDB, menciptakan lapangan pekerjaan, dan ekspor; (2) Iklim bisnis, yaitu penciptaan lapangan usaha, dampak bagi sector lain, dan pemasaran; (3) Citra dan identitas bangsa, yaitu turisme, ikon nasional, membangun budaya, warisan budaya, dan nilai local; (4) Sumber daya terbarukan, yaitu berbasis pengetahuan dan kreativitas, serta green community; (5) Inovasi dan kreativitas, yaitu ide dan gagasan, serta penciptaan nilai; (6) Dampak social, yaitu kualitas hidup dan peningkatan toleransi social (Muis, 2019).

F. Kebijakan pengolahan atau pemusnahan limbah B3

Kebijakan ini terdapat di provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penelitian pada komponen input yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat telah memiliki regulasi yang memuat pengaturan terkait pengolahan atau pemusnahan limbah B3 di

wilayahnya. Adapun regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Barat. Untuk ketentuan pengolahan sendiri secara spesifik dimuat dalam Pasal 16 peraturan daerah yang mengatakan bahwa pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pengolahan limbah B3 Fasyankes di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/PLB. 3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga yang secara garis besar mengatur mengenai prosedur pelaksanaan penanganan limbah infeksius yang berasal dari Fasyankes dan sampah rumah tangga ODP serta pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Lebih lanjut, KLHK juga mengeluarkan surat No. S.167/MENLHK/PSL B3.3/3/2020 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menekankan pada pemusnahan limbah B3 sesegera mungkin baik itu dilakukan oleh jasa pengolahan limbah B3 dan/atau rumah sakit yang memiliki insinerator. Berdasarkan surat a-quo, limbah medis penanganan COVID-19 dikategorikan sebagai limbah B3 karena memiliki karakteristik infeksius.

Maka dari itu pengelolaannya ikut tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri LHK No. 56 Tahun 2015. Ruang lingkup pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Dalam melakukan pengolahan limbah B3 Fasyankes, ada beberapa pilihan metode yang dapat dipertimbangkan untuk diambil diantaranya; a) dikelola langsung oleh pemerintah; b) dilakukan oleh pihak ketiga, dan; c) rumah sakit memiliki insinerator sehingga dapat memastikan pemusnahan limbah B3 secara mandiri. Dari berbagai pilihan tersebut,

kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai limbah B3 ada pada pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengarahkan kebijakan pengelolaan limbah B3 yang minim resiko. Untuk mencegah adanya penumpukan limbah B3 Fasyankes selama COVID-19, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyarankan agar Fasyankes bekerja sama dengan PT Jasa Medivest selaku penyedia jasa layanan pengelolaan limbah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (HuMas Jawa Barat, 2020). Adapun pijakan legal yang memungkinkan pemilihan metode a quo adalah Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 23 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hubungan kemitraan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

Metode pengolahan limbah B3 yang digunakan oleh PT Jasa Medivest adalah insinerasi, yaitu metode pemusnahan limbah menggunakan suhu tinggi untuk mengoksidasi komponen-komponen limbah yang mudah terbakar menggunakan teknologi insinerator. Skema ini merupakan metode manajemen pengolahan limbah yang paling umum digunakan dan dipandang lebih menguntungkan. Pertama, pemanfaatan teknologi insenerator sangat kompatibel untuk mengolah limbah dalam waktu yang relatif singkat dan mampu mereduksi sebagian besar berat limbah secara substansial (hingga 75%) dan volume (hingga 90%) (Dai, 2016).

Kedua, metode ini relatif lebih efisien karena tidak memakan lahan jika dibandingkan dengan metode sanitary landfill, dimana ketersediaan lahan kosong menjadi faktor penentu keberhasilan metode ini (Mohajit, 2019). Padahal, sebagaimana yang diketahui, ketersediaan lahan di provinsi provinsi padat penduduk sangat terbatas.

Terakhir, proses insinerasi dapat menghasilkan “by product” berupa gas panas flue gases yang bisa dipulihkan kembali (recovery) untuk membangkitkan energi listrik (Prasetyadi, 2018). Selain itu secara normatif, beberapa negara yang telah berhasil melewati

fenomena peningkatan volume limbah B3 Fasyankes, salah satunya China merekomendasikan agar limbah B3 yang dihasilkan oleh pasien COVID-19 di berbagai Fasyankes harus dimusnahkan menggunakan teknologi incinerator bersuhu tinggi (Chinese Government, 2020). Sejalan dengan rekomendasi pemerintah China, metode pemusnahan yang sama kemudian diaplikasikan oleh pemerintah Indonesia yang dituangkan ke dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/PLB.3/3/2020 dan Surat No.S.167/MENLHK/PSLB3.3/3/2020 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebagai komando utama di bidang pengolahan limbah B3, pemerintah pusat mewajibkan seluruh Fasyankes penghasil limbah B3 di daerah manapun untuk mengolah limbah menggunakan teknologi insinerator.

G. Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berperan penting dalam menjaga dan mengamankan 182 perbatasan di bandar udara, pelabuhan laut, dan stasiun penyeberangan perbatasan di seluruh Indonesia. Dalam UU Keimigrasian Indonesia 2011, DJKI memiliki empat peran: pelayanan publik, keamanan nasional, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keimigrasian Indonesia yang menyeleksi orang yang berhak masuk ke Indonesia, memajukan ketertiban umum, dan menghasilkan manfaat bagi Indonesia disebut kebijakan keimigrasian selektif.

Untuk mendukung petugas imigrasi, sistem pemeriksaan imigrasi dikerahkan di titik masuk dan keluar yang terintegrasi dengan sistem pergerakan penumpang dan daftar peringatan pergerakan yang berisi nama-nama penjahat atau orang yang paling dicari. Keamanan perbatasan mendasari pemeriksaan individu dan dokumen tentang pelaksanaan kedaulatan negara mengenai perbatasan dan kebijakan migrasi (Chambers, 2015).

Menghentikan imigrasi di perbatasan di Indonesia adalah proses yang kompleks, dan konflik antar nilai juga dapat meningkat. Pengamanan perbatasan dalam praktik perizinan keimigrasian bukanlah proses yang sederhana karena mengakui aspek multidisiplin

(Kolossof, 2005). Dalam UU Keimigrasian Indonesia 2011, proses perizinan keimigrasian mempertimbangkan keabsahan dokumen perjalanan, visa, kelayakan orang, aspek hak asasi manusia, daftar orang yang dicari oleh NCB Interpol, dan prosedur yang terkait dengan pengendalian keimigrasian (Stoker, 1998). Penegakan hukum perbatasan melibatkan lembaga lain seperti petugas bea cukai, petugas keamanan penerbangan, dan staf darat maskapai. Ini merujuk pada sanksi administratif keimigrasian oleh pejabat imigrasi karena melaksanakan perintah pemindahan yang tidak dapat diterima, perintah deportasi, penyelidikan, dan tindakan lain untuk menangani kejahatan internasional. Langkahlangkah ini harus sesuai dengan kerangka hukum nasional, konvensi internasional dan perjanjian bilateral di perbatasan darat.

Pada bulan pertama kebijakan migrasi dalam menanggapi wabah Covid-19 di Indonesia, terlihat regulasi keimigrasian dan keamanan perbatasan yang terfragmentasi, serta kewenangan yang tumpang tindih. Stoker (1998), dalam proposisi pertama, menyatakan bahwa pemerintahan, yang mencakup institusi dan aktor, adalah kompleks; pengambilan keputusan tidak relevan dengan prosedur yang ada, yang dapat lebih fokus pada pelaksanaan kekuasaan tetapi bukan legitimasi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dipengaruhi oleh sistem politik kelompok kepentingan yang tunduk pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan (Hanson, 2010), dan kebijakan dalam mekanismenya mungkin sangat sah atau sebaliknya. Tata kelola keimigrasian adalah tentang administrasi dan manajemen, yang tidak sebatas menjalankan program, tetapi bagaimana merespon dan mengelola isu-isu global atau nasional (Wasem, 2018).

Kebijakan bebas visa, Visa on Arrival, dan Visa Kunjungan Indonesia dibekukan, dan KBRI di luar negeri ditutup sementara untuk proses aplikasi visa. Jumlah wisatawan asing ke Indonesia mengalami penurunan, dan ini merupakan depresi berat bagi industri pariwisata nasional. Hal ini sangat mempengaruhi dunia usaha, investasi, dan perekonomian masyarakat yang menyebabkan penurunan pajak nasional, penerimaan negara bukan pajak, usaha kecil menengah daerah, termasuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan paket stimulus untuk mendorong

ekonomi, insentif tenaga kerja, pemotongan pajak, dan kebijakan bea cukai. Usaha kecil menengah di beberapa daerah bertahan dari krisis dengan mengubah strategi bisnisnya menjadi toko online dengan sistem delivery order.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan tingkat inflasi. Namun, muncul pertanyaan tentang pemerintah, aktor, lembaga mana yang harus bertanggung jawab; baik oleh sektor publik, perusahaan bisnis pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, atau organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab. Hal ini terkait dengan proposisi kedua governance sebagai teori (Stoker, 1998) tentang siapa yang akan bertanggung jawab atas program yang tidak dilaksanakan atau disalahartikan, terutama program pemerintah dengan skema kemitraan publik-swasta. Inti dari kebijakan keimigrasian adalah untuk menghasilkan dampak positif terhadap ekonomi, sosial, budaya, bisnis, investasi, pendidikan, keamanan, dan demografi (Hanson, 2010). Pemerintah harus berdiri dengan berbagai sudut pandang selama proses pembuatan kebijakan pengendalian keimigrasian dan menjaga wawasan pengendalian keimigrasian untuk dimasukkan dalam aturan atau prosedur.

Per April 2020, kebijakan keimigrasian ekstensif terdiri dari pembatasan perjalanan dan penutupan perbatasan internasional, pemberian Izin Tinggal Darurat bagi pengunjung asing, penghapusan hukuman overstay, dan tidak ada layanan dokumen keimigrasian karena kantor imigrasi ditutup. Permohonan visa kunjungan tidak tersedia di KBRI, tetapi visa bisnis dan kerja terbuka, dan pemegang dapat masuk ke Indonesia. Sebelum aplikasi visa, pemohon visa bisnis dan kerja membuat aplikasi ke Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan menunggu persetujuan (Rusdiyanta et al, 2018). Jika penerbangan komersial atau transportasi umum lainnya tersedia, pekerja asing dan investor dapat melakukan perjalanan ke Indonesia. Sesuai prosedur Kementerian Kesehatan RI, mereka harus mengikuti protokol kesehatan dan pemeriksaan setibanya di bandara-bandara di Indonesia. Selanjutnya, bagasi dan barang mereka akan melalui pemeriksaan ketat oleh Bea Cukai, mengacu pada standar kepabeanan selama pandemi Covid-19. Inspeksi ketat oleh petugas bea cukai, imigrasi, dan karantina di pintu masuk menyiratkan pemerintahan otonom dalam

membangun jaringan meskipun ada masalah akuntabilitas, sebagaimana disebutkan dalam proposisi keempat (Stoker, 1998). Melindungi perbatasan tidak terbatas pada kerangka dan prosedur normatif, tetapi mencakup tanggung jawab individu atau resmi untuk pelaksanaan kedaulatan nasional. Hal ini secara otomatis memicu garda terdepan untuk bekerja sama dengan instansi perbatasan lainnya dalam mengamankan perbatasan dari ancaman tak kasat mata yang masuk ke Indonesia.

Kebijakan keimigrasian diubah menjadi batas terkendali pada Mei 2020 setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi mengumumkan program stimulus ekonomi. Pemegang Izin Tinggal Tetap yang masa berlakunya telah habis, diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar negeri dan berdomisili di luar Indonesia pada saat merebaknya virus. Mereka secara otomatis diberikan Izin Tinggal Darurat saat tiba di tujuh titik masuk yang ditentukan. Dalam proses pengambilan keputusan, Ditjen Perhubungan Udara tidak bisa berdiri sendiri, harus membangun koordinasi dengan instansi terkait, dan melibatkan aparat penegak hukum lainnya. Kebijakan imigrasi menggabungkan undang-undang imigrasi, peraturan terkait, tindakan imigrasi untuk mencapai tujuan dalam kerangka nasional yang tunduk pada tren migrasi global (Baqi, 2018).

Proposisi ketiga (Stoker, 1998) relevan dengan pembuatan kebijakan kolektif, yang menjadi sandaran DGI. Di sisi lain, tahap koordinasi ini memiliki makna yang mendasari dan terkadang menjadi ambigu karena ada pertukaran informasi, termasuk kepentingan politik, untuk trade-off mereka untuk mencapai tujuan. Meskipun demikian, Stoker (1998) mengajukan proposisi kelima bahwa tanggung jawab tata kelola berhubungan dengan koordinasi, kolaborasi, kemudi, integrasi, dan regulasi. Ditjen Bina Marga dan pemangku kepentingan lainnya belum menunjukkan kemitraan strategis karena terindikasi masing-masing organisasi mengeluarkan instrumen kebijakan yang berbeda untuk merespon penyebaran Covid-19.

Dalam tahap perumusan kebijakan, baik pada masa Covid-19 maupun new normal, Ditjen Perhubungan harus melibatkan pemangku kepentingan di organisasi publik dan swasta untuk membuat kebijakan

strategis terkait kebijakan migrasi dan pengamanan perbatasan di perbatasan. Perumusan kebijakan perlu didiskusikan antara lembaga perbatasan dan lembaga terkait untuk mengeluarkan kebijakan yang komprehensif di new normal. Misalnya, perbatasan internasional di Indonesia tetap terbuka dengan beberapa pembatasan dan protokol kesehatan. Ketentuan ini dapat membantu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan usahanya dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kasus tata kelola migrasi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 hanya memasukkan lima proposisi teori tata kelola oleh Stoker (1998). Kebijakan pengendalian imigrasi dan tata kelola perbatasan di Indonesia menandakan kompleksitas pembuatan kebijakan oleh institusi dan aktor, distorsi wewenang dan tanggung jawab, saling ketergantungan dengan aksi bersama, kolaborasi self-government, dan kapasitas instansi pemerintah. Kebijakan imigrasi di perbatasan Indonesia adalah proses pembuatan kebijakan yang ketat namun tidak konsisten di mana instrumen kebijakan direvisi dan diperbarui setiap bulan. Tanggung jawab untuk menutup stasiun lintas batas kabur, menunjukkan kurangnya koordinasi di antara badan-badan perbatasan, dan ini dapat menyebabkan saling menyalahkan dan kambing hitam.

Tata kelola global dalam migrasi berakhir dengan dilema: Indonesia mengikuti kesepakatan internasional tentang kesehatan dan protokol atau perbatasan migrasi, tetapi Indonesia menghadapi masalah besar dalam hal penahanan, pemindahan, dan perintah deportasi migran gelap. Kebijakan migrasi dan keamanan perbatasan belum ditetapkan ketika krisis Covid-19 di Indonesia diumumkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen Perhubungan Udara kurang memperhatikan masalah pengawasan perbatasan. Sementara itu, kebijakan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dikelola dengan baik melalui standar dan prosedur.

Menanggapi isu tata kelola migrasi di Indonesia pada masa wabah Covid-19, penelitian ini merekomendasikan konsep integrated border management atau IBM melibatkan tiga konsep: intraservice, inter-service, dan kerjasama internasional yang dilengkapi dengan teknologi perbatasan terintegrasi (Duez, 2016). Pelajaran kebijakan

dari negara-negara tetangga (Australia, Singapura, Malaysia) sangat berharga untuk mengadaptasi tata kelola migrasi dalam hal kedaulatan teritorial, pengelolaan migran ilegal, dan penegakan perbatasan dalam krisis ini. Direkomendasikan untuk merumuskan kebijakan strategis di bidang migrasi dan kebijakan keamanan perbatasan di perbatasan setelah new normal dinyatakan oleh otoritas yang berwenang, dan krisis Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir.

Perumusan kebijakan perlu didiskusikan antara instansi perbatasan dan instansi terkait untuk mengeluarkan kebijakan strategis dalam new normal. Misalnya, perbatasan internasional di Indonesia tetap terbuka dengan beberapa pembatasan dan protokol kesehatan. Kebijakan bebas visa dan visa-on-arrival harus ditangguhkan hingga pandemi berakhir, namun visa kunjungan dan visa kerja tetap diperbolehkan masuk ke Indonesia. Direktorat Jenderal PPI harus mengeluarkan standar dan prosedur baru dalam new normal mengenai operasi atau razia keimigrasian, penyidikan, perintah penahanan, dan perintah deportasi. DGI harus memiliki program repatriasi dan perintah transfer dengan tanggal, termasuk masa tenggang untuk overstay. Penerapan teknologi penting untuk dimanfaatkan, seperti penerapan kontrol perbatasan otomatis atau autogate di titik masuk di seluruh Indonesia, dan aktivasi sistem informasi untuk aplikasi visa online yang ada, aplikasi izin tinggal online, sistem pelaporan sponsor online. Pemerintah Indonesia harus memiliki posisi tawar dengan diplomasi yang kuat untuk meminta negara memulangkan warganya dari Indonesia, misalnya dengan penerbangan charter. Untuk memenuhi kebutuhan mempelajari kebijakan keimigrasian di Indonesia pada masa krisis Covid-19, Anda dapat mempertimbangkan pembahasan lebih lanjut mengenai tata kelola migrasi dan kebijakan pengendalian perbatasan di Indonesia setelah pandemi Covid-19 berakhir, antara lain kebijakan visa, kebijakan izin tinggal, adopsi teknologi, dan pengelolaan perbatasan terintegrasi

BAB VIII. REVOLUSI INDUSTRI

A. Revolusi Industri 1.0

Revolusi Industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelolah sumber daya, sehingga menjadikan setiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.

Revolusi Industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18 (1760–1840) dan ditandai dengan adanya penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt di negara Inggris sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor.

Revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap di Inggris. Saat itu, mesin uap menjadi alat tenun mekanis pertama yang digunakan oleh bangsa Inggris untuk proses produktivitas industri tekstil. Mesin tersebut menggantikan tenaga manusia yang dulunya manual oleh tangan sekarang tergantikan oleh mesin uap tersebut. Seiring berjalannya waktu, mesin uap tersebut berkembang pada industri lainnya, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Di era ini jugalah produksi massal terjadi.

Pada bidang industri transportasi, mesin uap telah digunakan. Pada masa itu transportasi laut internasional menggunakan tenaga angin. Namun, angin tersebut tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena arah angin yang tidak menentu, berlawanan, bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun berkurang ketika James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih

efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut kapal dapat berlayar 24 jam.

Jadi bisa dibilang negara Eropa yang pertama kali melaksanakan revolusi industri adalah Inggris. Diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Belgia, Prancis, dan Jerman.

Terus, bagaimana revolusi industri pertama bisa terjadi?

Secara spesifik ada 3 faktor utama yang mendorong 1.0 yaitu: Revolusi Pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi Industri menganggap era waktu yang penting karena teknik pertanian yang lebih baik, pertumbuhan populasi, dan keunggulan Inggris Raya yang memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Era revolusi industri 1.0 dimulai di Inggris dengan ditemukannya mesin uap lalu digunakan dalam proses produksi barang. Penemuan ini penting sekali, karena sebelum adanya mesin uap, manusia cuma bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun.

Dan masalahnya, tenaga otot amat terbatas. Misalnya, manusia, kuda, sapi dan tenaga-tenaga otot lainnya tidak mungkin bisa mengangkat barang yang amat berat, bahkan dengan bantuan katrol sekalipun. Butuh istirahat secara berkala untuk memulihkan tenaga tersebut, sehingga proses produksi kalau mau berjalan 24 jam sehari membutuhkan tenaga.

Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Biasanya ini digunakan di penggilingan. Untuk memutar penggilingan yang begitu berat, seringkali manusia menggunakan kincir air atau kincir angin. Masalah utama dari dua tenaga ini adalah, manusia tak bisa menggunakannya di mana saja. Manusia cuma bisa menggunakannya di dekat air terjun dan di daerah yang berangin.

Untuk tenaga angin, masalah tambahan adalah tenaga angin tak bisa diandalkan 24 jam sehari. Ada kalanya benar-benar tak ada angin yang bisa digunakan untuk memutar kincir. Masalah ini juga muncul ketika tenaga angin menjadi andalan transportasi internasional, yaitu transportasi laut. Sebagai gambaran, di era VOC, butuh waktu sekitar 6 bulan untuk kapal dari Belanda untuk mencapai Indonesia, lalu 6 bulan lagi untuk berlayar dari Indonesia ke Belanda.

Artinya, kalau mau berlayar bolak balik Batavia-Amsterdam-Batavia, butuh waktu setahun! Maklum, terkadang ada kalanya benar-benar tak ada angin di laut, terkadang ada angin tetapi berlawanan dengan arah yang diinginkan. Penemuan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya oleh James Watt di tahun 1776 mengubah semua itu.

Kini tak ada lagi batasan waktu untuk menggerakkan mesin. Asal dipasang mesin uap rancangan James Watt ini, sebuah penggilingan bisa didirikan di mana saja, tak perlu dekat air terjun atau daerah berangin. Sebuah kapal bahkan bisa berlayar 24 jam, selama mesin uapnya dipasok dengan kayu atau batu bara.

Ini berdampak langsung dalam waktu perjalanan dari Belanda ke Indonesia terpangkas jauh, hitungannya bukan setahun lagi, tapi jadi cuma sekitar 2 bulan. Ini yang jarang dibahas di buku-buku sejarah, yaitu mengenai revolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang mereka ke seluruh penjuru dunia dalam waktu jauh lebih singkat.

Tidak ada lagi cerita tentara-tentara Eropa kelelahan saat menyerang benteng milik Kerajaan Asia. Semua daerah yang bisa terjangkau oleh kapal laut, sudah pasti terjangkau oleh kekuatan imperialis Eropa. Negara-negara Imperialis di Eropa ini rame-rame ngegas menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Ingat, di akhir 1800an inilah Belanda akhirnya menaklukkan daerah-daerah terakhir di Indonesia seperti Aceh dan Bali, yang belum ditaklukkan.

Jadi, karena kini tenaga mesin tidak dibatasi oleh otot, angin, dan air terjun, terjadilah penghematan biaya dalam jumlah luar biasa di bidang produksi, transportasi, bahkan militer.

Barang-barang yang diproduksi menjadi jauh lebih banyak, lebih murah, dan lebih mudah didapat. Uang yang semula dipakai untuk memproduksi dan membeli barang-barang mahal tersebut kini bisa dipakai untuk hal lain, sehingga barang-barang yang tak diproduksi menggunakan mesin uap pun menjadi jauh lebih laku.

Revolusi industri 1.0 ini juga mengubah masyarakat dunia, dari masyarakat agraris di mana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, menjadi masyarakat industri. Intinya, kelangkaan tenaga yang semula mendominasi kesukaran manusia dalam berlayar, dalam

memproduksi, mendadak lenyap. Tenaga tidak lagi dipasok cuma oleh otot, angin, dan air terjun, tapi juga oleh mesin uap yang jauh lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih awet.

Terakhir, kelangkaan yang dikurangi adalah kelangkaan tenaga kerja. Semula begitu banyak manusia dibutuhkan untuk menjalankan mesin-mesin produksi. Kini mendadak semua tenaga itu digantikan mesin uap.

Artinya, mendadak semua tenaga manusia tersebut jadi bebas, mereka bisa dipekerjakan di bidang lain.

Perubahan-perubahan ini amat penting sebab perubahan ini berarti menghilangkan keistimewaan para bangsawan. Berkat mesin uap, produksi kini bisa berlangsung di mana saja. Berkat mesin uap, produksi besar-besaran bukan cuma monopoli para tuan tanah yang memiliki ladang/sawah berhektar-hektar.

Kini orang-orang kaya yang memiliki mesin-mesin uap bisa memproduksi barang padahal tanah mereka tak seberapa dibanding tanahnya para bangsawan ini. Orang-orang biasa juga bisa memproduksi barang tanpa memiliki tanah pertanian. Dan orang-orang bisa jadi kaya tanpa gelar bangsawan.

Dominasi kaum bangsawan yang berlangsung atas kaum non-bangsawan selama ribuan tahun terpatahkan sudah. Namun, dampak negatif revolusi industri 1.0 ini, selain pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya yang sudah elo pelajari di buku teks sekolah adalah penjajahan di seluruh dunia.

Tanpa mesin uap, Imperialis Eropa takkan bisa menaklukkan Asia dan Afrika secepat dan semudah ini. Perkembangan revolusi industri 1.0 tidak berhenti sampai di situ saja, prosesnya terus berkembang hingga pada tahap revolusi industri 2.0.

Sektor-sektor industri yang mencetuskan Revolusi Industri 1.0 antara lain ;

1. Industri Tekstil Pada awal era industrialisasi dan mekanisasi, inovasi industri tekstil mengalami kemajuan yang luar biasa. Ini dimulai dengan pembuatan mesin untuk mesin pemintalan. Mesin pemintal adalah penemuan revolusioner yang mengubah wajah industri

tekstil. Produksi tekstil, yang dulu dijalankan oleh manusia, kini memanfaatkan kekuatan mesin, yang tak dapat disangkal efisien dan efektif. Produktivitas produksi tekstil meningkat berkali-kali lipat, dan fokus industri tekstil, yang semula tenaga manusia, beralih ke tenaga mesin.

2. Industri Baja Inovasi di bidang pertambangan juga berkembang pesat. Penemuan inovasi produksi bisa membuat proses pembuatan baja menjadi lebih murah. Biaya proses pembuatan baja murah merupakan tonggak perkembangan industri rekayasa dan transportasi. Baja memicu perkembangan revolusi industri berikutnya. Baik besi maupun baja merupakan bahan penting yang digunakan dalam pembuatan berbagai peralatan dan infrastruktur penting lainnya.
3. Transportasi Sebelum revolusi industri, barang-barang industri diangkut dengan tenaga hewan. Namun, setelah penemuan mesin uap dan kapal uap, kapal dan kereta api digunakan dalam proses pengangkutan barang jarak jauh. Revolusi Industri 2.0 Periode ini melihat kemajuan industri yang pesat di Inggris, Jerman, Amerika, Perancis dan Jepang. Revolusi industri ini kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika.

B. Revolusi industri 2.0

Revolusi industri pertama memang penting dan mengubah banyak hal, namun yang tak banyak dipelajari adalah revolusi industri 2.0 yang terjadi di awal abad ke-20.

Saat itu, produksi memang sudah menggunakan mesin. Tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Namun, proses produksi di pabrik masih jauh dari proses produksi di pabrik modern dalam hal transportasi.

Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Namun, di pabrik mobil, setiap mobil dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama.

Semua komponen mobil harus dibawa ke si tukang-perakit. Seorang tukang-perakit memproses barang tersebut dari nol hingga produk jadi. Setiap mobil akan dirakit oleh seorang tukang yang “Generalis” yang memproses mobil tersebut dari awal hingga selesai, dari merakit ban, pintu, setir, lampu, dst., sampai lengkap.

Proses produksi ini memiliki kelemahan besar yaitu perakitan dilakukan secara paralel. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak tukang secara bersamaan. Ini membuat setiap tukang harus diajari banyak hal seperti memasang ban, memasang setir, memasang rem dll.

Seandainya ada masalah dalam proses perakitan, mobil yang belum jadi harus “digeser” dan si tukang harus meminta mobil baru sehingga proses produksi mobil bisa berjalan terus. Butuh waktu untuk memindahkan mobil bermasalah ini dan butuh waktu mendapatkan mobil baru, dan proses perakitan harus mulai dari 0 lagi. Karena itu, proses perakitan mobil seperti ini akan memakan waktu sangat banyak.

Ketika perusahaan mobil Ford di Amerika Serikat meluncurkan mobil murah pertama di dunia, bernama “Ford Model T”, mereka kebanjiran pesanan. Namun, demand yang tinggi tidak didukung dengan sumber daya yang tinggi pula hingga Ford akhirnya tidak bisa memenuhi keinginan pasar. Dibutuhkan waktu sekitar 12 jam 30 menit buat seorang tukang untuk merakit Ford Model T.

Di tahun 1912, Ford cuma bisa memproduksi 68.773 mobil dalam setahun. Artinya, sistem “Satu perakitan, satu mobil” tak bisa dipertahankan. Sistem produksi harus direvolusi. Tanda dimulainya revolusi industri 2.0 adalah dengan terciptanya “Lini Produksi” atau Assembly Line yang menggunakan “Ban Berjalan” atau conveyor belt di tahun 1913.

Hasil dari penemuan terkait dengan roda berjalan untuk meningkatkan output barang yang diproduksi oleh pabrik. Selain itu, perubahan sistem pada pekerja juga dilakukan untuk mempercepat proses produksi. Yaitu dengan tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir.

Para tukang yang tadinya mengerjakan banyak tugas diorganisir untuk menjadi spesialis dan cuma mengurus satu bagian saja, memasang ban misalnya. Produksi Ford Model T dipecah menjadi 45 pos, mobil-mobil tersebut kini dipindahkan ke setiap pos dengan conveyor belt, lalu dirakit secara serial.

Misalnya, setelah dipasang ban dan lampunya, barulah dipasang mesinnya seperti gambar di bawah. Semua ini dilakukan biasanya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik, yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap.

Penggunaan tenaga listrik, ban berjalan, dan lini produksi ini menurunkan waktu produksi secara drastis, kini sebuah Ford Model T bisa dirakit cuma dalam 95 menit!

Akibatnya, produksi Ford Model T melonjak, dari 68 ribuan mobil di tahun 1912, menjadi 170 ribuan mobil di tahun 1913, 200 ribuan mobil di tahun 1914, dan tumbuh terus sampai akhirnya menembus 1 juta mobil per-tahunnya di tahun 1922.

Dan nyaris mencapai 2 juta mobil di puncak produksinya, di tahun 1925. Totalnya, hampir 15 juta Ford Model T diproduksi sejak 1908 sampai akhir masa produksinya di tahun 1927. Produksi mobil murah secara besar-besaran ini mengubah bukan cuma industri mobil Amerika, bukan cuma industri mobil dunia, tapi juga budaya seluruh dunia. Loh, kok bisa sejauh itu?

Begini, produksi mobil murah secara massal seperti itu berarti membuat mobil menjadi barang terjangkau. Sejak Model T diproduksi massal, bukan cuma orang kaya yang membeli dan menggunakan mobil, kelas menengah bisa membelinya, bahkan kelas miskin bisa menyicilnya atau meminjamnya.

Mendadak, ratusan ribu, bahkan jutaan orang jadi punya mobil. Mendadak, transportasi dari rumah ke tempat kerja jadi jauh lebih mudah, tidak tergantung jarak, tidak tergantung jadwal transportasi umum.

Ini menyebabkan munculnya daerah yang disebut “Suburb” atau “Pinggiran” yaitu perumahan yang muncul di pinggir kota, bukannya di pusat kota. Akibat punya mobil, jutaan orang ini butuh garasi, tempat parkir, bengkel ganti oli, bengkel ganti ban, tukang cuci mobil, dan 1001 hal lain yang tidak terpikir sebelumnya.

Itu baru mobil, produksi menggunakan conveyor belt ini juga menurunkan waktu dan biaya produksi di banyak bidang lainnya. Artinya, bertambahnya waktu, menyebabkan berkurangnya kelangkaan waktu.

Selain itu, conveyor belt juga digunakan untuk mengangkut barang tambang dari tambang ke kapal lalu dari kapal ke pabrik. Sekali lagi, menghemat waktu dan tenaga.

Masih belum cukup, penggunaan conveyor belt dan lini produksi juga menghemat luas lahan yang diperlukan pabrik. Artinya, kelangkaan lahan perkotaan untuk produksi juga berhasil dikurangi.

Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer di Perang Dunia 2. Meski bisa dikatakan bahwa peristiwa revolusi industri 2.0 sudah terjadi di Perang Dunia 1, di Perang Dunia 2-lah efeknya benar-benar terasa.

Ribuan tank, pesawat, dan senjata-senjata tercipta dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Ini semua terjadi karena adanya produksi massal (mass production). Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang jadi komplit.

Revolusi Industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 (1870-an) dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini (Assembly Line) dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Era revolusi industri 1.0 telah berakhir pada tahun 1850-an, revolusi industri pun berlanjut pada 2.0 yang terjadi pada awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual sekarang tergantikan oleh mesin uap, dan kini ditemukan tenaga listrik yang lebih memudahkan pekerjaan. Berbeda dengan revolusi pertama yang lebih berfokus kepada efisiensi mesin, revolusi industri 2.0 lebih fokus kepada proses produksi itu sendiri.

Seperti di akhir tahun 1800-an, mobil diproduksi secara massal. Proses pembuatan mobil yang awalnya dibuat pada satu tempat, akhirnya diselesaikan dengan konsep assembly line yang memanfaatkan conveyor belt pada tahun 1913. Para perakitan mobil dilatih untuk mengurus satu bagian saja, sehingga proses produksi mobil yang massal bisa dilakukan lebih efisien.

Dampak lain dari revolusi industri 2.0 adalah saat perang dunia II, dimana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara massal. Ini merupakan kelanjutan integral dari Revolusi Industri awal yang dimulai di Inggris pada abad ke-18. Revolusi Industri 2.0, juga dikenal sebagai Revolusi Teknologi, melihat lompatan besar dalam perkembangan teknologi dan sosial budaya selama periode ini. Inovasi pada masa ini adalah awal perkembangan industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sekitar tahun 1900 hingga 1960, yang ditandai dengan ditemukannya jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien serta mekanisasi sistem produksi massal melalui standarisasi mutu dan mutu. Inovasi dan kemajuan di era Revolusi Industri 2.0 antara lain:

- a. Mengembangkan sumber energi seperti minyak bumi dan batu bara sebagai sumber bahan bakar baru.
- b. Awal mula teknik elektro adalah ditemukannya arus bolak-balik dan searah yang dapat digunakan untuk membangkitkan motor listrik (elektrifikasi).
- c. Sebuah inovasi baru dalam produksi baja skala besar.
- d. produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal.
- e. Mesin industri banyak digunakan di bidang manufaktur. Apa
- f. Penyebaran telegraf memungkinkan terjadinya komunikasi jarak jauh.
- g. Penggunaan teknik elektro dalam teknologi transportasi dan telekomunikasi merupakan lompatan besar bagi perkembangan sektor industri.

C. Revolusi Industri 3.0

Revolusi Industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20 (1970-an) dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar (Komputer & Software) berbasis teknologi otomasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Pada revolusi industri 3.0, peran manusia dalam industri dikurangi, kemudian digantikan oleh mesin-mesin pintar berteknologi khusus. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berfikir secara

otomatis, yaitu robot dan komputer. Salah satu komputer pertama dikembangkan pada perang dunia II sebagai mesin pemecah kode buatan Nazi Jerman yang dinamakan komputer Colossus. Penggunaan computer mulai menggantikan hal yang rumit, ketika dahulu dilakukan oleh manusia sekarang dilakukan oleh komputer seperti mengirim dokumen, membuat pencatatan, dsb.

Setelah mengganti tenaga otot dengan uap, lalu produksi paralel dengan serial, perubahan apa lagi yang bisa terjadi di dunia industri? Faktor berikutnya yang diganti adalah manusianya. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis yaitu komputer dan robot. Karena hal inilah revolusi 3.0 memiliki nama lain yaitu Revolusi Digital.

Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal-bakal kemudahan kerja untuk manusia. Bisa dibilang, abad informasi dipicu oleh munculnya revolusi industri yang ke 3. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal-bakal kemudahan kerja untuk manusia.

Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia 2 sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman, yaitu komputer yang bisa diprogram pertama yang bernama Colossus adalah mesin raksasa sebesar sebuah ruang tidur.

Colossus adalah komputer yang tidak punya RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard, apalagi touchscreen, tapi melalui pita kertas. Komputer purba ini juga membutuhkan listrik luar biasa besar yaitu 8500 watt. Namun, kemampuannya nggak ada sepersejutanya smartphone yang ada di kantong kebanyakan orang Indonesia saat ini.

Kemajuan teknologi komputer menjadi ngebut luar biasa setelah perang dunia kedua selesai. Penemuan semikonduktor, disusul transistor, lalu integrated chip (IC) membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, sementara kemampuan berhitungnya terbang ke langit. Mengecilnya ukuran komputer menjadi penting, sebab kini komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Kini, komputer menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi, sama seperti

operator telepon di perusahaan telepon diganti oleh relay sehingga kita tinggal menelpon nomor telepon untuk menghubungi teman kita.

Proses ini disebut “Otomatisasi” semuanya jadi otomatis, tidak memerlukan manusia lagi. Artinya, sekali lagi terjadi penurunan kelangkaan sumber daya manusia, terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk pekerjaan – pekerjaan lain.

Seiring dengan kemajuan komputer, kemajuan mesin-mesin yang bisa dikendalikan komputer tersebut juga meningkat. Macam-macam mesin diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang menyerupai bentuk dan fungsi manusia. Peristiwa revolusi industri 3.0 ini menempatkan komputer sebagai otak dari sebuah mesin, robot menjadi tangannya, pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menghilang.

Namun, ini bukan berarti tugas manusia di produksi bisa digantikan sepenuhnya oleh robot. Pabrik-pabrik mobil semula berpikir revolusi industri 3.0 ini akan seperti 2.0, di mana produksi paralel diganti total oleh lini produksi, robot akan secara total diganti oleh manusia. Pabrik-pabrik mobil di tahun 1990an mencoba mengganti semua pegawai mereka dengan robot, hasilnya adalah produktivitas malah menurun.

Elon Musk mencoba melakukannya lagi di tahun 2010an ini di pabrik mobil Tesla-nya. Akhirnya, semua orang menemukan fakta bahwa untuk produksi mobil, kombinasi manusia dan robot-komputer adalah yang terbaik. Munculnya robot dan komputer menjadi penolong manusia, bukannya penggantinya.

Sekali lagi, peristiwa revolusi industri ini mengubah masyarakat. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat berubah dari mengandalkan sektor manufaktur, menjadi mengandalkan sektor jasa seperti bank, studio film, TI, dll. Mereka berubah dari ekonomi industri menjadi ekonomi informasi.

Karena kemajuan ini juga, terjadilah perubahan dari data analog menjadi data digital. Misalnya, dari merekam musik menggunakan kaset menjadi menggunakan CD, dari menonton film di video player menjadi menggunakan DVD player; dst. Ini terjadi karena komputer itu cuma bisa bekerja dengan data digital.

Karena peristiwa revolusi industri ini juga, video game menjadi sesuatu yang normal dalam kehidupan kita, menjadi bisnis dengan nilai miliaran, bahkan triliunan Dolar. Di sisi negatifnya, digitalisasi, computer.

Era Revolusi Industri 3.0 telah memaksa kita untuk berinovasi. Diawali dengan Revolusi Industri 1.0 yang ditandai dengan ditemukannya mesin-mesin industri, Revolusi Industri 2.0 yang ditandai dengan ditemukannya teknik elektro industri, dan Revolusi Industri Ketiga yang diawali dengan munculnya informasi dan teknologi. sistem otomatisasi berbasis robot. Pabrik-pabrik industri tidak lagi dikendalikan oleh manusia, melainkan oleh komputer, atau yang dikenal dengan komputerisasi.

Periode ini dari tahun 1960 hingga 2010 melihat inovasi dalam pengembangan sistem perangkat lunak untuk menggunakan perangkat keras elektronik. Banyak penemu dan produsen perangkat elektronik yang memungkinkan untuk mengotomatisasi pengoperasian mesin menggantikan peran personel produksi. Inovasi dan kemajuan era Revolusi Industri 3.0 antara lain:

- a. Teknologi komputer.
- b. Akses Internet.
- c. Elektronik untuk smartphone.
- d. Inovasi dalam sistem perangkat lunak.
- e. Inovasi dan pengembangan sumber energi baru.

D. Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet, komputerisasi, microchip, IoT, kecerdasan buatan (AI), machine learning, deep learning, cloud analytics, bahkan kendaraan otonom merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus kepada keberlanjutan (Sustainability). Nah, inilah revolusi terbaru yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu revolusi industri 4.0 (four point zero). Dimana pada era kali ini lebih berfokus pada perkembangan dunia dan internet (internet of things). Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber, revolusi ini juga dikenal dengan

istilah “cyber physical system”. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, AI (Artificial Intelligence), cloud computing, dsb. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup.

Teknologi baru selalu dikembangkan pada era saat ini seperti, ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital banyak beredar pada era revolusi kali ini. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia (human).

Dalam era revolusi industri 4.0 ini setidaknya ada 5 poin penting yang menjadi pilar utama dalam pengembangan industri siap digital, seperti :

1. Internet of Things (IoT)

IoT merupakan konsep dimana koneksi internet terhubung atau diperluas ke perangkat fisik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Big data

Big data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur yang digunakan untuk membantu kegiatan bisnis.

3. AI (Artificial Intelligence)

AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan dan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia.

4. Cloud Computing (Komputasi Awan)

Cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer pengembangan berbasis internet (awan), dimana penggunaannya diberikan hak akses (login) menggunakan cloud.

5. Addictive Manufaktur

Addictive manufacturing merupakan industry yang memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan 3D printing. Era revolusi industri 1.0 sampai 4.0 terbukti membawa peluang baik di setiap tahapannya, meski begitu terdapat resiko yang perlu diantisipasi. Semua hal yang akan terjadi ataupun sudah terjadi akan membawa dampaknya

tersendiri, tergantung kepada cara kita melihat dan menyikapi revolusi industri ini.

Ini adalah era yang ditandai dengan manusia, data, dan mesin yang saling berhubungan dalam bentuk virtual atau siber-fisik. Perkembangan Revolusi Industri membawa perubahan yang cepat dengan tujuan luhur meningkatkan kualitas hidup. Di Era Industri 4.0, tren inovasi bergeser ke teknologi digital. Di era Revolusi Industri 4.0, otomatisasi dimungkinkan di segala bidang untuk produktivitas yang efektif dan efisien. Penerapan sistem informasi rantai pasok digital pada setiap unit kerja dapat meminimalkan peran manusia sebagai operator. Secara umum, di Era Industri 4.0 ini, peran tenaga kerja manusia berubah dari operator menjadi profesional yang sangat terampil. Istilah lain dari Revolusi Industri 4.0 adalah era revolusi digital dan disrupsi teknologi. Semua bidang menggunakan sistem pencatatan terkomputerisasi otomatis. Salah satu nilai jual unik Revolusi Industri 4.0 adalah penerapan kecerdasan buatan di semua sektor industri.

Revolusi Industri 4.0 tumbuh dari proyek yang diprakarsai oleh pemerintah federal untuk mempercepat pembuatan komputer. Revolusi generasi keempat ini ditandai dengan munculnya komputer canggih, robot cerdas, dan kendaraan berpemandu otomatis yang memungkinkan manusia lebih mengoptimalkan fungsi otak. Peluang di era Revolusi Industri 4.0 Banyak peluang yang bisa dikembangkan di era revolusi industri saat ini. Itu semua tergantung pada kreativitas untuk mencari dan menemukan peluang yang tersebar di setiap industri. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental akan mengubah industri dan sifat pekerjaan. Ini menghadirkan area bisnis baru, pekerjaan baru, dan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Tetap kompetitif di era Industri 4.0 merupakan persyaratan agar tidak tertinggal, kuncinya dengan pandai membaca dan beradaptasi dengan perubahan serta menjaga keterampilan agar tetap *up to date*.

Jadi, kesimpulannya adalah Istilah Revolusi Industri merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan prose produksinya. Pertama kali muncul di tahun 1750 an, ini lah yang biasa disebut Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 berlangsung periode antara tahun 1750-1850. Saat itu terjadi perubahan secara

besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.

Revolusi generasi 1.0 melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis di mana selama dua abad setelah Revolusi Industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan perkapita Negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat. Revolusi Industri 2.0, juga dikenal sebagai Revolusi Teknologi adalah sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Revolusi Industri 1.0 yang berakhir pertengahan tahun 1800-an, diselingi oleh perlambatan dalam penemuan makro sebelum Revolusi Industri 2.0 muncul tahun 1870.

Meskipun sejumlah karakteristik kejadiannya dapat ditelusuri melalui inovasi sebelumnya di bidang manufaktur, seperti pembuatan alat mesin industri, pengembangan metode untuk pembuatan bagian suku cadang, dan penemuan Proses Bessemer untuk menghasilkan baja, Revolusi Industri 2.0 umumnya dimulai tahun 1870 hingga 1914, awal Perang Dunia I. Revolusi industri generasi 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (combustion chamber). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll yang mengubah wajah dunia secara signifikan.

Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya Revolusi Industri 3.0. Proses revolusi industri ini kalau dikaji dari cara pandang sosiolog Inggris David Harvey sebagai proses pemampatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu semakin terkompresi. Dan, ini memuncak pada revolusi tahap 3.0, yakni revolusi digital. Waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Revolusi kedua dengan hadirnya mobil membuat waktu dan jarak makin dekat. Revolusi 3.0 menyatukan keduanya. Sebab itu, era digital sekarang mengusung sisi kekinian (real time).

Selain mengusung kekinian, revolusi industri 3.0 mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Praktik bisnis pun mau tidak mau harus berubah agar tidak tertelan zaman. Namun,

revolusi industri ketiga juga memiliki sisi yang layak diwaspadai. Teknologi membuat pabrik-pabrik dan mesin industri lebih memilih mesin ketimbang manusia. Apalagi mesin canggih memiliki kemampuan memproduksi lebih berlipat. Konsekuensinya, pengurangan tenaga kerja manusia tidak terelakkan. Selain itu, reproduksi pun mempunyai kekuatan luar biasa. Hanya dalam hitungan jam, banyak produk dihasilkan. Jauh sekali bila dilakukan oleh tenaga manusia.

Lalu Pada revolusi industri generasi 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi (disruptivetechology) hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Lebih dari itu, pada era industri generasi 4.0 ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil.

Globalisasi secara etimologi berasal dari kata *globe* yang artinya ‘bola dunia’. Dengan demikian globalisasi yaitu proses mendunia atau gerakan menuju satu dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses menyebarnya suatu hal, baik ilmu pengetahuan, kebudayaan, teknologi, informasi, pemikiran, maupun gaya hidup ke setiap penjuru dunia sehingga batas- batas antarnegara tidak dapat terlihat lagi.¹ Menurut John Huckle (Miriam Steiner, 1996) globalisasi adalah suatu proses dengan mana kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia, menjadi konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat yang jauh. Sementara menurut Albrow (Yaya, 1998), globalisasi adalah keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini (dimasukkan) diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global. Oleh sebab itu, proses ini bersifat majemuk sehingga kita pun memandang globalisasi di dalam kemajemukan.

Globalisasi mengandung unsur dari proses, individu/manusia yang heterogen, tetapi memiliki kebutuhan yang sama. Globalisasi identik dengan istilah *global village* yang artinya ‘desa global’. Desa global memiliki makna batas-batas wilayah negara seolah menjadi pudar bahkan seperti hilang jadi tanpa batas akibat kemajuan teknologi alat komunikasi dan transportasi. Batas negara dikatakan pudar karena semua orang dapat mengunjungi negara manapun dengan sangat mudah karena bantuan alat transportasi modern. Selain itu, komunikasi antarmasyarakat beda negara dengan mudah dapat dilakukan karena bantuan alat komunikasi dan jaringan internet. Batas negara disebut pudar karena sekarang jika kita membutuhkan suatu barang kita bahkan bisa menemukan barang-barang dagang dari luar negeri dengan sangat mudah. Sekejap mata hanya dengan senam jari maka barang apapun bisa dipesan.

Globalisasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yakni globalisasi politik, globalisasi ekonomi, dan globalisasi budaya.² Globalisasi politik adalah proses di mana tugas-tugas pembuatan kebijakan telah berpindah dari pemerintah-pemerintah nasional menuju organisasi-organisasi internasional. Globalisasi telah menciptakan berbagai masalah dan kepentingan yang sifatnya global. Banyak masalah yang tidak lagi bisa diatasi sendiri oleh sebuah negara secara unilateral sehingga kerja sama internasional yang sifatnya multilateralisme menjadi pilihan suatu negara. Hal pokok dari globalisasi politik adalah peralihan penyusunan kebijakan dari pemerintah nasional kepada organisasi internasional. Melalui globalisasi politik dapat meningkatkan intensitas pola interaksi, komunikasi, dan koordinasi di bidang politik, khususnya dalam mengawal penegakan HAM di dunia Internasional. Adanya fenomena globalisasi di bidang politik mengakibatkan dampak positif dan negatif. Dampak positif di antaranya, hak politik dapat digunakan dengan bebas oleh masyarakat, hak asasi manusia seseorang diakui keberadaannya, dan orang tersebut dapat menggunakan haknya. Sedangkan dampak negatifnya adalah sistem musyawarah yang

biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di negara demokrasi semakin ditinggalkan, kepentingan kelompok atau golongan lebih diutamakan daripada kepentingan bersama, semakin tingginya intensitas aksi anarkis yang terjadi. Contoh nyata globalisasi politik di Indonesia adalah dengan bergabungnya Indonesia untuk melakukan kerja sama Internasional dengan negara lain seperti dalam organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ASEAN (Association of South East Asian Nations), APEC (Asia Pasific Economic Cooperation), OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), WTO (World Trade Organization), dan IFC (Internasional Finance Corporation).



Gambar 1.1 Kerja Sama Politik Indonesia dalam ASEAN

Selanjutnya globalisasi ekonomi merupakan suatu proses terbukanya kegiatan perekonomian (perdagangan, arus modal, barang dan jasa) antarnegara tanpa adanya hambatan batas teritorial suatu negara. Globalisasi ekonomi juga dimaknai sebagai suatu kondisi di mana ilmu ekonomi masuk ke dalam suatu negara. Ilmu ekonomi tersebut mencakup 3 hal, yaitu mengenai cara produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Kegiatan distribusi adalah proses menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada masyarakat (konsumen). Terakhir adalah konsumsi yakni kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Pelaku yang

melakukan proses produksi disebut produsen, dalam kegiatan distribusi disebut distributor, dan orang yang melakukan aktivitas konsumsi disebut konsumen. Perkembangan globalisasi bisa mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya termasuk kebijakan moneter negara tersebut.

Globalisasi ekonomi berhubungan erat dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatan-hambatan itu misalnya tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi sehingga membuat harga produk menjadi tidak kompetitif. Pada prinsipnya globalisasi mencoba menghilangkan atau meminimalisasi permasalahan ekonomi yang terjadi dalam perdagangan internasional.

Contoh dari adanya globalisasi ekonomi adalah merebaknya merk kopi “*starbucks*” di Indonesia, ditemukannya produk makanan cepat saji “*indomie*” di luar negeri. Hal tersebut menandakan adanya perdagangan bebas yang mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang terakhir adalah globalisasi budaya.



Gambar 1.2 Kopi Starbucks



Gambar 1.3 Indomie di luar negeri

Globalisasi budaya adalah salah satu bentuk penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh penjuru dunia dengan cara tertentu untuk dapat memperluas dan mempererat hubungan sosial antara negara satu dengan negara lainnya. Oleh karena itu globalisasi kebudayaan melibatkan suatu pembentukan norma dan pengetahuan bersama yang sesuai dengan identitas atau kelengkapan dari budaya mereka masing-masing antar negara, baik individu maupun kelompok. Globalisasi kebudayaan meliputi aspek bahasa, gaya hidup, pakaian, makanan, film, musik dan lain sebagainya. Terdapat beberapa unsur yang menyebabkan arus penyebaran kebudayaan yang cepat dari satu negara ke negara lain, yakni masuknya budaya asing ke Indonesia dan media yang semakin terbuka dan terjangkau sehingga masyarakat dapat menerima berbagai macam informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Berikut adalah beberapa dampak positif adanya globalisasi di bidang kebudayaan :

1. Memicu pembaharuan kesenian
2. Sektor pariwisata semakin berkembang
3. Kemudahan dalam Pertukaran Budaya Internasional
4. Menjunjung tinggi pelaksanaan HAM
5. Mendorong penyeteraan gender

Sedangkan di bawah ini merupakan dampak negatif adanya globalisasi budaya :

1. Rusaknya moral masyarakat.
2. Munculnya sikap individualisme pada manusia.

Menurut ahli Jan Aart Scholte, globalisasi dapat diartikan dalam lima poin penting, yakni :

1. Internasionalisasi

Internasionalisasi diartikan sebagai hubungan internasional yang semakin meningkat antara negara satu dengan negara yang lain. Suatu negara akan menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan eksistensinya ia membutuhkan negara lain. Istilah tersebut dapat disebut meningkatnya ketergantungan atau interdependensi antarnegara.

2. Liberalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), liberal memiliki arti bersifat bebas, berpandangan bebas (luas, terbuka), sedangkan liberalisasi berarti proses (usaha dan sebagainya) untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan (tata negara dan ekonomi). Dalam konteks globalisasi, liberalisasi dapat dimaknai sebagai proses dihapuskannya larangan- larangan pemerintah antarnegara guna mewujudkan perekonomian dunia yang terbuka dan terintegrasi. Pada praktiknya, kita dapat melihat batas negara yang semakin kabur, contohnya dalam praktik perdagangan bebas AFTA (Asean Free Trade Area). AFTA merupakan suatu perjanjian dan kerja sama yang dilakukan oleh negara- negara Asean untuk menciptakan suatu kawasan bebas perdagangan demi terwujudnya tempat produksi yang kompetitif di wilayah Asean.

3. Universalisasi

Universalisasi artinya suatu peristiwa lokal namun berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Contohnya adalah ketika terjadi krisis finansial di Amerika Serikat, fenomena tersebut menyebabkan dampak yang cukup signifikan dalam bidang perekonomian di seluruh penjuru dunia.

4. Westernisasi

Menurut Koentjaraningrat, pengertian westernisasi adalah proses meniru gaya hidup orang barat yang dilakukan masyarakat secara berlebihan dalam bentuk gaya hidup, kebiasaan, gaya pergaulan, dan lain sebagainya. Pada intinya,

fenomena globalisasi mengakibatkan masuknya budaya barat ke budaya timur, khususnya negara Indonesia.

5. Deteroterialisasi/ Suprateritorialisasi

Merupakan penyusunan kembali geografi agar ruang spasial tidak lebih panjang pemetaannya dalam pengertian tempat, jarak, dan batas- batas wilayah.

Globalisasi telah membuat teknologi dan internet kehilangan konotasi kunonya sebagai mesin yang kompleks dan impersonal. Mereka telah menjadi perangkat yang menghadirkan fitur nyata di dalam masyarakat. Dimana internet telah menyediakan sumber pengetahuan dan juga sumber kesenangan yang tiada habisnya. Dampaknya, sampai dengan tahun 2020, diperkirakan hampir 60% penduduk dunia telah terkoneksi dengan internet (Digital 2020 Global Overview Report). Dan kemudian, angkanya akan semakin bertumbuh secara eksponensial di tahun-tahun kedepan.

Manuel Castells merupakan salah satu intelektual pertama yang memahami internet dan perkembangan terkait dalam teori sosial yang lebih luas. Dalam tulisannya, Castells (2004) menyajikan konsep tentang masyarakat jaringan (network society): masyarakat baru yang muncul yang dihubungkan oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Didorong oleh TIK ini, Castells mengamati pembentukan jenis baru kapitalisme yang ia sebut "kapitalisme informasi global", atau singkatnya "informasionalisme". Sistem baru ini ditandai dengan pengolahan pengetahuan dan informasi melalui teknologi. Dimana jaringan (network) merupakan elemen penting dari pengaturan sosial-ekonomi baru ini dan mewakili logika organisasi masyarakat.

Menurut Castells (2004), masyarakat jaringan adalah masyarakat yang struktur sosialnya terbuat dari jaringan yang didukung oleh TIK berbasis mikroelektronika. Dimana jaringan didefinisikan sebagai "satu set node yang saling berhubungan" yang mengikuti struktur yang sangat mudah beradaptasi, terbuka, dan terdesentralisasi.

Sistem yang saling terkait ini memungkinkan sistem organisasi bekerja secara efisien berkat tiga karakteristik utama: Fleksibilitas, konsep dimana jaringan dapat mengkonfigurasi ulang diri mereka

sendiri sebagai tuntutan lingkungan yang berubah dan tetap bekerja menuju tujuan yang sama; Skalabilitas, karakteristik dimana jaringan tidak menampilkan ukuran atau jumlah elemen yang tetap, bentuk dan luasnya bervariasi tergantung pada konektivitas anggota; dan Kemampuan bertahan, yang berarti bahwa karena strukturnya yang terdesentralisasi, jaringan lebih tahan terhadap serangan dan kerentanan pada node individu.

Dalam masyarakat jaringan, salah satu dampak terpenting dari globalisasi adalah cara globalisasi memungkinkan kita menciptakan hubungan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin lama semakin tidak dibatasi oleh tempat kita berada pada waktu tertentu.

Dalam masyarakat tradisional, hubungan sosial, adat, dan budaya yang berbeda terdapat di ruang yang terpisah dan individu harus menyesuaikan diri dengan harapan dan aturan tertentu, misalnya dalam keluarga, desa, kota, dan negara bangsa.

Dalam masyarakat global, ruang-ruang ini kehilangan kekuatannya untuk membatasi individu. Orang dapat berkomunikasi tanpa kontak pribadi melalui jaringan global media massa, telepon, faks, dan komputer dan semakin lama semakin tidak terhubung secara tatap muka. Pada saat yang sama, tradisi yang sudah ada sebelumnya tidak dapat menghindari kontak dengan nilai-nilai dan bentuk-bentuk pengetahuan yang baru dan jauh berbeda.

Mengenai kekuasaan, Castells menekankan bahwa jaringan adalah entitas utama yang mengerahkan kekuasaan. Di masa lalu kepentingan sosial tertentu dapat mendominasi kekuasaan, namun saat ini, yang mendominasi kekuasaan adalah jaringan dan arus informasi. Castells berpendapat bahwa kemampuan untuk membentuk, memprogram, dan memprogram ulang jaringan adalah cara untuk menjalankan kekuasaan atas orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, U.F. (2014), Kesehatan Masyarakat dan Globalisasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia, 2009, Indonesia, Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013, Bencana di Indonesia, 2012.
- Badan Meterologi Klimatologi Geofisika, 2012 : Analisis Hujan Bulan Januari 2013.
- Jaya Askar, 2004, Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), Halaman 1
- Suparmoko Muhammad, 2020, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional, Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, Vol. 9, No. 1, Halaman 40 - 41
- , 2020, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional, Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, Vol. 9, No. 1, Halaman 43
- Rosana Mira, 2018, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 1, Halaman 152
- Lina Warlina, M.Ed., Modul Manajemen Pembangunan Dan Lingkungan: Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- , Modul Manajemen Pembangunan dan Lingkungan: Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- Humphrey Wangke, dkk, 2013, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya Terhadap Indonesia, Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, Fahiona Diah Anisa, 2019, SDGs Paradigma Baru Pembangunan Global, Spektrum Nusantara.

- Gilpin, Robert, 2001, *Global Political Economy, Understanding The Economic Order* (Princeton University Press).
- Hirt, Paul and Grahame Thomson, 1996, *Globalization in Question*, Blackwell Publisher Ltd, Cambridge.
- Jayasurya, Kanishka, 2000, *Dari Kekuasaan Negara ke Kekuasaan Pasar Global*, *Jurnal Wacana* No. VII, 2000.

TENTANG PENULIS



Dr. Ridwan, SE, M. Si, lahir di Desa Rasabou Sila Bima Nusa Tenggara Barat pada 31 Desember 1960, Ayah H. Ahmad Bakar (Kepala Desa Rasabou tahun 1974) Ibu Fatimah H. Ismail (Ibu Rumah Tangga). Masa kecil Sekolah Dasar Negeri 3 Sila, Sekolah Menengah Pertama Sila, Sekolah Pendidikan Guru Negeri Bima, kemudian merantau ke Ujung Pandang pada Tahun 1981 kuliah pada Akademi Pimpinan Perusahaan Ujung Pandang, selanjutnya bekerja pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada Kantor Residen Wilayah I sambil menyelesaikan kuliah S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ujung Pandang, kemudian dipindah tugaskan pada Kantor Walikota Makassar pada tahun 2000 tepatnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya ditugaskan untuk melanjutkan kualiah S2 di UNHAS Makassar selesai pada tahun 2004. Pada tahun 2006 pindah ke kampung halaman di tempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bima. Pada tahun 2009 ditugaskan untuk melanjutkan S3 pada Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur selesai pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 pindah tugas dari Pemda Kabupaten Bima ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Dosen hingga sekarang.



DINAMIKA PEMBANGUNAN GLOBAL

Buku ini mengulas berbagai aspek penting dalam konteks pembangunan global. Penulis mengawali perjalanan ini dengan menjelaskan berbagai teori tentang pembangunan, seperti teori fungsional struktural, teori ketergantungan, teori sistem dunia, teori liberal, dan teori artikulasi. Melalui bab-bab awal, pembaca diperkenalkan pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perkembangan global dipahami dari berbagai sudut pandang teoritis.

Selanjutnya, buku ini membahas topik-topik penting lainnya seperti global governance dan peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, UNI Eropa, APEC, dan IMF dalam mengelola dinamika global. Bab mengenai Smart City membahas tentang perkembangan kota-kota cerdas yang menjadi tren global, dengan mengulas tujuan, karakteristik, dan indikator serta cara menciptakannya. Selain itu, buku ini juga membahas perdagangan bebas, regulasi kawasan, strategi pembangunan berkelanjutan, dan prioritas pembangunan nasional.

Poin puncak dari buku ini adalah eksplorasi mengenai dampak pandemi COVID-19 pada kebijakan global, perdagangan pangan, ekonomi kreatif, serta pengolahan limbah berbahaya. Buku ini juga mengulas perkembangan revolusi industri yang meliputi empat gelombang revolusi industri, dari Revolusi Industri 1.0 hingga Revolusi Industri 4.0. Melalui berbagai topik yang dianalisis dalam buku ini, pembaca akan mendapatkan wawasan mendalam tentang dinamika pembangunan global, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dapat diambil untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di era modern ini.



Penerbit:
Yayasan Sahabat Alam Rafflesia (Anggota IKAPI)
Email: penerbit.salamrafflesia@gmail.com

ISBN 978-623-427-204-8 (PDF)

